



**PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergi antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten. Adapun temapembangunan tahun 2020 sebagaimana RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah “ Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”

1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada Bulan April 2019.
- 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.
- 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 6) Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kabupaten Rembang dan nilai-nilai kearifan lokal.
- 7) Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

Selain hal di atas, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yaitu:

- 1) Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
- 2) Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Masyarakat/umat, dan CSR;
- 3) Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Pendekatan Spasial melalui Wilayah Pengembangan;
- 5) Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Desa/Kecamatan, Konsultasi Publik, Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten.
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Rembang, Perangkat Daerah (*desk trilateral meeting*) pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Rembang serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, hasil Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional, Pra Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten serta verifikasi akhir program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020.

1.3 Prinsip Penyusunan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;

7. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Guna meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPd Kabupaten Rembang Tahun 2020 didukung oleh sistem dan skema proses melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui Sistem *e-Planning* dan pelaksanaan rangkaian Musrenbang, untuk fokus prioritas kegiatan yang disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Money Follow Program*).

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

RKPd Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Juncto Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PUG di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang SIPD;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018;
 20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 tanggal 27 Desember 2018 perihal Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbag RKPD Tahun 2020.

1.5 Hubungan Antar Dokumen

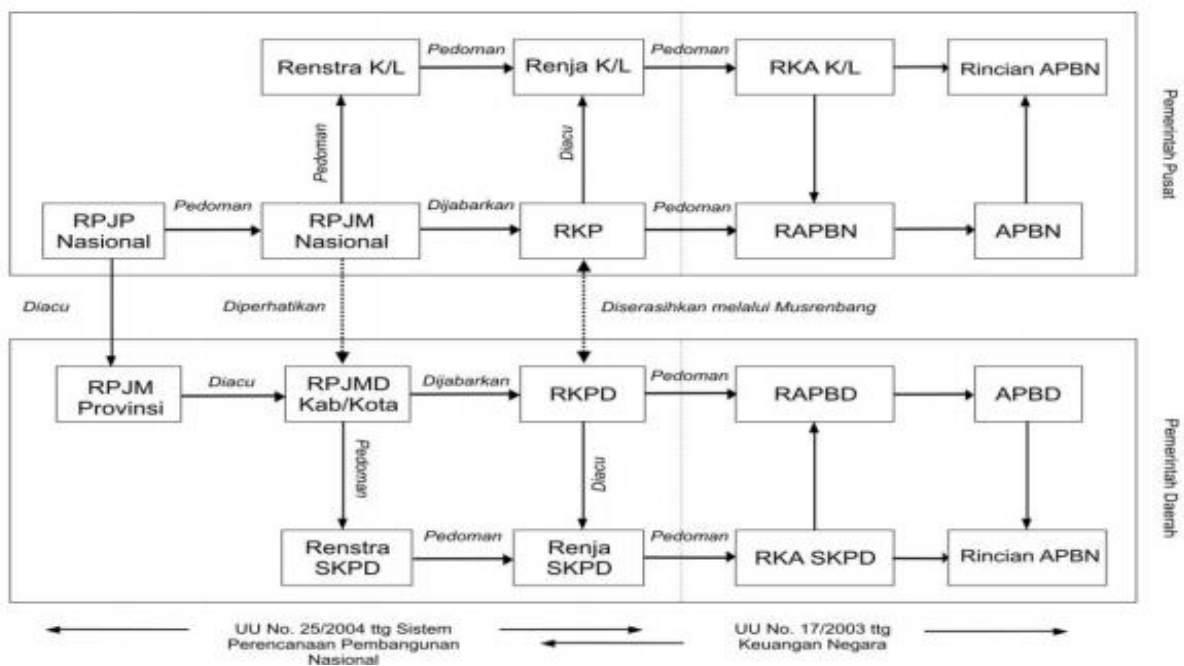
RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang berarti bahwa RKPD Kabupaten mempunyai relevansi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, terutama pada tema pembangunan jangka menengah tahun kelima. Sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, arah kebijakan pada tahun 2020 diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 daerah yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan

kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan infrastruktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2020, dan RTRW Kabupaten Rembang. Dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada Tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Rembang;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.7 Sistematisasi Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan sistematisasi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisigambarandumkondisidaerahdanhasilvaluasi RKPD tahun 2018 sertapermasalahanpembangunandaerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

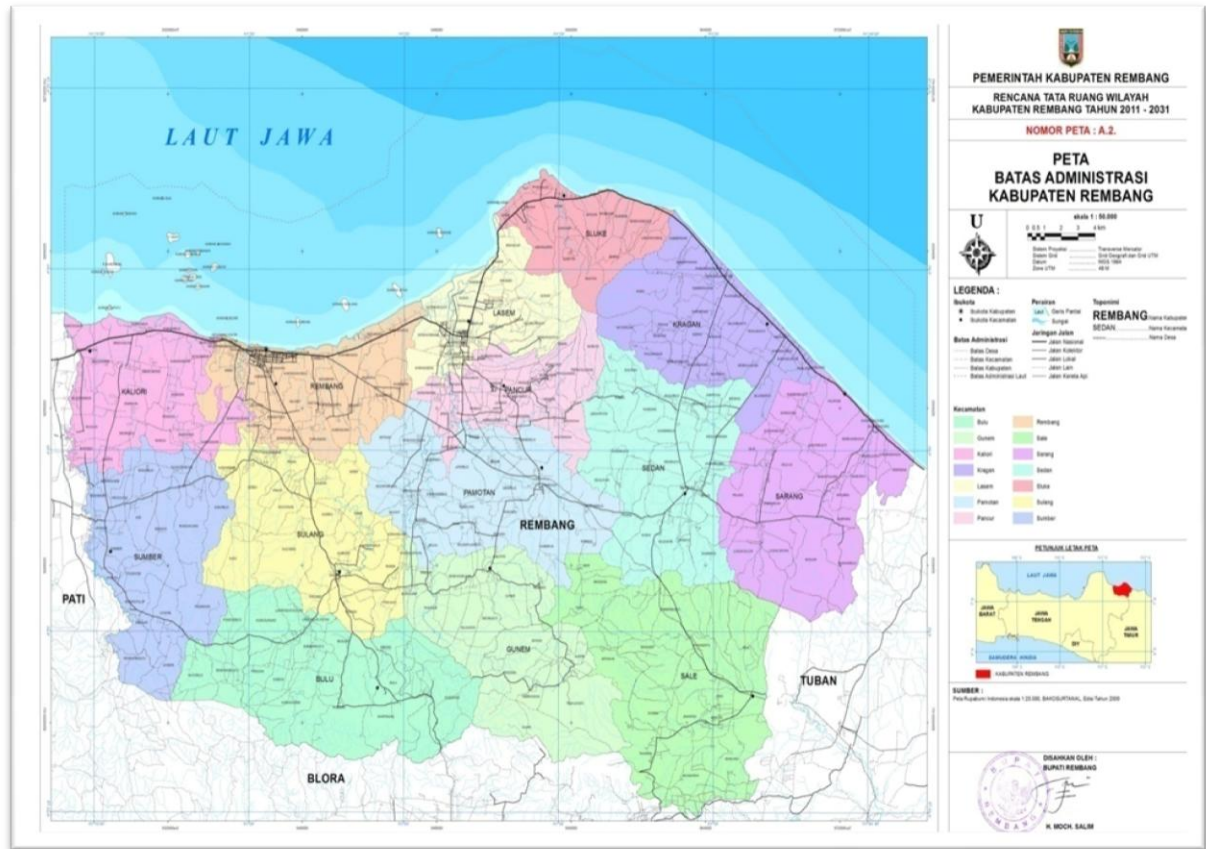
Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 ha terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1	Sumber	18	7.673	7,57
2	Bulu	16	10.240	10,10
3	Gunem	16	8.020	7,91
4	Sale	15	10.715	10,57
5	Sarang	23	9.133	9,01
6	Sedan	21	7.964	7,85
7	Pamotan	23	8.156	8,04
8	Sulang	21	8.454	8,34
9	Kaliori	23	6.150	6,06
10	Rembang	34	5.881	5,80
11	Pancur	23	4.593	4,53
12	Kragan	27	6.166	6,08
13	Sluke	14	3.759	3,71
14	Lasem	20	4.504	4,44
Jumlah		294	101.408	100

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019

Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.

Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peernakan. Memperhatikan

potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah “Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan *agroforestry* yang didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan”.

a. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8 - 100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian lebih dari 500meter dpl sebesar 3,07%.

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	0-7 m	8-100 m	101-500 m	> 500 m	Jumlah
1	Sumber	-	7.443	230	-	7.673
2	Bulu	-	3.768	6.472	-	10.240
3	Gunem	-	2.813	5.207	-	8.020
4	Sale	-	727	9.987	-	10.714
5	Sarang	4.040	5.093	-	-	9.133
6	Sedan	-	4.197	1.112	2.655	7.964
7	Pamotan	-	7.448	708	-	8.156
8	Sulang	-	8.263	191	-	8.454
9	Kaliori	2.592	3.558	-	-	6.150
10	Rembang	2.225	3.656	-	-	5.881
11	Pancur	-	3.274	1.010	310	4.594
12	Kragan	1.657	3.224	1.260	25	6.166
13	Sluke	206	2.144	1.324	85	3.759
14	Lasem	1.253	2.027	1.187	37	4.504
Jumlah		11.973	57.635	28.688	3.112	101.408

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

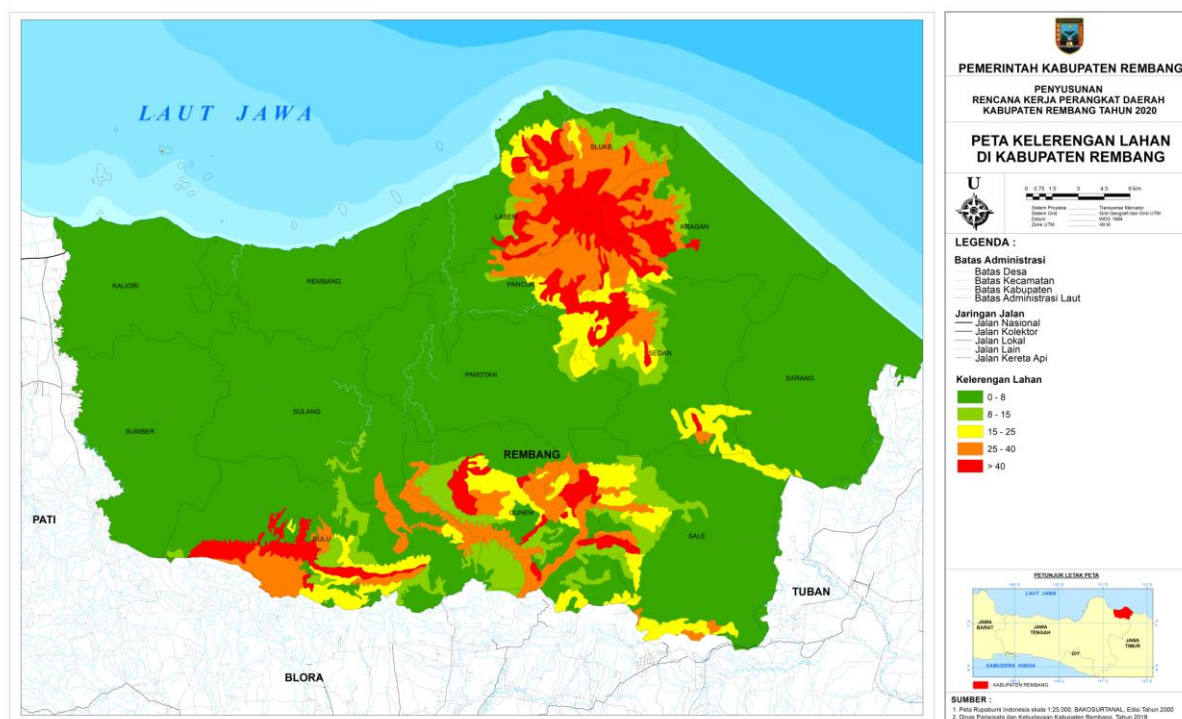
Berdasarkan tingkat kemiringan, Kabupaten Rembang mempunyai kemiringan yang beragam yaitu 0-2%, 3-15%, 16-40% dan > 40%. Sebagian besar kemiringan tanah di Kabupaten Rembang adalah datar (0-2%) seluas 46.367 Ha. Kemiringan tanah datar (0-2%) terbanyak terdapat di Kecamatan Kaliori seluas 6.150 Ha, Kecamatan Rembang seluas 5.881 Ha, dan Kecamatan Sulang seluas 5.663 Ha. Kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan tanah beragam adalah Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem. Kecamatan Sale seluas 10.741 Ha, berada pada kemiringan (0-2%) sebesar 2.343 Ha, kemiringan (3-15%) sebesar 6.200 Ha, kemiringan 16-40% sebesar 1.946 Ha, dan kemiringan (> 40%) sebesar 225 Ha. Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Rembang hanya berada pada kemiringan datar (0-2%) masing-masing seluas 6.150 Ha dan 5.881 Ha. Berikut luas tanah menurut kemiringan tanah di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.3
Luas Tanah Menurut Kelerengan Lahandi Kabupaten Rembang (Ha)

No	Kecamatan	Tipe Kelerengan Lahan				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16-40 %	> 40 %	
1	Sumber	3.168	4.454	51	0	7.673
2	Bulu	1.054	4.906	3.998	282	10.240

No	Kecamatan	Tipe Kelerengan Lahan				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16-40 %	> 40 %	
3	Gunem	417	5.310	1.609	684	8.020
4	Sale	2.343	6.200	1.946	225	10.714
5	Sarang	4.940	3.819	374	0	9.133
6	Sedan	2.843	3.012	1.382	727	7.964
7	Pamotan	5.226	2.771	159	0	8.156
8	Sulang	5.663	2.730	61	0	8.454
9	Kaliori	6.150	0	0	0	6.150
10	Rembang	5.881	0	0	0	5.881
11	Pancur	1.692	730	1.369	803	4.594
12	Kragan	3.429	1.266	702	769	6.166
13	Sluke	1.014	683	1.445	617	3.759
14	Lasem	2.547	466	874	617	4.504
Jumlah		46.367	36.347	13.970	4.724	101.408

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Gambar 2.2
Peta Kelerengan Lahan Kabupaten Rembang

b. Jenis Tanah

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

1. *Alluvial*

Merupakan tanah yang beraneka ragam sifatnya dengan warna kelabu dan coklat hitam, tidak peka terhadap erosi, serta mempunyai produktivitas yang rendah sampai tinggi. Biasanya digunakan untuk lahan tanah pertanian dan permukiman. Tanah Aluvial berada di sebagian besar Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kragan dan sebagian kecil Kecamatan Sale.

2. *Regosol*

Merupakan tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, dan coklat kelabu. Tanah ini sangat peka terhadap erosi. Digunakan terutama untuk lahan perkebunan. Tanah regosol berada di sebagian kecil terdapat di Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan.

3. *Grumosol*

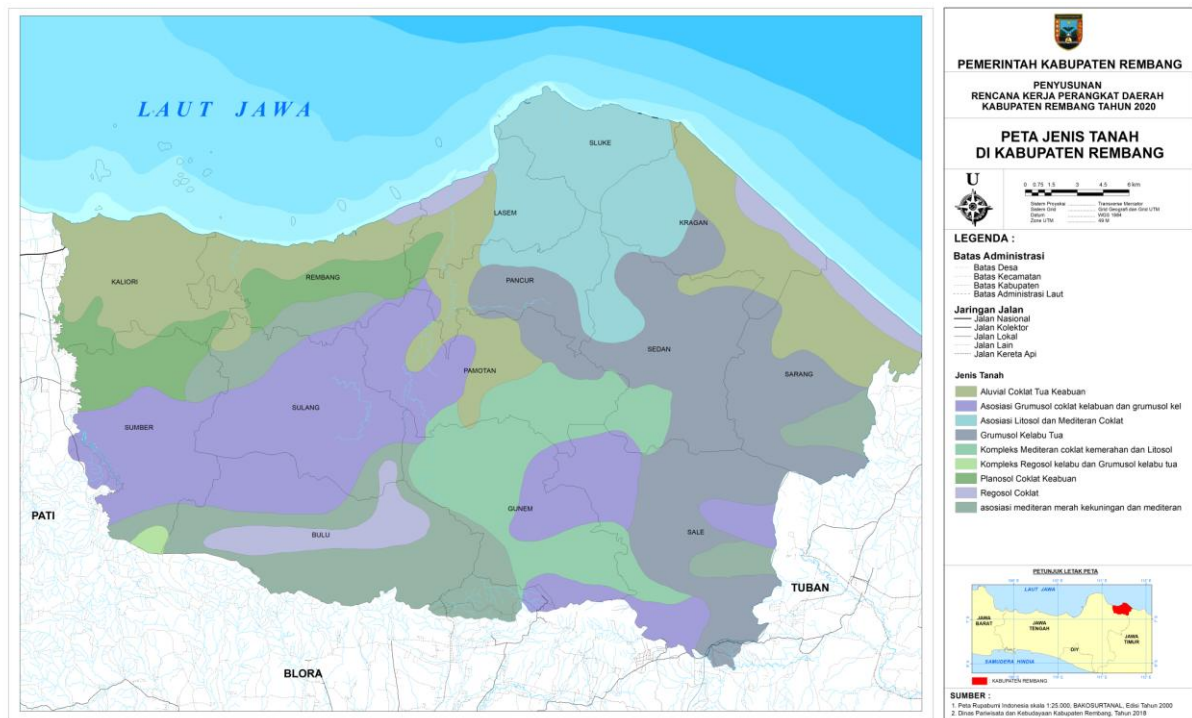
Merupakan tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang, serta peka terhadap erosi. Biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan. Tanah grumoso berada sebagian besar di Kecamatan Sale, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Sumber. Selain itu, terdapat sebagian kecil di Kecamatan Bulu, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan, dan Kecamatan Gunem.

4. *Mediteran Merah Kuning*

Merupakan tanah yang agak netral berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi dan agak peka terhadap erosi. Digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah, dan padang rumput. Tanah Mediteran merah kuning dan regosol berada sebagian besar di Kecamatan Sale, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan, dan Kecamatan Gunem. Kemudian terdapat juga jenis tanah mediteran merah kuning dan gromosol yang terdapat di Kecamatan Sluke dan jenis tanah mediteran merah kuning grumosol dan regosol di Kecamatan Sarang.

5. *Andosol*

Merupakan tanah yang bersifat subur dan cocok dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Tanah andosol merupakan hasil dari aktivitas vulkanis gunung berapi, tanah berwarna hitam, gembur, ringan, dan licin saat digenggam. Tanah andosol terdapat sebagian besar di Kecamatan Sumber, Kecamatan Rembang, dan Lasem.



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

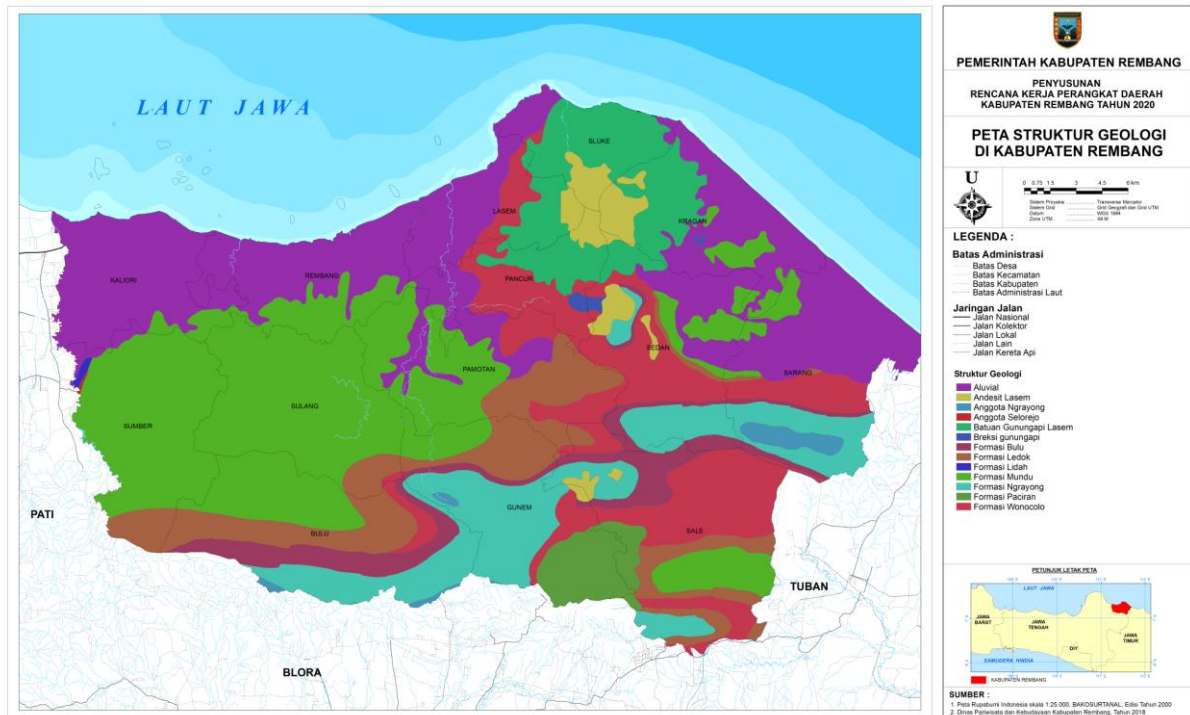
Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang

c. Geologi

Secara umum wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Wilayah yang berbatasan dengan laut Jawa bagian Utara dan pegunungan bagian timur, memiliki beberapa macam kondisi geologi. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Rembang (Kadar dan Sudijono, 1994), secara regional Kabupaten Rembang mempunyai urutan stratigrasi sebagai berikut:

1. Formasi Tawun (Tmt), terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu gamping, batu pasir, batu lanau, dan kalkarenit.
2. Formasi Ngrayong (Tmn), terdiri dari batu pasir, serpih, batu lempung, batu lanau, dan sisipan-sisipan batu gamping. Pada formasi ini kadang-kadang terdapat sisipan batubara dan lignit.
3. Formasi Bulu (Tmb), terdiri dari batu gamping berwarna putih keabu-abuan, kadang berlapis dan pasiran, sering membentuk pelat-pelat (platy), dengan sisipan napal dan batu pasir.
4. Formasi Wonocolo (Tmw), terdiri dari batu lempung gampingan dengan selingan tipis batu gamping, batu pasir galukonit di lapisan bagian bawah, dan napal pasiran bersisipkan kalkarenit.
5. Formasi Ledok (Tml), terdiri dari batu lempung abu-abu, napal, batu lanau gampingan dengan sisipan-sisipan tipis batu gamping, kadang terdapat batu pasir glaukonit.
6. Formasi Mundu (Tmpm), terdiri dari napal masif berwarna abu-abu keputihan, kaya akan foraminifera plankton.
7. Anggota Selorejo Formasi Lidah (QTps), terdiri dari selang-seling lapisan tipis batu gamping dengan kalkarenit yang kaya akan foraminifera plankton.

8. Formasi Lidah (QTpl) terdiri dari batu lempung abu-abu dan batu lempung hitam dengan sisipan batu pasir yang mengandung moluska.
9. Formasi Paciran (QTpp), terdiri dari batu gamping masif dengan permukaan berbentuk karena yang terjadi karena pengaruh pelapukan.



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Gambar 2.4.
Peta Struktur Geologi Kabupaten Rembang

Melihat komposisi struktur geologinya, Kabupaten Rembang memiliki endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian.

d. Hidrologi

Keadaan hidrologi pada Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan (*surface water*) dan air tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1) Air Permukaan

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah hujan. Untuk mengurangi run off air dari hulu ke hilir selain mengandalkan sungai, di Kabupaten Rembang juga banyak dibangun embung dan waduk. Embung yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Jatimudo dan Embung Grawan. Di samping itu ada embung yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu Embung Panohan. Disamping kelima embung besar tersebut banyak dibangun embung-embung di desa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani.

Sementara itu, Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Jratun Seluna. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah

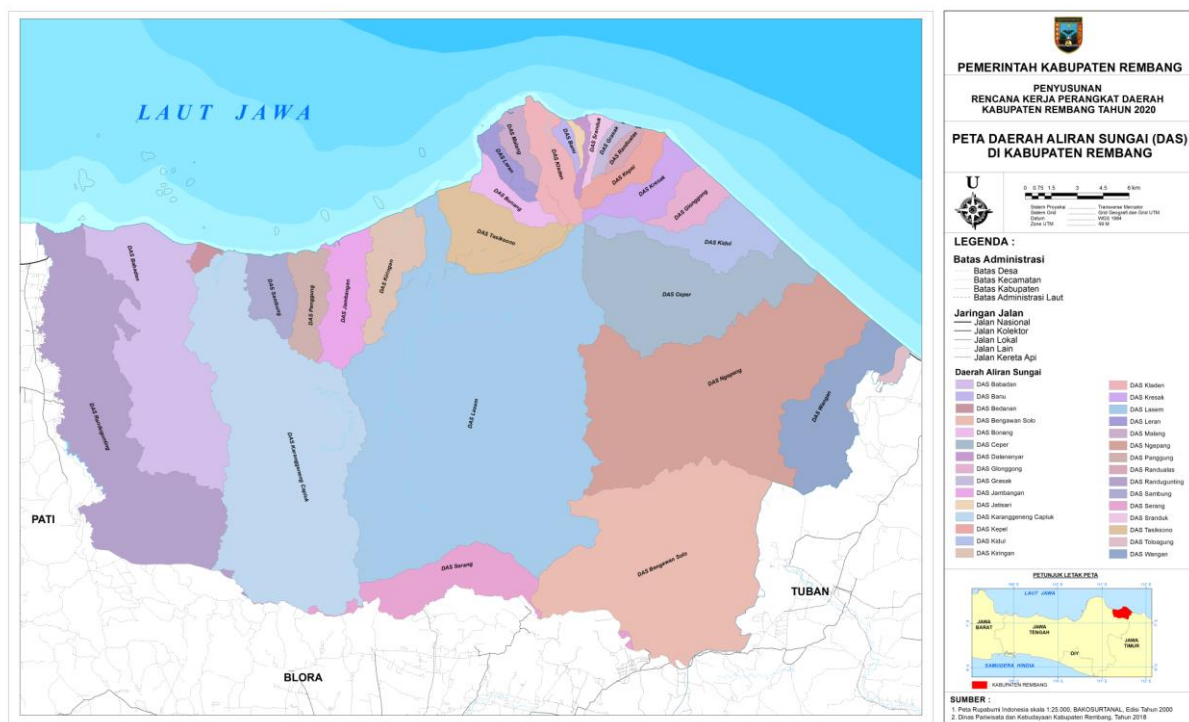
di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jratun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS Jratun Seluna, meliputi : sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Berdasarkan data dari Balai PSDA Seluna, seluruhnya terdapat 26 sungai yang termasuk dalam WS Jratun Seluna selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini. Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersebut disebabkan pendayagunaan sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sungai terbentur pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang

No	Nama DAS	Luas DAS (km ²)	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Nama Wilayah Sungai	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
1	DAS Wangon	52,10	S.Wangon	18,64	Jratunseluna	Ds.Bajingjowo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sarang) Rembang
2	DAS Belitung/Ngepang	100,30	S.Ngepang	25,83	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Sedan,Sarang) Rembang
3	DAS Kesambi	60,94	S.Ceper	24,53	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sarang, Kab.Rembang	G.Lasem
4	DAS Kidul	29,30	S.Kidul	11,66	Jratunseluna	Ds.Tegalmulyo, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
5	DAS Kresak	11,65	S.Kresak	8,13	Jratunseluna	Ds.Woro, Kec.Kragan, Kab.Rembang	G.Lasem
6	DAS Kepel	8,39	S.Kepel	7,54	Jratunseluna	Ds.Labuhan Kidul, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
7	DAS Randualas	3,18	S.Randualas	3,10	Jratunseluna	Ds.Sendangmulyo, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
8	DAS Grasak	2,92	S.Grasak	3,38	Jratunseluna	Ds.Blimbing, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
9	DAS Sanduk	2,75	S.Sanduk	4,58	Jratunseluna	Ds.Mangar, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
10	DAS Dalananyar	1,95	S.Dalananyar	5,28	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	Rakitan Sluke Rembang
11	DAS Jatisari	1,14	S.Jatisari	2,85	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
12	DAS Banu	1,60	S.Banu	3,38	Jratunseluna	Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
13	DAS Kladen	14,19	S.Klaten	6,71	Jratunseluna	Ds.Sluke, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
14	DAS Bonang / Nyamplung	5,85	S.Malang	5,43	Jratunseluna	Ds.Trahan, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
15	DAS Dukoh	6,16	S.Leran	5,90	Jratunseluna	Ds.Leran, Kec.Sluke, Kab.Rembang	G.Lasem
16	DAS Bonang	6,17	S.Bonang	7,22	Jratunseluna	Ds.Bonang, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
17	DAS Keris	23,80	S.Tasiksono	16,47	Jratunseluna	Ds.Tasiksono, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem
18	DAS Lasem	229,85	S.Lasem	39,09	Jratunseluna	Ds.Gedungmulyo, Kec.Lasem, Kab.Rembang	G.Lasem & Peg.Kapur Utara (Bulu,Gunem. Sale) Rembang
19	DAS Kiringan	15,94	S.Kiringan	7,76	Jratunseluna	Ds.Kasreman, Kec.Lasem, Kab.Rembang	Ketangi, Pamotan, Rembang

No	Nama DAS	Luas	Nama Sungai	Panjang	Nama Wilayah	Lokasi Muara	Lokasi Hulu
20	DAS Jambangan	17,30	S.Jambangan	7,49	Jratunseluna	Ds.Tritunggal, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
21	DAS Panggang	12,49	S.Panggang	7,90	Jratunseluna	Ds.Tireman, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Kerep, Sulang, Rembang
22	DAS Sambung	10,61	S.Sambung	5,42	Jratunseluna	Ds.Kabongan Lor, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Turusgede, Rembang
23	DAS Karanggeng	134,14	S.Karanggeneng	48,17	Jratunseluna	Ds.Tanjungsari, Kec.Rembang, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu) Kab.Rembang
24	DAS Babadan	57,04	S.Pujon	17,87	Jratunseluna	Ds.Bogoharjo, Kec.Kaliiori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Bulu)
25	DAS Anyar	37,20	S.Pang	11,50	Jratunseluna	Ds.Tasikharjo, Kec.Kaliiori, Kab.Rembang	Bogorejo, Sumber, Rembang
26	DAS Randugunting	136,67	S.Randugunting	47,37	Jratunseluna	Ds.Tunggulsari, Kec.Kaliiori, Kab.Rembang	Peg.Kapur Utara (Japah) Kab.Blora

Sumber : Balai PSDA Seluna, 2019



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

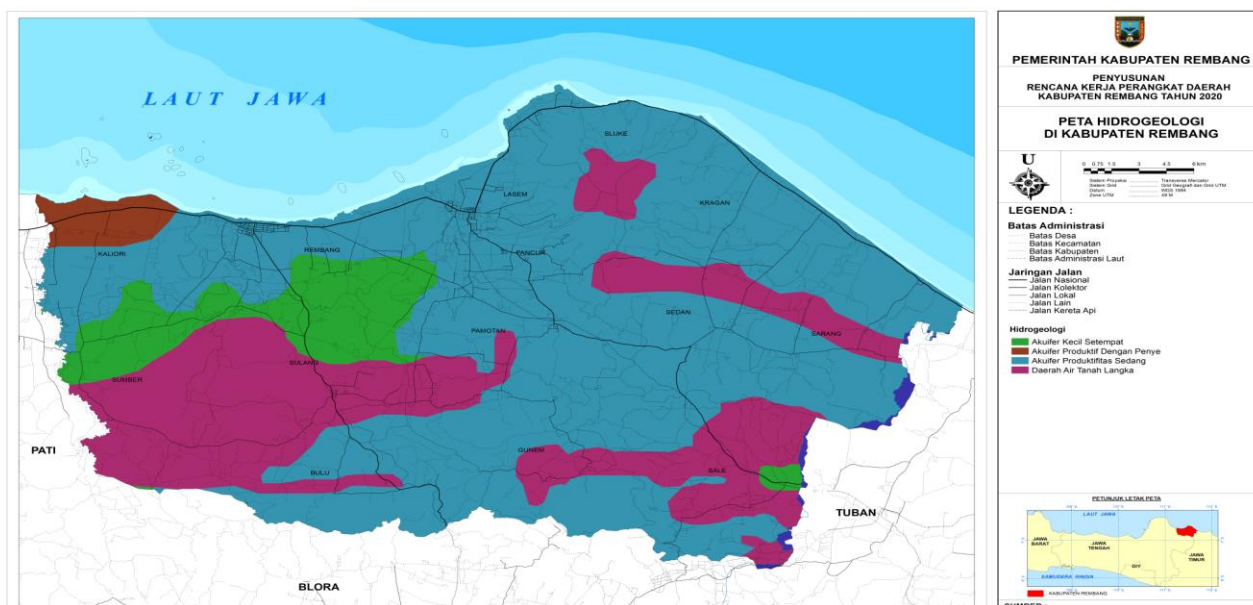
Gambar 2.5.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rembang

2) Air Bawah Tanah

Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisinya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka.

Tabel 2.5
Hidrogeologi Kabupaten Rembang

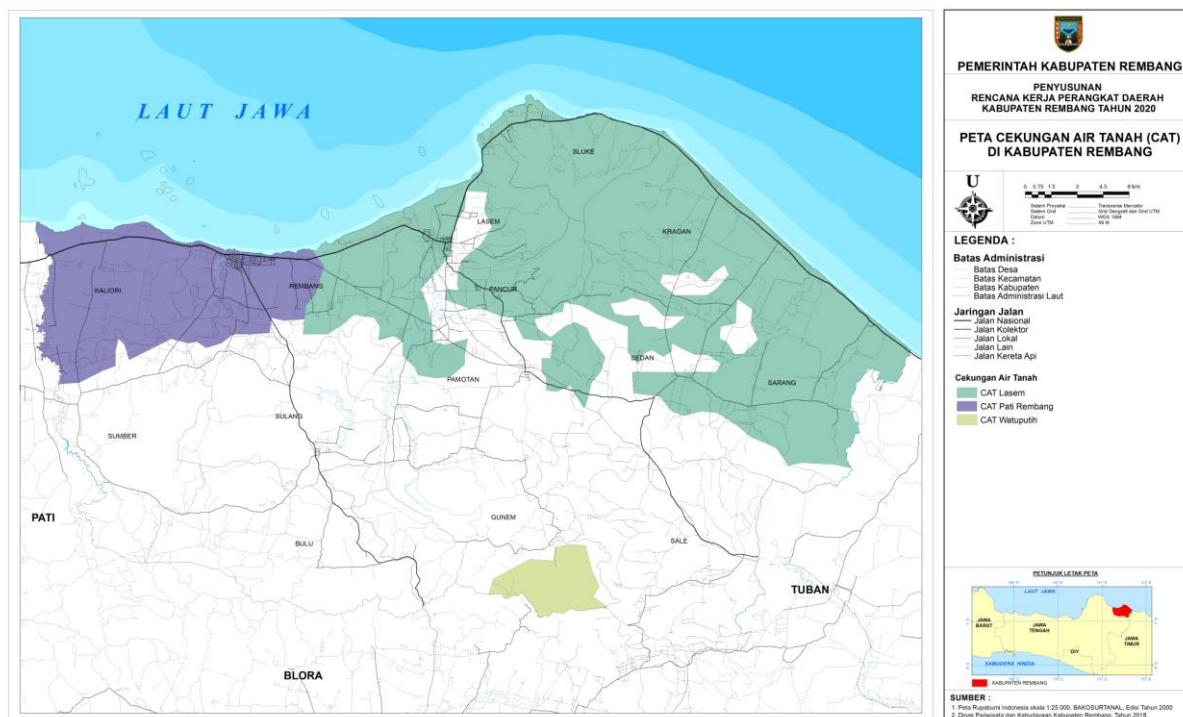
No	Jenis Akuifer	Lokasi
1	Akuifer dangkal dengan produktivitas sedang	Sebagian besar di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sedan
2	Akuifer dengan produktivitas tinggi	Sebagian kecil di Kecamatan Sale
3	Akuifer dengan produktivitas sedang	Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan
5	Akuifer produktif terdapat setempat	Sebagian besar di Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem
6	Akuifer dengan produktivitas kecil	Sebagian besar di Kecamatan Sumber, Sulang, Rembang. Sebagian kecil di Kecamatan Kaliori, Pamotan, Gunem, Bulu, Sale, Pamotan, Pancur, Sedan, Kragan, Sarang
7	Daerah air tanah langka	Sebagian kecil di Kecamatan Sarang



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Gambar 2.6.
Peta Hidrogeologi Kabupaten Rembang

Dari kondisi hidrogeologi tersebut, Kabupaten Rembang mempunyai tiga Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Lasem, CAT Pati-Rembang dan CAT Watuputih. Cekungan air tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah tersebut mendukung cadangan air baku di Kabupaten Rembang namun penggunaan air tanah harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kelestarian akuifer air tanah. Lokasi cekungan air tanah di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Gambar 2.7.
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Rembang

Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari 90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup bervariasi yaitu berada pada 30 – 60 cm dan 60 – 90 cm. Potensi sumber air tanah di Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air. Beberapa sumber air tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Debit (lt/detik)	Penggunaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
1	Brubul	Pamotan	Pamotan	5	Irigasi	Berfungsi
2	Mudal	Pamotan	Pamotan	80	Air minum dan irigasi	50 lt/dtk PDAM & 20 lt/dtk irigasi
3	Klongko	Bangunrejo	Pamotan	8	Irigasi	Berfungsi
4	Pragen	Pragen	Pamotan	12	Irigasi	Kering saat kemarau
5	Dowan	Dowan	Gunem	12	Irigasi	Kering saat kemarau
6	Nglondro	Suntri	Gunem	11	Irigasi	Berfungsi
7	Kajar	Kajar	Gunem	6	Air minum	Berfungsi
8	Suruhan	Trembers	Gunem	8	Irigasi	Berfungsi
9	Taban	Sidomulyo	Gunem	6	Irigasi	Kering saat kemarau
10	Pasucen	Pasucen	Gunem	7	Irigasi	Kering saat kemarau
11	Soco	Sendang Mulyo	Gunem	7	Air minum	Berfungsi
12	Pacing	Pacing	Sedan	6	Irigasi	Berfungsi
13	Kedunglingi	Lemah Putih	Sedan	10	Air minum	Berfungsi
14	Bendo	Bendo	Sluke	15	Air minum	Kering saat kemarau
15	Bulan	Sanetan	Sluke	7	Irigasi	Kering saat kemarau
16	Gebang	Labuhan	Sluke	25	Irigasi	Kering saat kemarau

No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Debit (lt/detik)	Penggunaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
17	Mrican	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
1.	Macan	Bendo	Sluke	6	Irigasi	Kering saat kemarau
2.	Dur Sumber	Bendo	Sluke	7	Air minum	Kering saat kemarau
3.	Semen	Gading	Sale	557	Air minum & irigasi	80 lt/dtk PDAM & 477 lt/dtk irigasi
4.	Brubulan	Tahunan	Sale	150	Irigasi	Berfungsi
5.	Kemloko Kerep	Tengger	Sale	20	Irigasi	Berfungsi
6.	Watu Lawang	Woro	Kragan	5	Irigasi	Kering saat kemarau
7.	Rambut Bntung	Tawangrejo	Sarang	5	Irigasi	Berfungsi
8.	Kajar	Kajar	Salem	9	Irigasi	Berfungsi
9.	Kajar	Pasedan	Bulu	30	Air minum	Berfungsi
10.	Dong Bulu	Pasedan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
11.	Kalisodo	Pasedan	Bulu	9	Irigasi	Kering saat kemarau
12.	Gondang	Pasedan	Bulu	15	Irigasi	Kering saat kemarau
13.	Taban	Bulu	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
14.	Gayam	Bulu	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
15.	Mudal	Bulu	Bulu	20	Irigasi	Kering saat kemarau
16.	Ngluncan	Bulu	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
17.	Kebon	Mantingan	Bulu	10	Air minum	Berfungsi
18.	Dawe	Mantingan	Bulu	6	Irigasi	Kering saat kemarau
19.	Dokoh	Mantingan	Bulu	5	Irigasi	Kering saat kemarau
20.	Milikerep	Kadiwono	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
21.	Tlogo	Karangasem	Bulu	15	Irigasi	Berfungsi
22.	Gupit	Cabean	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
23.	Senok	Mlatirejo	Bulu	12	Irigasi	Kering saat kemarau
24.	Candra	Pinggan	Bulu	8	Irigasi	Kering saat kemarau
25.	Cadang	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
26.	Pinggan	Pinggan	Bulu	10	Irigasi	Kering saat kemarau
27.	Belik Kembar	Sidowayah	Pancur	5	Air minum	Berfungsi
28.	Ngroto	Ngroto	Pancur	7	Air minum	Berfungsi
29.	Druju	Joho Gunung	Pancur	15	Irigasi	Berfungsi
30.	Soco	Kalitengah	Pancur	10	Irigasi	Kering saat kemarau
31.	Kedung Ruah	Warugunung	Pancur	7	Irigasi	Kering saat kemarau
32.	Sumber Agung	Sumberagung	Pancur	5	-	Belum dimanfaatkan

Sumber : DPU TARU, 2019

e. Klimatologi

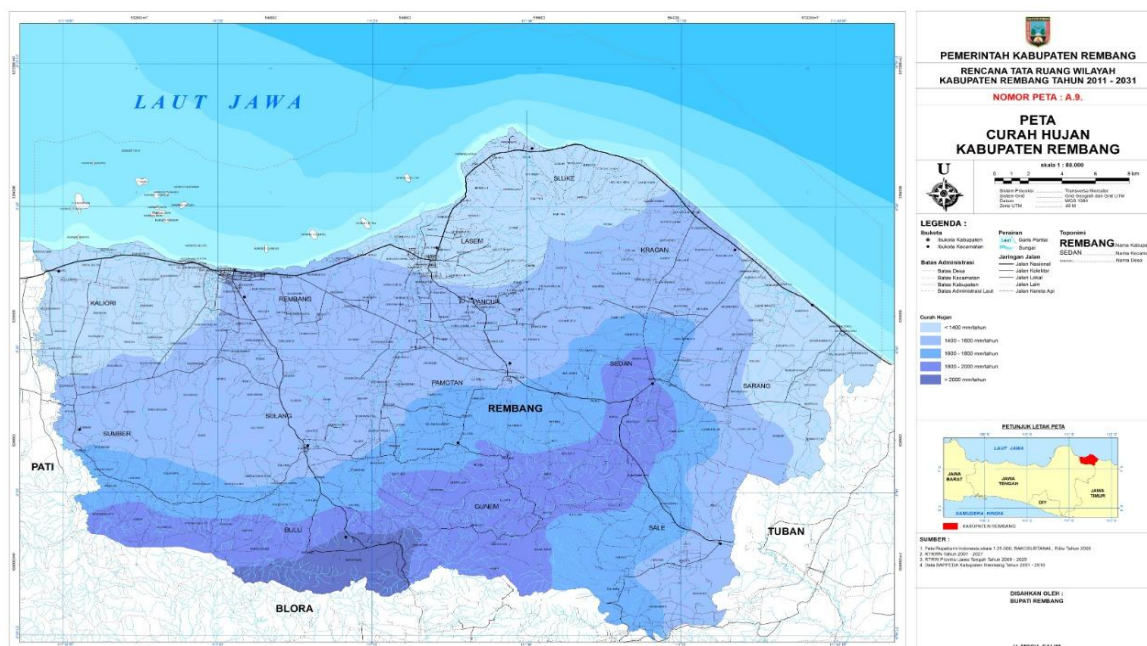
Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 34°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-34°C. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 550,57 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Februari Tahun 2018 yaitu sebanyak 115,6 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus 0.19 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah, selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7
Curah Hujan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Data Curah Hujan (mm/hr)											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sumber	5.55	10.86	7.03	2.37	2.77	0	0	0	0	0	1.9	3.32
2	Bulu	5.65	8.32	9.65	3.43	1.52	0.13	0.13	0.19	0.6	0.13	5.17	11.84
3	Gunem	5.81	9.61	7.52	2.47	1.65	0.13	0	0	0.1	0.39	3.4	8.61
4	Sale	4.48	11.68	8.45	3.33	2.42	0.6	0	0	0.63	0.29	6.53	7.94
5	Sarang	3.06	7	4.68	1	0.81	0.97	0	0	0	0	2.53	10.94
6	Sedan	6.87	6.5	4.58	2.4	0.81	0.97	0	0	0.47	0	5.03	8.39

No	Kecamatan	Data Curah Hujan (mm/hr)											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
7	Pamotan	9.16	11.46	5.97	2.57	1.26	1.57	0	0	0.53	0.48	4.83	8.84
8	Sulang	7.1	10.14	8.1	4.63	3.65	0.3	0	0	0.27	0.06	6.5	6.71
9	Kaliori	9.1	5.32	2.77	5.07	2.26	0	0	0	2.77	0	3.3	3.61
10	Rembang	6.74	8.07	6.1	1.6	0.77	0.4	0	0	0	0	6.97	4.71
11	Pancur	5.81	5.64	4.45	3.03	0.84	1.07	0	0	0	0.97	4.03	8.71
12	Kragan	4.16	5.39	4.74	2.13	1.13	0.37	0.32	0	1.17	0.52	4.47	5.61
13	Sluke	2.71	7.18	11.94	1.77	1.32	0.4	0	0	0	0	5.4	10.61
14	Lasem	7.74	8.43	5.77	4.47	2	1.07	0	0	0.27	1.45	7.53	8.65
Jumlah		83.94	115.60	91.75	40.27	23.21	7.98	0.45	0.19	6.81	4.29	67.59	108.49

Sumber : BPS, 2019



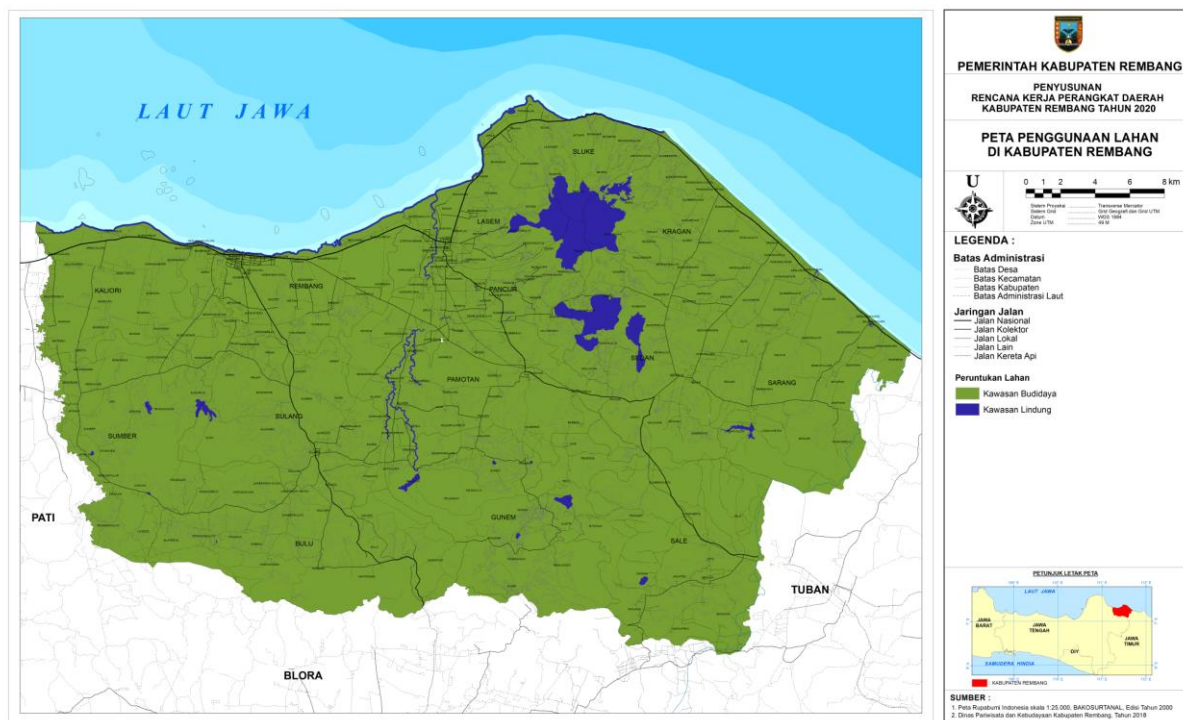
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang

f. Penggunaan Lahan

Mengingat karakteristik wilayah di Kabupaten Rembang yang sebagian besar datar dengan kelerengan antara 0-2%, penggunaan lahan di Kabupaten Rembang di dominasi kawasan budidaya seluas 96,73% dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan 3,27% kawasan lindung. Kawasan Lindung di Kabupaten Rembang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam. Kawasan lindung setempat terbagi menjadi tiga yaitu kawasan sekitar danau, kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai. Sedangkan kawasan suaka alam berupa kawasan cagar alam gunung buthak di Kecamatan Gunem. Kawasan lindung terluas berupa kawasan hutan lindung seluas 72,14%.

Sementara itu kawasan budidaya didominasi kawasan pertanian dengan luasan mencapai 60,36 % dari luas seluruh kawasan budidaya. Peruntukan budidaya lainnya berupa kawasan peruntukan permukiman, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan. Selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2.9

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rembang

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Secara umum Kabupaten Rembang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu wilayah pesisir di sebelah Utara, wilayah pegunungan di sebelah Selatan dan dataran rendah di bagian tengah. Sehingga penggunaan lahan di Kabupaten Rembang juga diarahkan sesuai dengan karakteristik wilayahnya dimana di bagian utara difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan, permukiman, industri dan sebagian kecil pertanian. Di bagian tengah dikembangkan kawasan pertanian, industri berbasis pertanian, permukiman dan perkebunan. Sedangkan di bagian selatan berupa kawasan hutan, pertanian, kawasan pertambangan dan industri berbasis pertanian dan pertambangan.

Sejalan dengan pengembangan wilayah tersebut, tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2011-2031 ditujukan untuk mewujudkan kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian Jawa Tengah bagian timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diutamakan dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kawasan budidaya di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan

peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Kawasan Budidaya mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan kawasan budidaya tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

(a). Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.

(b). Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Rembang terdapat kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.

(c). Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Untuk menjamin kedaulatan pangan maka seluas kurang lebih 37.339 Ha ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk meningkatkan kemandirian sektor pertanian ditetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan agropolitan.

(d). Kawasan peruntukan perikanan

Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan di Kecamatan Pamotan.

(e). Kawasan peruntukan pertambangan

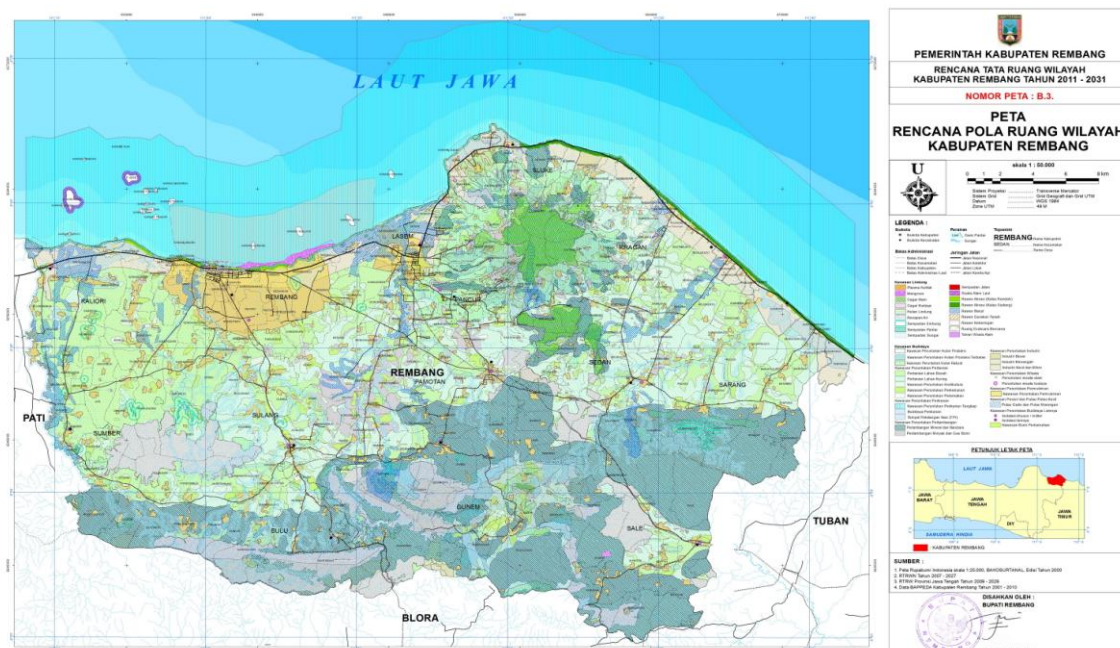
Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball clay, dolomite, gypsum, kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang.

(f). Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan Kecamatan Gunem. Peruntukan industri menengah meliputi industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir, kawasan peruntukan agroindustri dan kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang dengan potensi industri mebel, industri batik, industri kuningan, industri bordir, industri gula tumbu, industri genteng dan batu bata, industri garam, olahan perikanan, peternakan, industri mangga, industri galangan kapal dan industri kecil kawis.

(g). Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang.



Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2.10
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, antara lain diwujudkan melalui program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menetapkan desa-desa di wilayah pesisir yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem menjadi daerah Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) sebagai implementasi dari pasal 83 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bagian kedua. Modal utama yang dimiliki oleh keenam desa tersebut diatas adalah kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi *mangrove* dan potensi lainnya.

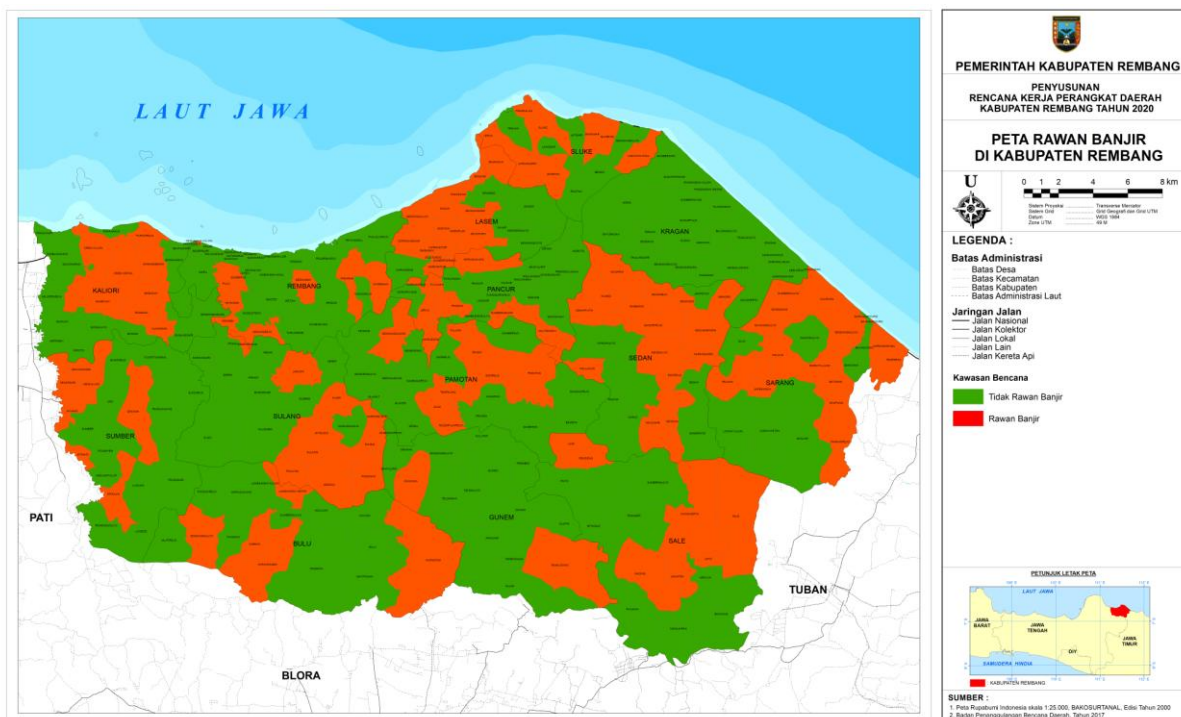
Pengembangan kawasan tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam yang dimiliki masyarakat sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor / gerakan tanah, kawasan rawan gelombang tinggi / abrasi dan kawasan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan. Berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang tersebar di seluruh kecamatan yang terjadi secara periodic ketika musim penghujan. Pada tahun 2018, banjir terjadi di Kecamatan Kaliori, Rembang, Kragan, Pamotan dan Lasem. Selengkapanya kawasan rawan banjir di Kabupaten Rembang sebagaimana peta berikut.

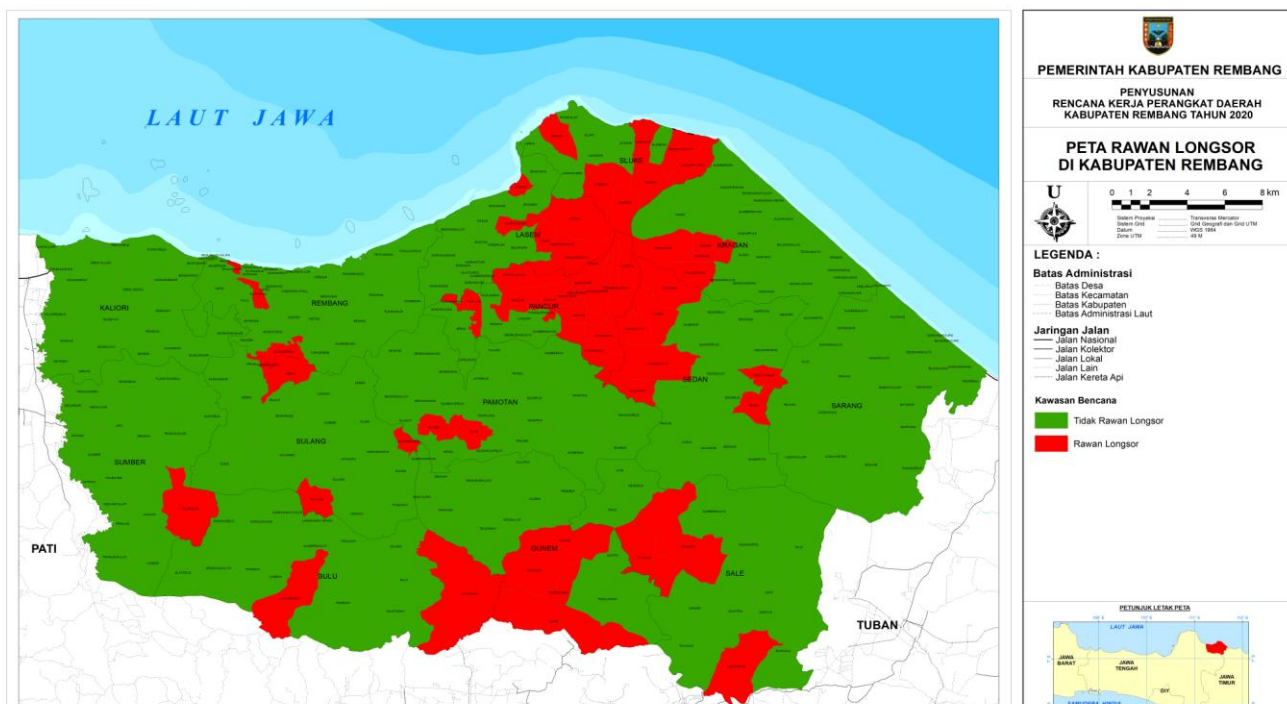


Sumber: BPBD, 2017

Gambar 2.11
Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Rembang

b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran rendah di sepanjang pantai utara dengan kelerengan berkisar 00–40. Selain itu morfologi bergelombang lemah sampai kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 100–600. Bagian timur laut daerah Rembang terdapat pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 150–600 yang termasuk dalam wilayah Gunung Lasem. Dari morfologi tersebut, lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan. Selengkapnya daerah rawan bencana longsor sebagaimana peta di bawah ini.

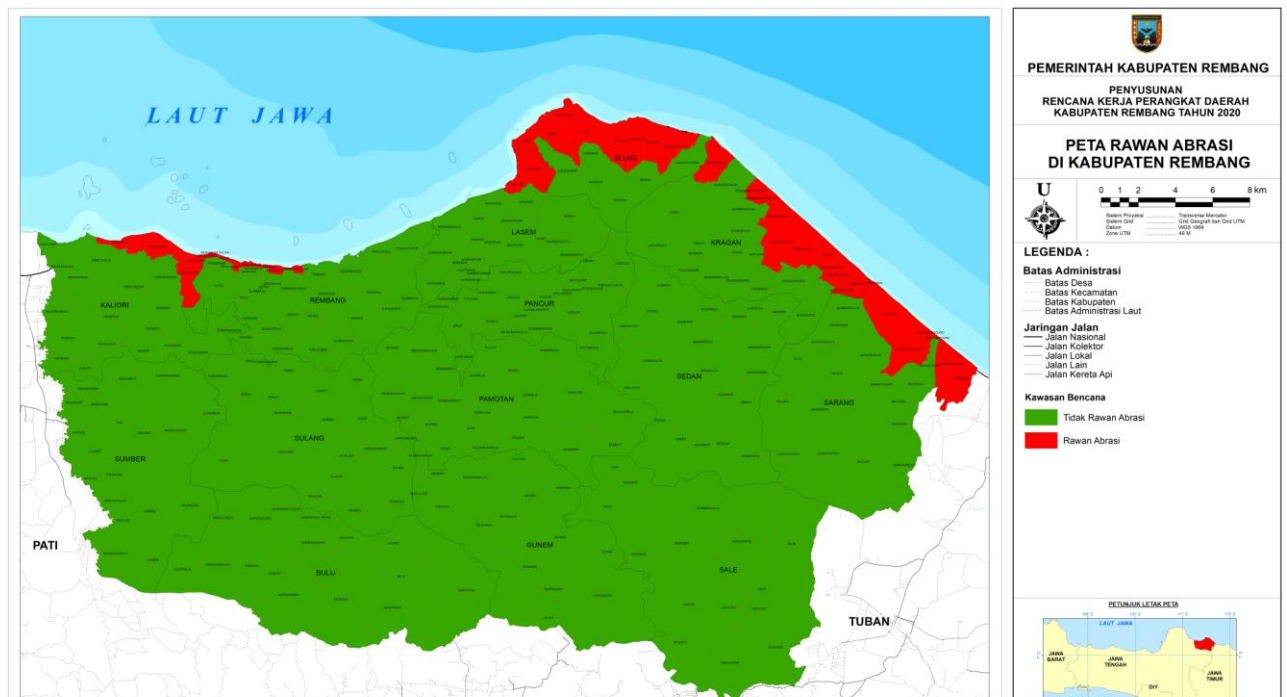


Sumber: BPBD, 2017

Gambar 2.12
Peta Daerah Rawan Longsor Kabupaten Rembang

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Wilayah terdampak abrasi terparah ada di seluruh pesisir Kecamatan Sarang dan pesisir Kecamatan Kragan mulai dari Desa Tegalmulyo hingga Desa Karangharjo. Abrasi ini termasuk abrasi berat, abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliore, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir barat Kabupaten Rembang tergolong dalam abrasi ringan. Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru beberapa titik yang mendapatkan penanganan yaitu di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Kragan.



Sumber: BPBD, 2018

Gambar 2.13
Peta Rawan Abrasi Kabupaten Rembang

2.1.1.4. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Rembang menurut data BPS pada tahun 2018 sebanyak 633.429 jiwa (angka sementara). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebanyak 628.901 jiwa. Penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,72 %. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Pamotan diikuti Kecamatan Sluke masing-masing sebesar 3,40 % dan 2,95 %.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2010	2016	2017	2018*	2016-2018
1	Sumber	33.695	34.917	35.014	36.338	2,08
2	Bulu	25.731	26.650	26.723	27.848	2,30
3	Gunem	22.833	23.948	24.041	23.876	-0,15
4	Sale	35.902	37.695	37.844	39.127	1,94
5	Sarang	60.370	64.407	64.765	60.658	-2,82
6	Sedan	51.362	54.122	54.359	53.556	-0,52
7	Pamotan	44.105	45.775	45.908	48.788	3,40
8	Sulang	36.914	38.800	38.958	38.737	-0,08

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2010	2016	2017	2018*	2016-2018
9	Kaliori	38.776	40.797	40.969	41.726	1,15
10	Rembang	84.381	90.274	90.800	89.159	-0,61
11	Pancur	27.471	29.098	29.240	30.134	1,81
12	Kragan	58.523	62.380	62.721	63.880	1,22
13	Sluke	26.721	27.953	28.057	29.558	2,95
14	Lasem	47.123	49.320	49.502	50.044	0,74
Jumlah		593.907	626.136	628.901	633.429	0,59

Sumber : Dindukcapil, 2019

Sementara itu besarnya sex ratio tahun 2018 adalah 83,76%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

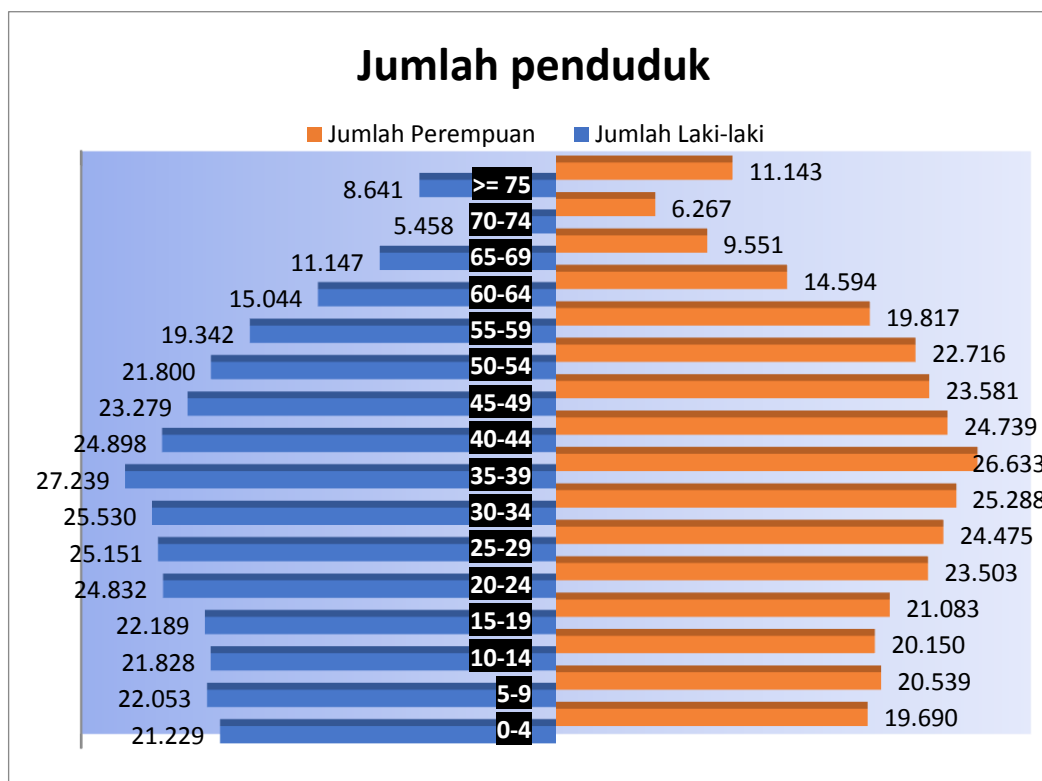
No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Sumber	17.471	48,08	18.867	51,92	36.338	92,60
2	Bulu	13.368	48,00	14.480	52,00	27.848	92,32
3	Gunem	10.646	44,59	13.230	55,41	23.876	80,47
4	Sale	18.488	47,25	20.639	52,75	39.127	89,58
5	Sarang	23.580	38,87	37.078	61,13	60.658	63,60
6	Sedan	23.764	44,37	29.792	55,63	53.556	79,76
7	Pamotan	23.590	48,35	25.198	51,65	48.788	93,62
8	Sulang	17.548	45,30	21.189	54,70	38.737	82,81
9	Kaliori	19.493	46,72	22.233	53,28	41.726	87,67
10	Rembang	40.210	45,10	48.949	54,90	89.159	82,15
11	Pancur	13.990	46,43	16.144	53,57	30.134	86,66
12	Kragan	29.386	46,00	34.494	54,00	63.880	85,19
13	Sluke	14.282	48,32	15.276	51,68	29.558	93,50
14	Lasem	22.900	45,76	27.144	54,24	50.044	84,37
Jumlah		288.717	45,58	344.713	54,42	633.429	83,76

Sumber : Rembang Dalam Angka, 2019

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada tahun 2018 di Kabupaten Rembang 83.76 %.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang tahun 2018 dapat dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun). Jumlah penduduk Kabupaten Rembang kelompok umur produktif sejumlah 455.733 jiwa dan penduduk tidak produktif sejumlah 177.696 jiwa. Kelompok umur terbanyak terdapat pada umur 35-39 tahun sebanyak 53.872 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat Gambar dibawah ini.



Sumber : Dindukcapil, 2019

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Berdasarkan golongan penduduk, maka dapat dihitung besarnya angka beban tanggungan, yaitu perbandingan jumlah penduduk yang berumur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun (usia tidak produktif) dengan penduduk yang berumur 15-64 tahun (usia produktif). Angka beban tanggungan di Kabupaten Rembang ada tahun 2018 sebesar 42,67 % yang berarti dari 100 penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebesar 43 jiwa.

Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 42,67 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 4,56 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2018 mencapai 625 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.516 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 272 jiwa/km². Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah km ²	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)*
1	Sumber	7.673	36.338	474
2	Bulu	10.240	27.848	272
3	Gunem	8.020	23.876	298
4	Sale	10.714	39.127	365
5	Sarang	9.133	60.658	664
6	Sedan	7.964	53.556	672
7	Pamotan	8.156	48.788	598
8	Sulang	8.454	38.737	458
9	Kaliori	6.150	41.726	678
10	Rembang	5.881	89.159	1516
11	Pancur	4.594	30.134	656
12	Kragan	6.166	63.880	1036
13	Sluke	3.759	29.558	786
14	Lasem	4.504	50.044	1111
JUMLAH		101.408	633.429	625

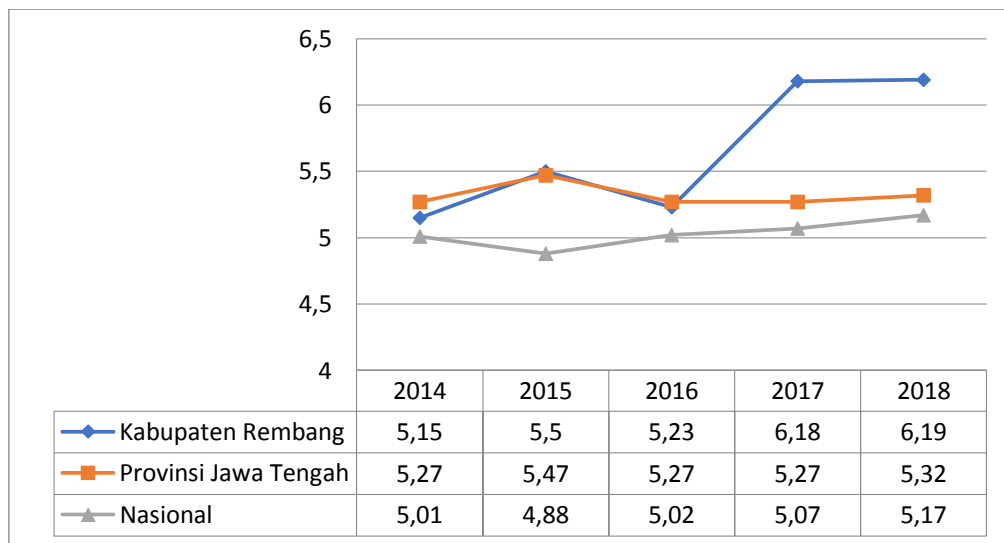
Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019 diolah

Berdasarkan Tabel 2.10 diketahui bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang yakni sebesar 1516 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bulu yakni sebesar 272 jiwa.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat ditunjukkan melalui sejumlah indikator makro meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, peningkatan PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk miskin serta tingkat pengeluaran perkapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2019

Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama tahun 2014 - 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 (%)

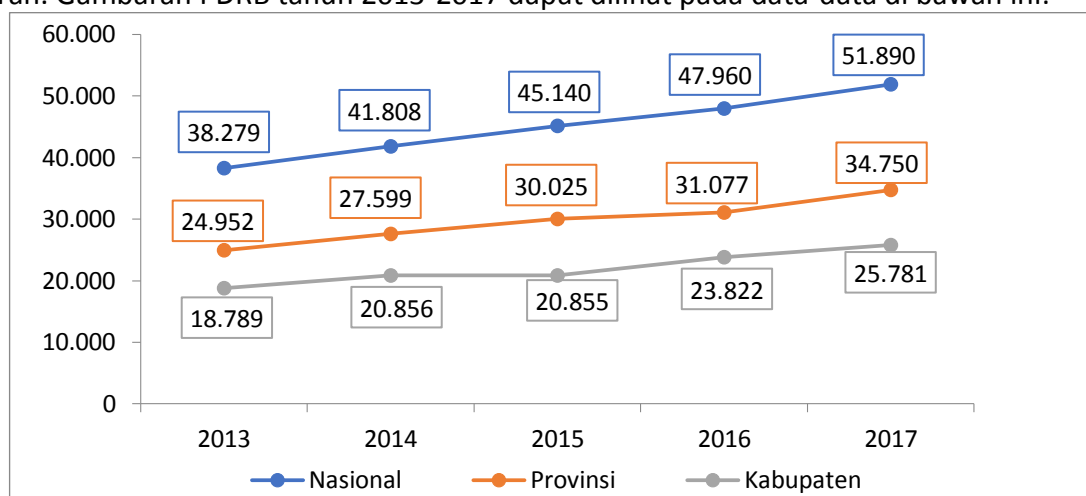
No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-5,62	4,16	1,63	3,87	3,87
B.	Pertambangan dan penggalian	6,51	4,03	6,3	20,84	20,84
C.	Industri pengolahan	15,2	7,66	7,86	6,34	6,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,3	2,59	6,77	7,07	7,07
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,98	1,71	2,98	3,71	3,71
F.	Konstruksi	14,65	6,18	7,46	7,52	7,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor	4,05	4,11	5,28	6,56	6,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,55	6,78	5,44	6,04	6,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,18	6,13	5,63	6,1	6,1
J.	Informasi dan Komunikasi	17,16	7,27	7,81	8,64	8,64
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	6,22	4,46	6,77	4,21	4,21
L.	Real Estate	6,38	6,18	5,78	5,05	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	7,15	8,84	9,92	8,19	8,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0,67	4,87	2,78	3,81	3,81
P.	Jasa Pendidikan	14,86	6,81	7,51	7,86	7,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,97	9,75	9,83	8,16	8,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,38	4,07	8,3	8,36	8,36
PDRB		5,15	5,5	5,23	6,18	6,18

Sumber: BPS, 2019

Salah satu kontribusi lapangan usaha yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara signifikan adalah berdasarkan PDRB ADHK, dimana penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2018 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian karena telah dilakukan penertiban dan pemberlakuan regulasi yang ada. Berdasarkan data di atas, pertumbuhan lapangan usaha yang paling lambat adalah pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 3,71. Sehingga perlu dilakukan penegakan regulasi yang lebih jelas dan ketat pada sektor tersebut.

2.1.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah. Gambaran PDRB tahun 2013-2017 dapat dilihat pada data-data di bawah ini:



Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (000 Rupiah)

Pada tinjauan makro sektoral perekonomian suatu daerah dapat berstruktur agraris industri atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui makro sektoral yang mendukung di Kabupaten Rembang, dapat dilihat dalam bentuk PDRB ADHK dan ADHB berikut.

Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Rembang Tahun 2014– 2017

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, & Perikanan	3.875.370,82	30,23	4.168.479,14	29,99	4.295.225,24	28,89	4.517.460,32	27,86
B.	Pertambangan & Penggalian	392.183,09	3,06	433.924,07	3,12	466.388,29	3,14	653.111,67	4,03
C.	Industri Pengolahan	2.669.575,63	20,82	2.939.112,10	21,15	3.226.027,16	21,70	3.486.156,08	21,50
D.	Pengadaan Listrik & Gas	8.767,36	0,07	9.110,24	0,07	10.351,25	0,07	11.938,14	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	5.899,50	0,05	6.188,70	0,04	6.412,17	0,04	6.684,05	0,04
F.	Konstruksi	954.913,45	7,45	1.029.561,92	7,41	1.115.264,32	7,50	1.224.790,03	7,55
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.668.565,36	13,01	1.775.107,00	12,77	1.912.222,96	12,86	2.091.451,69	12,90
H.	Transportasi & Pergudangan	449.554,14	3,51	499.050,45	3,59	526.759,92	3,54	601.088,05	3,71
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	389.323,28	3,04	427.554,85	3,08	454.579,75	3,06	491.263,48	3,03
J.	Informasi & Komunikasi	133.435,07	1,04	142.416,45	1,02	153.980,59	1,04	174.873,40	1,08
K.	Jasa Keuangan & Asuransi	544.091,27	4,24	586.425,16	4,22	640.708,20	4,31	695.637,09	4,29
L.	Real Estate	113.966,71	0,89	124.658,42	0,90	133.347,74	0,90	143.554,75	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	33.201,88	0,26	36.898,79	0,27	41.042,09	0,28	45.012,36	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	498.372,62	3,89	534.912,82	3,85	567.661,05	3,82	602.561,66	3,72
P.	Jasa Pendidikan	697.294,29	5,44	760.055,63	5,47	842.605,81	5,67	945.363,37	5,83
Q.	Jasa Kesehatan & Kegtan Sosial	149.195,02	1,16	169.145,79	1,22	186.707,03	1,26	206.924,67	1,28
R,S, T,U	Jasa Lainnya	238.006,15	1,86	255.215,06	1,84	287.792,16	1,94	316.154,80	1,95
PDRB ADHB		12.821.715,64	100	13.897.816,58	100	14.867.075,7	100	16.214.025,61	100

Sumber: BPS, 2018

Tabel 2.13

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Rembang Tahun 2014– 2017**

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.992.910,68	29,10	3.117.527,80	28,73	3.168.229,36	27,75	3.290.989,85	27,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	310.767,69	3,02	323.291,63	2,98	343.653,90	3,01	415.258,93	3,43
C.	Industri Pengolahan	2.143.284,16	20,84	2.307.391,43	21,27	2.488.767,34	21,80	2.646.597,21	21,83
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.196,67	0,09	9.434,85	0,09	10.073,49	0,09	10.785,29	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.546,09	0,05	5.640,84	0,05	5.809,15	0,05	6.024,43	0,05
F.	Konstruksi	776.630,15	7,55	824.642,21	7,60	886.134,34	7,76	952.802,86	7,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.406.724,91	13,68	1.464.601,23	13,50	1.541.934,41	13,50	1.643.010,86	13,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	414.922,27	4,03	443.036,47	4,08	467.117,18	4,09	495.336,15	4,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.231,73	3,27	356.833,89	3,29	376.930,99	3,30	399.907,68	3,30
J.	Informasi dan Komunikasi	145.366,04	1,41	155.940,86	1,44	168.123,59	1,47	182.655,76	1,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	407.151,89	3,96	425.297,66	3,92	454.103,43	3,98	473.217,02	3,90
L.	Real Estate	105.520,70	1,03	112.044,16	1,03	118.520,31	1,04	124.500,64	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	28.188,71	0,27	30.679,79	0,28	33.723,93	0,30	36.484,32	0,30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.050,95	3,80	410.088,03	3,78	421.480,84	3,69	437.549,12	3,61
P.	Jasa Pendidikan	486.880,24	4,73	520.048,58	4,79	559.128,80	4,90	603.075,53	4,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.619,36	1,14	129.087,85	1,19	141.779,71	1,24	153.344,22	1,26
R,S,T, U	Jasa Lainnya	206.282,10	2,01	214.681,91	1,98	232.497,97	2,04	251.928,97	2,08
PDRB ADHK		10.284.274,36	100	10.850.269,20	100	11.418.008,73	100	12.123.468,84	100

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
diKabupaten RembangTahun 2014 - 2017

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	8 782 543,17	68,50	9 731 003,28	70,02	10 422 089,98	70,10	11 400 996,63	70,32
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants	4 011 903,70	31,29	4 474 558,63	32,20	4 849 448,23	32,62	5 321 099,80	32,82
	b. Pakaian dan Alas Kaki/ Clothing and Footwear	374 738,09	2,92	404 467,18	2,91	430 756,48	2,90	470 119,34	2,90
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment	838 256,77	6,54	912 053,53	6,56	970 047,53	6,52	1 045 398,44	6,45
	d. Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education	510 279,06	3,98	555 647,95	4,00	597 851,27	4,02	642 851,04	3,96
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture	2 268 679,23	17,69	2 527 915,88	18,19	2 646 148,19	17,80	2 902 315,49	17,90
	f. Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels	647 438,57	5,05	710 179,72	5,11	770 045,21	5,18	843 533,18	5,20
	g. Lainnya/ Others	131 247,75	1,02	146 180,37	1,05	157 793,07	1,06	175 679,34	1,08
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure	195 427,68	1,52	204 854,77	1,47	218 941,23	1,47	236 350,55	1,46
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	1 230 266,31	9,60	1 323 420,73	9,52	1 432 360,72	9,63	1 536 667,59	9,48
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2 748 776,99	21,44	2 984 350,28	21,47	3 223 010,30	21,68	3 640 946,62	22,46
	a. Bangunan/ Building	2 298 364,91	17,93	2 517 412,29	18,11	2 729 620,71	18,36	3 111 940,65	19,19
	b.Non-Bangunan/ non – Building	450 412,08	3,51	466 937,98	3,36	493 389,58	3,32	529 005,97	3,26
5.	Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	401 740,39	3,13	258 955,60	1,86	205 541,38	1,38	448 179,68	2,76

NO	JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2014		2015		2016*		2017**	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
6.	Ekspor/ Exports	3 805 798,57	29,68	3 695 773,39	26,59	3 953 277,64	26,59	4 468 618,27	27,56
7.	Impor/ Import	4 342 837,47	33,87	4 300 541,46	30,94	4 588 145,50	30,86	5 517 733,72	34,03
8.	Ekspor/ Exports	- 537 038,90	- 4,19	- 604 768,07	- 4,35	- 634 867,86	- 4,27	-1 049 115,45	- 6,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS		12.821.715,64	100,00	13.897.816,58	100,00	14.867.075,74	100,00	16 214 025,61	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, 2018

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 – 2017 (Juta Rupiah)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2014	2015	2016*	2017**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	6.902 847,24	7 312 754,27	7 676 837,48	8 144 561,06
a Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants	2.938 669,49	3 062 039,47	3 209 514,97	3 401 023,87
b Pakaian & Alas Kaki/ Clothing and Footwear	351.015,63	374 756,49	393 847,64	416 048,26
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RumahTangga/Housing, Tools, Household and Caretaker Equipment	676.291,70	725 175,01	758 865,65	786 493,23
d Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education	440.504,46	468 381,86	490 507,18	510 488,58
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ Transport, Communication, Recreation, and Culture	1 867.955,37	2 005 869,55	2 108 131,08	2 257 913,94
f Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels	514.184,65	552 377,44	585 497,97	631 946,94
g Lainnya/ Others	114.225,93	124 154,46	130 473,00	140 646,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure	151 264,74	148 876,62	156 950,90	164 194,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	919 516,45	939 212,99	976 867,15	1 003 549,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2 214 727,19	2 345 804,58	2 492 673,90	2 713 089,96

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2014	2015	2016*	2017**
a. Bangunan/ Building	1 851 411,46	1 977 562,72	2 118 666,85	2 329 871,63
b. Non-Bangunan/ non – Building	363 315,73	368 241,86	374 007,05	383 218,34
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	236.710,77	142.979,18	153.746,02	265.160,84
6. Ekspor/ Exports	3.369.200,05	3.523.138,39	3.640.589,73	3.861.435,11
7. Impor/ Import	3.509 992,07	3.562 496,83	3.679 656,44	4.028 522,49
8. Ekspor/ Exports	- 140 792,02	- 39 358,44	- 39 066,71	- 167 087,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS	10.284.274,36	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84
* Angka sementara				
** Angka sangat sementara				

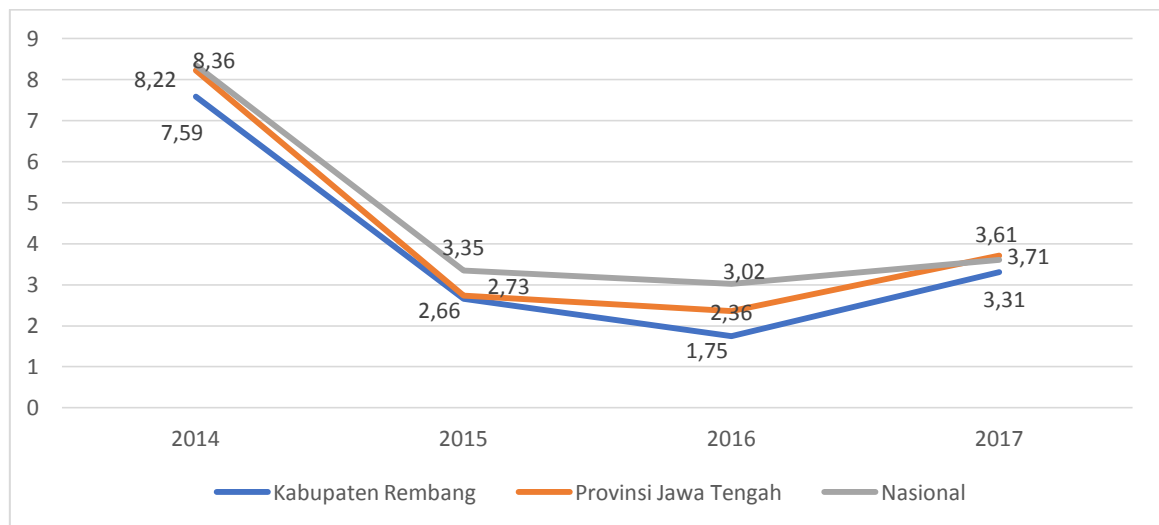
Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai kontribusi PDRB ADHK Tahun 2010 pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10,28 Trilyun, terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp. 12,12 Trilyun. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2017 yang tertinggi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu berasal dari lapangan usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,15% sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa makro sektoral perekonomian Kabupaten Rembang berstruktur agraris. Sehingga perlu untuk mempertahankan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta mendorong sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang agar meningkatkan PDRB per-kapita.
2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2014 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok.

2.1.2.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 2,53%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015-2017. Namun masih dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,61% dan inflasi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017, penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -2017 sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS, 2018

Grafik 2.4
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017

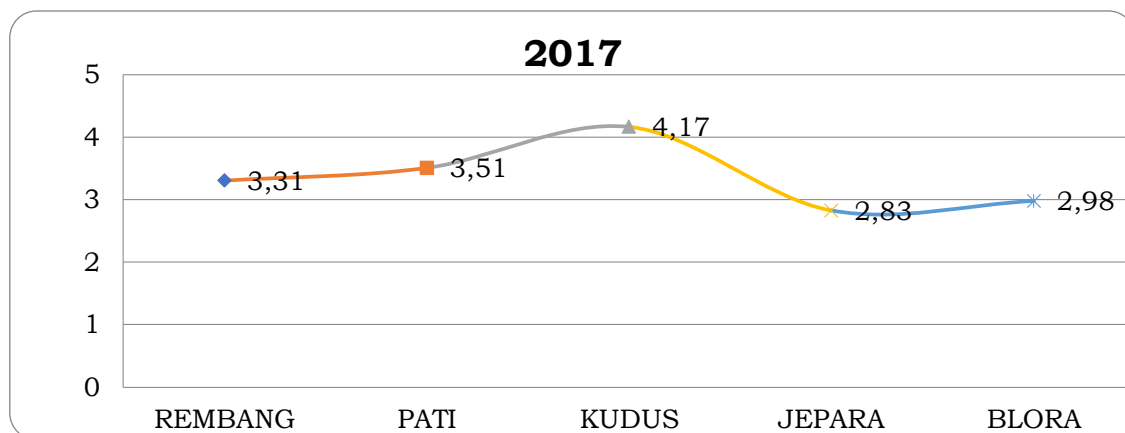
Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014–2018 masih terkendali cukup baik, meskipun pada 2014 di angka tertinggi sebesar 7,59%, namun pada kurun waktu 3 tahun berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami tingkat inflasi yang stabil yaitu di kisaran angka sebesar 1% s.d. 3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Rembang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar se-Eks Karesidenan Pati. Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun juga kondisi daerah memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Rembang. Adapun tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten sekitar wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16

Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dan Kabupaten Sekitar Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2014 – 2017 (%)

NO	KABUPATEN	INFLASI (TAHUN)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	REMBANG	7,59	2,66	1,75	3,31	2,53
2	PATI	8,01	3,23	2,31	3,51	NA
3	KUDUS	8,59	3,28	2,32	4,17	NA
4	JEPARA	9,87	4,57	3,45	2,83	NA
5	BLORA	7,13	2,85	2,14	2,98	NA

Sumber: BPS, 2019



Sumber: BPS 2018

Grafik 2.5
Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)

2.1.2.4. Penduduk Miskin

Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	120	119,11	115,49	115,19	97,44
Persentase Penduduk Miskin (persen)	19,5	19,28	18,54	18,35	15,41
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2019

Adapun perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan kabupaten eks Karesidenan Pati tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karisidenan Pati Tahun 2018

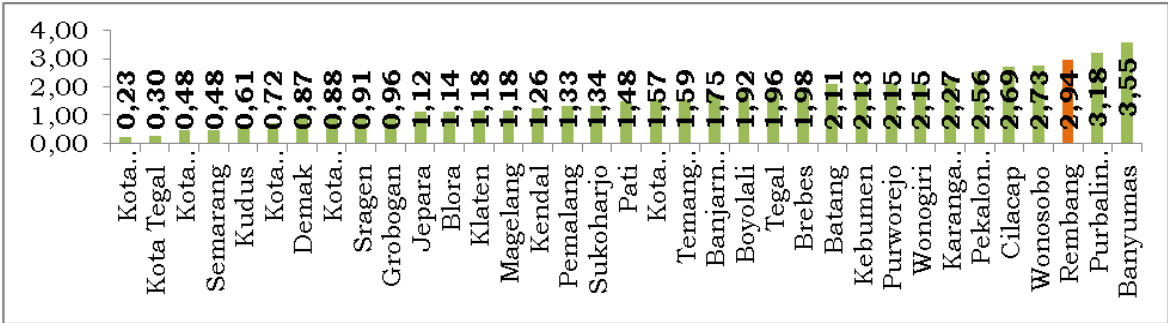
Indikator Kemiskinan	Kabupaten				
	Rembang	Pati	Kudus	Blora	Jepara
Jmlpnddk Miskin (ribu jw)	97,44	123,94	59,99	102,50	86,54
Persentase pddk Miskin (%)	15,41	9,90	6,98	11,90	7,00
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	365.443	414.316	393.078	308.520	371.296
Indeks Kedalaman Kemsikinan	2,86	1,37	0,88	1,62	0,71
Indeks Keperahan kemiskinan	0,78	0,29	0,19	0,37	0,13

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun 2014-2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%. Penurunan yang banyak ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya, hal ini terjadi karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati pada tabel di atas, bisa diartikan pada konsumsi/kapita/bln penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln. Jenis pengeluaran yang berkontribusi besar menyumbang tingginya garis kemiskinan adalah dari makanan, minuman, dan rokok sebesar 42% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga (lihat Tabel 2.14). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Rembang memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga khususnya konsumsi rokok.

Garis kemiskinan tertinggi di Wilayah Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Pati sebesar 414.316 rupiah/kapita/bln, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 393.078 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Jepara sebesar 371.296 rupiah/kapita/bln, Kabupaten Rembang sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln, menempati posisi diatas Kabupaten Blora.

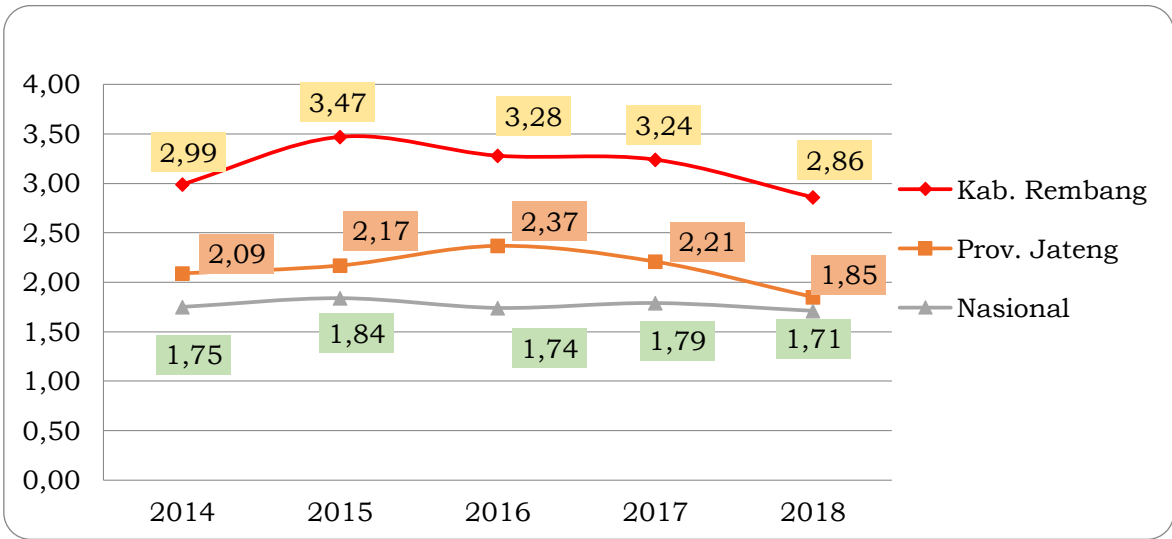
Secara umum, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup baik. Kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Grafik 2.6
Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%)

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

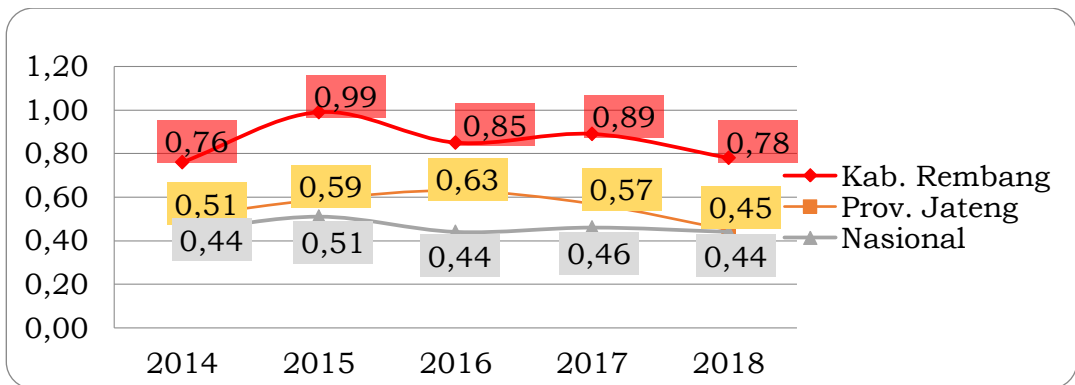


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, 2019

Grafik 2.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018

Dalam rentan waktu tahun 2015-2018, P1 mengalami penurunan dari 3,47 menjadi 2,86. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015-2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama empat tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Namun demikian penurunan P1 Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masih tertinggal. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, Tahun 2019

Grafik 2.8

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2018

Selama kurun waktu 2014-2018, P2 Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 0,76 pada tahun 2014 menjadi 0,78 pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,99. Pada tahun 2018 P2 mengalami penurunan menjadi 0,78. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan melihat *trend* penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian karena kondisi P1 dan P2 mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang. Hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Agar program tersebut tepat sasaran dan strategi penanganan maka dilakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin.

2.1.2.5. Angka Rasio Penduduk yang bekerja

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah. Adapun masalah ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Disamping itu juga adanya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang, serta pendapatan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,13	66,97	56,4	70,78	67,46
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	4,51	4,3	3,19	2,87

Sumber: BPS, 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2014, sampai dengan Tahun 2016 menurun menjadi 56,4%. Kemudian pada tahun 2017 angka TPAK meningkat yakni sebesar 70,78% dan turun lagi 67,46% pada tahun 2018. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 5,23% menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018 menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja

yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018
1	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Orang	496
2	Presentase pelatihan yang bersertifikat	%	80
3	Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,1
4	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,81
5	Rasio ketergantungan	%	41,28
6	% lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional	%	80
7	% perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan	%	100
8	Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019

2.1.2.6. Angka Kriminalitas yang ditangani

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal		
		Kasus	Tertangani	Rasio
1	2014	52	32	61,5
2	2015	84	81	96,4
3	2016	21	19	90,4
4	2017	96	87	90,6
5	2018	57	57	100

Sumber: Polres Rembang, 2019 (data diolah)

Selanjutnya dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten Sekitar Wilayah Eks-Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	67,40	68,18	68,60	68,95	69,46
Blora	65,84	66,22	66,61	67,52	67,95
Pati	66,99	68,51	69,03	70,12	70,71
Jepara	69,61	70,02	70,25	70,79	71,38
Kudus	72,00	72,72	72,94	73,84	74,58
JAWA TENGAH	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12
NASIONAL	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Secara umum pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama kurun waktu 5 tahun (2014–2018) kenaikan IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH).

2.1.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau tumbuh 0,72%. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan
Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	6,90	6,92	6,93	6,94	6,95
Blora	6,02	6,04	6,18	6,45	6,46
Pati	6,35	6,71	6,83	7,08	7,18
Kudus	7,83	7,84	7,85	8,31	8,62
Jepara	7,29	7,31	7,32	7,33	7,43
Jawa Tengah	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah yang paling tinggi di Kabupaten Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus yaitu selama 8,62 tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora yaitu selama 6,46 tahun. Kabupaten Rembang memiliki Angka Rata-rata Lama Sekolah yang cenderung rendah yaitu pada posisi ke-4 dari total 5 Kabupaten Eks Karesidenan Pati, yaitu sebesar 6,95 tahun. Angka ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,35 tahun.

2.1.2.9. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 1,29% per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Rembang yang bersekolah. Di tahun 2018, HLS telah mencapai 12,05 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. HLS dipengaruhi oleh perbedaan tingkat sosial, keadan geografis, dan sebaran sekolah.

HLS Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berada di bawah HLS Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Perbandingan HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

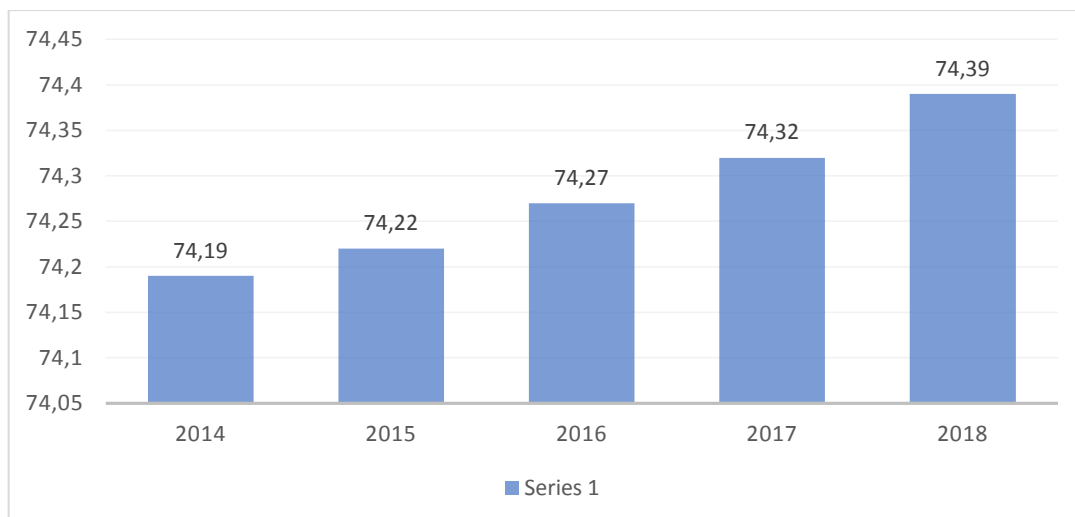
Tabel 2.24
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan
Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	11,46	12,02	12,03	12,04	12,05
Blora	11,75	11,91	11,92	12,13	12,14
Pati	11,24	11,79	11,92	12,29	12,30
Kudus	12,54	13,14	13,19	13,20	13,21
Jepara	12,58	12,27	12,28	12,70	12,71
Jawa Tengah	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63

Sumber: BPS, 2019

2.1.2.10. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Selama periode 2011 hingga 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan). Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011, UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun.



Sumber: BPS, 2019 diolah.

Grafik 2.9

UHH Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan Pati, UHH Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Rembang dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju suatu daerah, semakin banyak penduduknya yang mencapai lanjut usia. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan dan ekonomi dipercaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya usia harapan hidup pada lansia. Perbandingan UHH Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	74,19	74,22	74,27	74,32	74,39
Blora	73,84	73,84	73,88	73,99	74,12
Pati	75,43	75,63	75,69	75,80	75,93
Kudus	76,40	76,40	76,43	76,44	76,47
Jepara	75,64	75,64	75,67	75,68	75,71
Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18

Sumber: BPS, 2019

2.1.2.11. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

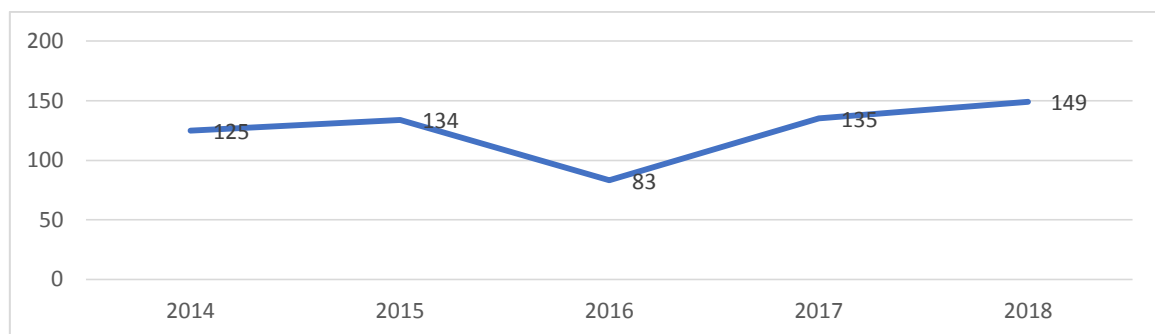
Tabel 2.26
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Metode Baru) (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang	9 013,01	10.903,96	13.191,65	14.510,82	15.961,89

Sumber: BPS, 2019

2.1.2.12. Angka kematian bayi (AKB)

Pada tahun 2018 kasus kematian bayi di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 14 kasus, atau sebanyak 149 kasus dari 135 kasus pada tahun 2017. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019

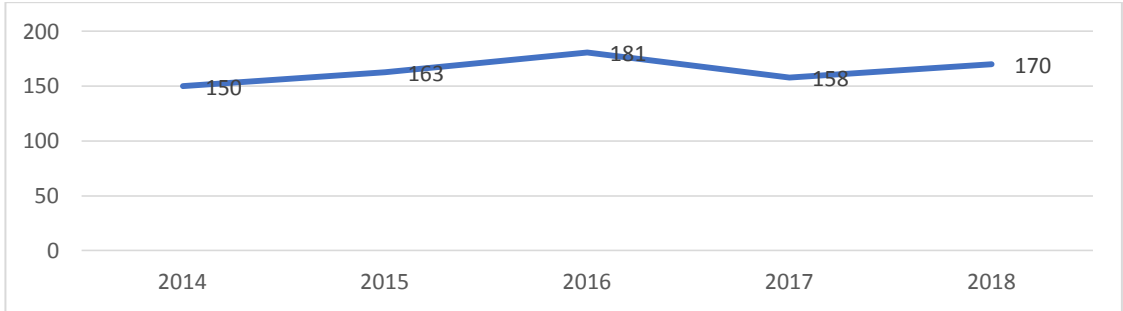
Grafik 2.10
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang

Pada tahun 2018, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati peringkat tertinggi di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah Kabupaten Kudus.

2.1.2.13. Angka Kematian Balita (AKBa)

AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari Tahun 2013 sebesar 178 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 170 kematian

bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup berhasil. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber, Kragan, dan Lasem. Grafik Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

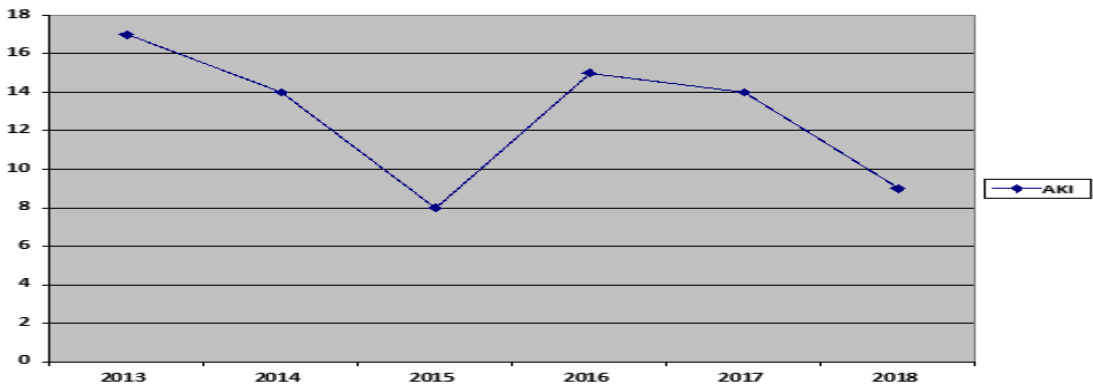


Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019

Grafik 2.11
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita
di Kabupaten Rembang tahun 2014–2018

2.1.2.14. Angka kematian ibu

Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup. Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019

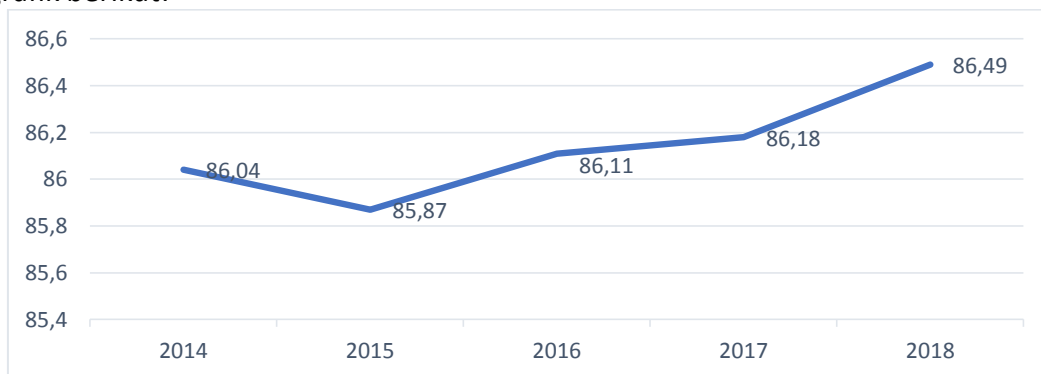
Grafik 2.12
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibudi Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018

Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah:

- Tindak lanjut penjarangan Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan.
- Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas.
- Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.
- Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

2.1.2.15. Indeks Pemberdayaan Gender

Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2019

Grafik 2.13
Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun dalam 5 tahun (2014-2018) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2018 nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2017

Komponen	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	17,78	20,00	na	22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	36,82	45,52	na	55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	31,27	31,68	na	31,69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,43	70,35	na	72,45

Sumber: BPS, 2018

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus meningkat dari tahun 2014, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017. Hal ini selaras dengan nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai angka 72,45%.

2.1.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir.

Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokok'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek – Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang. Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH (KELOMPOK)
1	Kelompok Sanggar Seni Tari	12
2	Musik tradisional	104
3	Sanggar Seni Lukis	5
4	Teater Tradisional	19
5	Tari Tradisional/tayub	5
6	Musik Modern	92
7	Barongan	5
8	Wayang Kulit	10

Sumber : Dinbudpar, 2019

Pada tahun 2018 Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik tradisional, yaitu sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut secara keseluruhan masih belum maksimal dan ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas.

Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2014-2018 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & budaya (keg)	16	18	9	9	10
2	Jml klp kesnian trdisional (klp)	311	311	134	137	137
3	Jml cagar budaya yg dilestarikan (cagar budaya)	3	3	3	3	3
4	Jumlah Cagar budaya	47	47	47	47	107
5	Jumlah seniman (orang)	1.251	1.252	3.034	3.034	3.039
6	Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian)	18	18	20	20	11
7	Jumlah Museum	1	3	1	1	1
8	Jumlah Sanggar Budaya	2	2	1	1	1
9	Jml organisasi penghayat kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi)	13	13	11	11	10

Sumber: Dinbudpar, 2019

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Lain-lain
Sumber	3	3	1	1	1
Bulu	2	2	-	-	1
Gunem	-	1	3	-	-
Sale	1	1	1	-	-
Sarang	-	1	-	-	1
Sedan	-	-	-	-	-
Pamotan	1	1	-	-	-
Sulang	2	3	-	-	-
Kaliori	3	3	-	-	1
Rembang	2	5	-	-	1
Pancur	5	-	-	-	-
Kragan	1	2	-	-	-

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Lain-lain
Sluke	1	1	1	-	-
Lasem	5	3	1	-	1
2018	26	26	7	2	6
2017	23	23	5	2	-
2016	23	23	5	2	-
2015	23	23	5	2	-
2014	20	20	12	9	11

Sumber: Dinbudpar, 2019

2.1.2.17. Pemuda dan olahraga

Keberhasilan dibidang pemuda dan olahraga dapat ditunjukkan melalui perolehan jumlah medali dan jumlah lapangan olahraga. Adapun jumlah medali dan lapangan olahraga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.31
Jumlah medali dan lapangan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	buah	8	22	31	46
2	Jumlah lapangan olahraga	buah	633	633	704	704

Sumber : Dinbudpar, 2019

2.1.2.18. Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori ketimpangan sedang atau menengah. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2015 sebesar 0,3. Adapun perkembangan indeks gini Kabupaten Rembang selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32
Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2014 – 2018

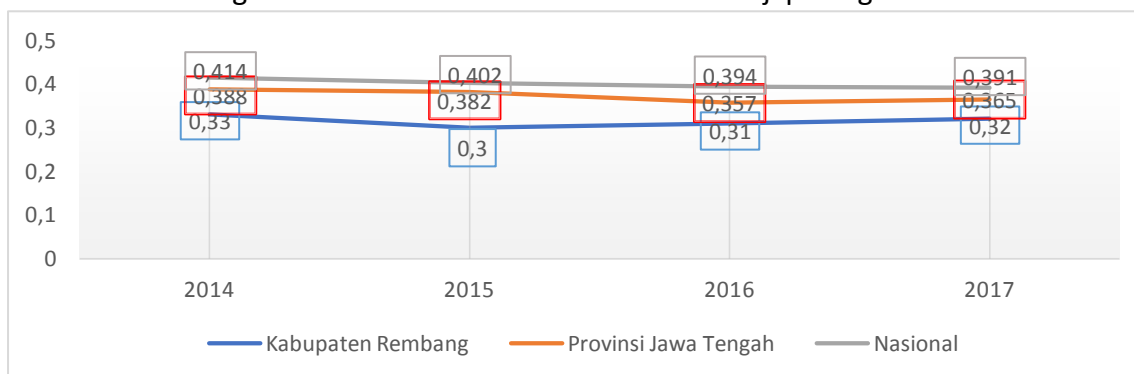
KABUPATENREMBANG	INDEKS GINI (TAHUN)				
	2014	2015	2016	2017	2018
	0,33	0,3	0,31	0,32	

Sumber : BPS, 2019

Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2018 lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan

pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang lebih baik karena ketimpangannya lebih sedikit dibandingkan Provinsi dan Nasional.

Adapun perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 tersaji pada grafik berikut.



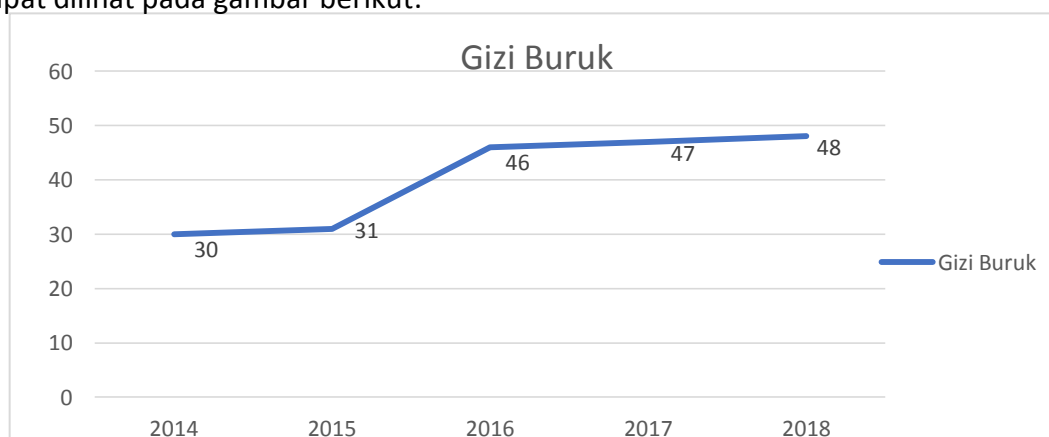
Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018 diolah.

Grafik 2.14

Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017

a. Presentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu di Kecamatan Kaliwiro, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



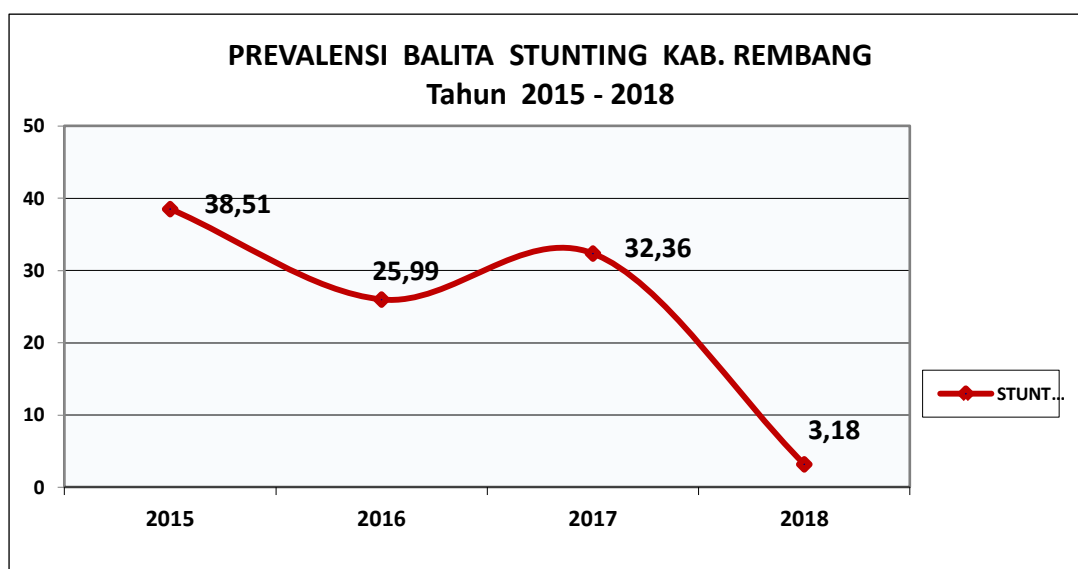
Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Grafik 2.15

Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

b. Persentase Stunting

Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015 cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar 3,18 %. Angka ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan metode yang dipakai.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Grafik 2.16
Perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Rembang
Tahun 2015-2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

a. Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 untuk kelompok umur 3-6 tahun mencapai 104,48 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2017 sebesar 108,48 persen. Penurunan APK PAUD saat ini terkendala masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Rembang dan tugas kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun.

Guna mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah

Sekolah PAUD mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah TK sebanyak 372 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebanyak masing masing 16.006 dan 790. Rasio murid dan guru sebesar 20 pada tahun 2018

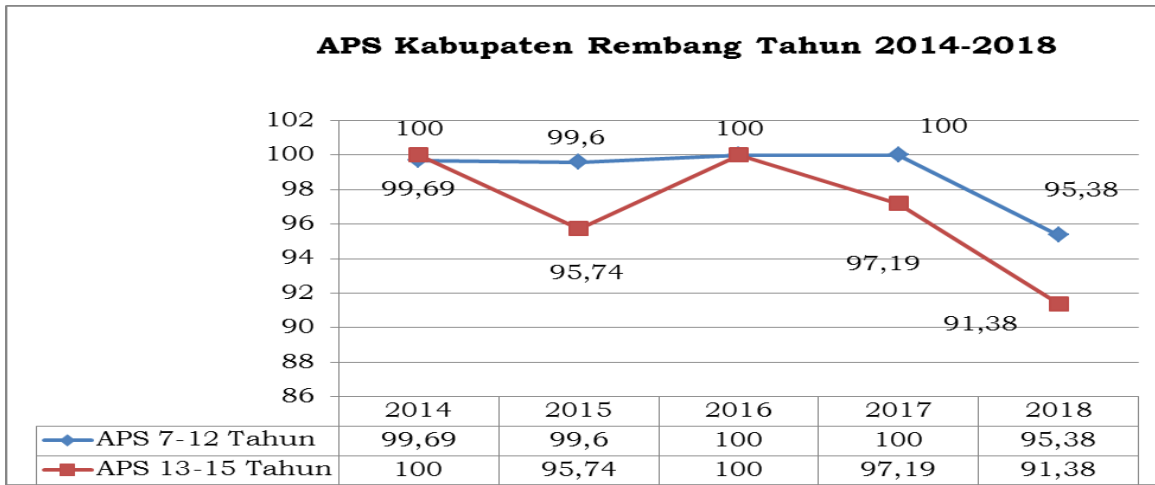
b) Pendidikan Dasar

Peran pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Keberhasilan peran pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2014-2018) mengalami penurunan.

Namun pada tahun 2018, jumlah Sekolah Dasar mengalami kenaikan menjadi 420 dari 418 unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 374 unit dan SD Non Diknas sebanyak 46 unit. Jumlah murid SD juga mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 56.938 orang pada tahun 2017 menjadi 57.089 orang pada tahun 2018 terdiri dari murid SD Diknas sebanyak 50.274 dan Non Diknas sebanyak 6.815. Sedangkan jumlah SMP/MTs (Diknas dan Non Diknas) pada tahun 2018 sebanyak 101 unit mengalami peningkatan dari 96 unit pada tahun 2017. Jumlah murid SMP/MTs mengalami penurunan yaitu dari 28.589 pada tahun 2017 menjadi 28.345 pada tahun 2018.

c) Angka Partisipasi

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Adapun APS Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS, 2019

Grafik 2.17
APS Pendidikan Dasar Tahun 2018

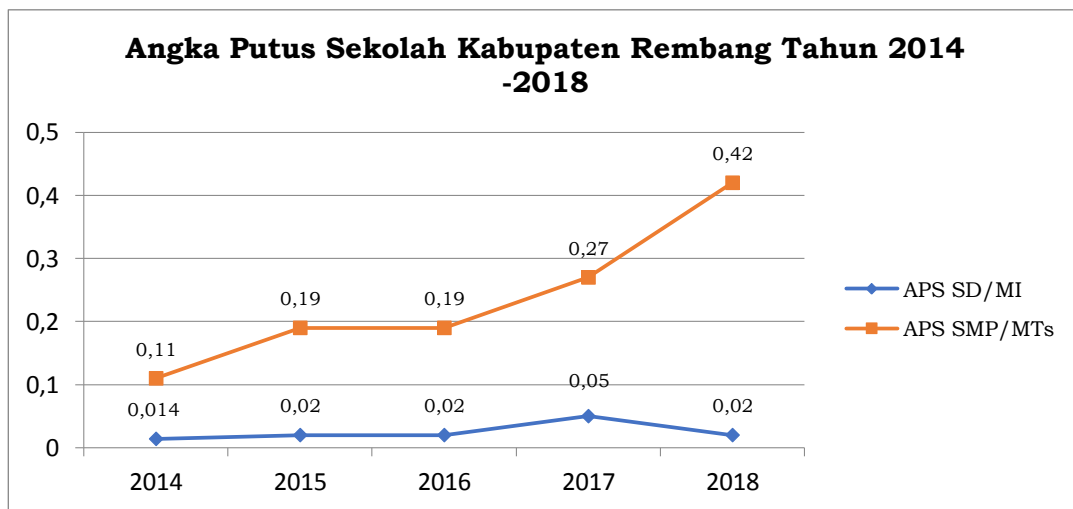
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa APS tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan yang cukup banyak dari 99,69% pada tahun 2014, turun menjadi 95,38% pada tahun 2018. Begitu pula dengan APS tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mencapai

angka 91,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Rembang mengalami penurunan.

Adanya penurunan APS ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Beberapa anak yang telah lulus pendidikan dasar tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama, namun hanya memasuki pondok pesantren.
2. Beberapa anak usia sekolah melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di luar daerah, sehingga tidak terdata sebagai anak yang bersekolah Kabupaten Rembang.
3. Adanya beberapa anak usia sekolah yang putus sekolah bisa disebabkan karena membantu orang tua bekerja, permasalahan kesehatan, meninggal, dan kejadian pernikahan dini.
4. Data yang digunakan sebagai penyebut adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik.

Adapun grafik Angka putus sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : Dindikpora, 2019

Grafik 2.18
Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa angka putus sekolah anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anak pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0,42%, jumlah ini meningkat cukup banyak dari Tahun 2014 yang berjumlah 0,11%. Peningkatan anak yang putus sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan sosial budaya masyarakat.

d) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk menilai kualitas tenaga pendidik/guru, indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data mengenai indikator tersebut mulai Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018

No	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,68%	86,05%	88,61%	90,89%	91,26%
2	Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	62,19%	67,17%	68,93%	65,14%	69,69%
3	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	20,86%	50,71%	54,83%	51,11%	59,12%
4	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	30,90%	36,65%	48,48%	52,61%	56,15%

Sumber: *Dinpendikpora, 2019*

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa secara umum persentase Guru yang memuhi kualifikasi S1/D-IV sudah hampir mencapai persentase 100% tepatnya sebesar 91,26 %. Namun ketika dilihat lebih jauh persentase Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pendidik pada setiap jenjang pendidikan yakni TK, SD/MI hingga SMP/MTs cenderung rendah, dimana pada masing-masing jenjang pendidikan persentase yang ada menunjukkan persentase yang tidak lebih dari 70 %.

b. Kesehatan

Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi serta berkualitas. Jumlah dokter umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71 orang, dokter spesialis sebanyak 43 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang.

a) Penyakit Menular

Adapun Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.34
Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan 2018

No	Kecamatan	2017						2018					
		HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sumber	4	-	2	623	15	-	2	-	7	623	32	0
2	Bulu	9	-	-	253	4	3	1	-	0	253	11	0
3	Gunem	1	-	1	401	15	1	5	-	0	401	5	0
4	Sale	2	-	1	566	11	2	3	-	4	566	8	2
5	Sarang	9	-	1	134	21	-	2	-	1	134	40	0
6	Sedan	6	-	1	660	18	1	4	-	4	660	19	16
7	Pamotan	7	-	1	408	11	1	9	-	14	408	34	4
8	Sulang	9	-	2	203	17	1	6	-	2	203	26	3
9	Kaliori	8	-	2	351	35	2	11	-	9	351	19	0
10	Rembang	18	-	2	1584	24	1	13	-	23	1584	148	0

No	Kecamatan	2017						2018					
		HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Pancur	10	-	-	334	10	1	7	-	1	334	5	0
12	Kragan	9	-	-	894	38	1	16	-	2	894	38	1
13	Sluke	7	-	-	91	10	1	9	-	1	91	16	1
14	Lasem	13	-	2	89	19	-	32	-	6	89	36	0
	Total	112	-	15	6591	296	15	120	-	74	6591	437	27

Sumber: Dinkes, 2019

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.

b) Penyakit Tidak Menular

Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Angina Pectoris	67
2	IMA	44
3	Decompensatio Cordis	428
4	Hipertensi Essential	13.054
5	Hipertensi lainnya	1.629
6	Stroke Haemorrhagie	45
7	Stroke Non Haemorrhagie	232
8	DM Tergantung Insulin	85
9	DM tidak Tergantung Insulin	11.095
10	Ca Hati	8
11	Ca Bronchus	11
12	Ca Mamae	88
13	Ca Seriks	30
14	PPOK	102
15	Asma Bronkiale	2.402
16	Kecelakaan Lalin	943
17	Psikosis	412
18	Osteoporosis	2.581
19	Ginjal Kronik	301
20	Obesitas	297
21	Katarak	451

Sumber: Dinkes, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 besar peringkat kasus penyakit tidak menular terbanyak di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah penyakit Hipertensi Essential, DM tidak tergantung insulin, dan Osteoporosis.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

a) Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2018 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 67,9%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 31,64 Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2018 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 89%. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Panjang jalan kabupaten (Km)	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
	% kondisi jalan baik	48,98	44,96	48,98	60,6	67,9
	% kondisi sedang (%)	26,27	30,30	35,43	29,21	26,88
	% kondisi jalan rusak ringan	13,11	13,11	5,06	7,81	4,62
	% Kondisi jalan rusak berat	11,64	11,64	11,64	2,4	0,6
	Panjang jalan provinsi (Km)	58,40	58,40	31,63	31,64	31,64
	Panjang jalan Nasional (Km)	61,27	61,27	88,04	88,04	88,04
2	Jumlah Jembatan Kewenangan Kabupaten	126	126	126	126	126
	% Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	73,02	73,02	79	88	89

Sumber: DPU TARU, 2019

Perkembangan pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada tahun 2016 mencapai 48 % meningkat menjadi 67,9 % atau sepanjang 424,2km pada tahun 2018. Peningkatan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh:

- a) Penanganan jalan sejak tahun 2017 mulai difokuskan pada jalan-jalan yang merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/893/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Poros Desa.
- b) Optimalisasi sumber pendanaan penanganan jalan diluar APBD salah satunya melalui dana CSR perusahaan.

Kondisi ini masih memerlukan peningkatan terutama untuk mempertahankan kemantapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalur angkutan pertambangan. Perlu pengawasan tonase jalan pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga dampak kerusakan jalan akibat kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) dapat dicegah. Kabupaten Rembang juga belum mempunyai alat dan personil untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas jalan sehingga sering mendapatkan aduan masyarakat tentang kerusakan jalan. Di samping itu sepertiga wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan hutan sehingga banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun kecamatan ada pada lahan aset Kementerian Kehutanan.

b) Irigasi dan drainase

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 329 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018 sebesar 18.438 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 87.00%. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku
di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar)	19,561	19,561	16,742	17,166	18,438
2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dlm ribuan)	8,101,319	8,101,319	7,844,440	9,228,753	10,613,066

Sumber: DPU TARU, 2019

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Neraca Air Kabupaten Rembang

UPT	KECAMATAN	KEB.IRIGASI	KEB.AIR BERSIH	KEB.TOTAL	Q. TERSEDIA	HASIL (ltr/dtk)	(m3/dtk)
BARAT	Sumber	6009,5	1,16	6010,66	1464,07	-4546,59	-4,54659
	Kaliori	5361,74	3,07	5364,81	6765,07	1400,26	1,40026
	Bulu	3219,84	1,49	3221,33	10268,15	7046,82	7,04682
	Rembang	2626,61	8,59	2635,2	65,5	-2569,7	-2,5697
	Sulang	650,52	5,1	655,62	165,78	-489,84	-0,48984
TENGAH	Pancur	3030,3	3,16	3033,46	349,45	-2684,01	-2,68401
	Lasem	1659,06	8,54	1667,6	148,19	-1519,41	-1,51941
	Pamotan	1935,23	7,63	1942,86	983,2	-959,66	-0,95966
	Gunem	2207,56	1,46	2209,02	1643,12	-565,9	-0,5659
TIMUR	Sale	3195,66	1,27	3196,93	767,43	-2429,5	-2,4295
	Sedan	3260,73	2,69	3263,42	381,5	-2881,92	-2,88192
	Kragan	5928,6	0,92	5929,52	525,45	-5404,07	-5,40407
	Sarang	3511,37	5,19	3516,56	3018,35	-498,21	-0,49821
	Sluke	1747,25	1,12	1748,37	275,92	-1472,45	-1,47245

Sumber: DPU TARU, 2019

Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih adalah dengan adanya rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga nantinya diharapkan dengan adanya rencana pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan optimalisasi fungsi embung pada masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi sebagai berikut:

- a) Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m³ di Kecamatan Sarang.
- b) Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m³ di Kecamatan Sulang.
- c) Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m³ di Kecamatan Sumber.
- d) Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m³ di Kecamatan Gunem.
- e) Embung Tlogo dengan kapasitas kurang lebih 3.700.000 m³ di Kecamatan Bulu.
- f) Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m³ di Kecamatan Sluke.
- g) Embung Trenggulun dengan kapasitas kurang lebih 4.000.000 m³ di Kecamatan Pancur.
- h) Embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m³ di Kecamatan Bulu.
- i) Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m³ di Kecamatan Pamotan.
- j) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m³ di Kecamatan Sumber.
- k) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m³ di Kecamatan Bulu.
- l) Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m³ di Kecamatan Sulang.
- m) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m³ di Kecamatan Sedan.
- n) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m³ di Kecamatan Sedan.

Rencana embung tersebut telah terealisasi sebanyak 4 unit yaitu Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Grawan dan Embung Panohan. Embung Lodan mempunyai volume tampungan mencapai 4,6 juta m³ yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku. Embung Banyukuwung berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan air baku dengan kapasitas volume mencapai 2,426 juta m³. Embung Grawan mempunyai volume sebesar 0,47 juta m³ dan Embung Panohan mempunyai volume sebesar 0,82 juta m³. Embung / Waduk panohan belum dapat digunakan secara optimal karena masih ada permasalahan terkait proses tukar menukar lahan dengan Perhutani.

Selain empat embung besar yang pengelolaannya dilakukan oleh BBWS Pemali Juawana, terdapat 7 embung mini yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pusdataru Propinsi Jawa Tengah yaitu Embung Wiroto, Embung Sridadi, Embung Jurangjero, Embung Ronggomulyo, Embung Warugunung, Embung Maguan dan Embung Sekarsari. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan embung berupa embung pertanian yang terus

mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebanyak 211 embung mejadi 237 unit embung pada tahun 2018 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Mengingat kondisi Kabupaten Rembang yang relatif kering maka perlu penambahan bangunan tampungan air dengan kapasitas yang cukup besar untuk keberlanjutan air baku di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.39
Data Embung di Kabupaten Rembang 2014-2018

Tahun	Embung			Jumlah
	Besar	Sedang	Kecil	
2014	17	52	142	211
2015	17	52	142	211
2016	17	52	148	217
2017	17	52	166	235
2018	17	52	168	237

Sumber : Dintanpan, 2019 diolah

Pembangunan tampungan air di Kabupaten Rembang sebagian besar terkendala pengadaan lahan dan relokasi permukiman yang terjadi pada rencana pembangunan Embung Kaliombo dan Embung Tlogo. Sehingga perencanaan anggaran ke depan harus diprioritaskan untuk pengadaan lahan sebagai tampungan-tampungan air agar air permukaan *run off* air menuju hilir dapat diperlambat. Selain itu untuk rencana bangunan penampung air lainnya harus segera dibuat perencanaan yang matang sehingga skenario penyediaan air baku di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara optimal.

Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 24,95 km. Pada tahun 2018 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 20,17 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 4,78 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,04%. Hal ini mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk sarana pembuangan. Disisi lain drainasejalan juga perlu pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir. Perkembangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Perkembangan Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (km)	25,95	25,95	23.74	24.06	24.95
2	Panjang <i>Drainase</i> dalam Kondisi Baik (km)	16,35	16,60	17.74	18.38	20.17
3	Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km)	9,60	9,35	6.00	5.68	4.78

Sumber: DPU TARU, 2019

c) Penataan ruang

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang.

2) Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas 869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor pantura yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

3) Luas Wilayah Kebanjiran

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber.

4) Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

5) Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik

pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.

d. Perumahan rakyat dan pengawasan permukiman

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan belum diikuti dengan penyediaan rumah oleh pemerintah daerah. Pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada masa mendatang peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar harga rumah relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain adanya kekurangan rumah (backlog), rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan cukup besar di Kabupaten Rembang menurut data PBDT Tahun 2015 yaitu mencapai 59.453 unit atau sebesar 33,1 % dari jumlah rumah di Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2018, RTLH tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 4.604 unit. Selengkapnya data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Data RTLH (PBDT 2015)	Realisasi Rehabilitasi RTLH			Data RTLH 2018
			2016	2017	2018	
1	Sumber	5,115	31	133	54	4,897
2	Bulu	3,735	60	38	83	3,554
3	Gunem	3,054	0	41	68	2,945
4	Sale	3,242	11	197	56	2,978
5	Sarang	5,480	89	138	87	5,166
6	Sedan	6,414	283	221	191	5,719
7	Pamotan	5,840	83	106	494	5,157
8	Sulang	4,603	44	62	95	4,402
9	Kaliori	4,165	0	199	134	3,832
10	Rembang	4,064	105	240	197	3,522
11	Pancur	3,406	231	26	99	3,050
12	Kragan	4,884	66	108	127	4,583
13	Sluke	2,490	20	33	50	2,387
14	Lasem	2,961	51	74	179	2,657
Jumlah		59,453	1,074	1,616	1,914	54,849

Sumber: DPKP, 2019

Pembangunan perumahan harus memperhatikan peraturan-peraturan serta mengacu pada RTRW untuk menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aturan akan memunculkan masalah-masalah lingkungan permukiman. Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut banyak ditemukan pada

permukiman pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor. 050/0960/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan kawasan kumuh perkotaan berada pada 14 desa dengan luas mencapai 114,407 Ha. Luasan kumuh tersebut menjadi target RPJMN kota tanpa kumuh pada tahun 2019.

Mengingat lokasi kawasan kumuh yang dinilai masih sangat terbatas, pada tahun 2016 dilakukan pemutakhiran ulang terhadap SK Kumuh pada tahun 2014. Pemutakhiran data tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2017 ditetapkan kembali SK Bupati Nomor. 050/787/2017 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan 19 kawasan permukiman kumuh dengan luas kawasan kumuh mencapai 290,45 Ha. Progres pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sangat lambat. Pada Tahun 2018, luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang baru mencapai 6,16 Ha. Selengkapnya luas pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.42

Luas Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	2017	2018	+/-
1.	Rembang	Tanjungsari	20.2 ha	20.2 ha	0 ha
		Pasarbanggi	6.86 ha	4.71 ha	-2.15 ha
		Padaran	36.94 ha	36.94 ha	0 ha
		Gegunungwetan	4.77 ha	4.77 ha	0 ha
		Gegunungkulon	5.02 ha	5.02 ha	0 ha
		Kabongan Lor	3.82 ha	3.82 ha	0 ha
2.	Lasem	Sukoharjo	5.83 ha	5.83 ha	0 ha
		Dorokandang	1.98 ha	0.90 ha	-1.08 ha
		Ngemplak	2.93 ha	0 ha	-2.93 ha
		Babagan	15.9 ha	15.9 ha	0 ha
		Soditan	8.38 ha	8.38 ha	0 ha
		Gedongmulyo	33.63 ha	33.63 ha	0 ha
3.	Pamotan	Sumbergirang	7.25 ha	7.25 ha	0 ha
		Sidorejo	20.34 ha	20.34 ha	0 ha
		Pamotan	23.61 ha	23.61 ha	0 ha
4.	Kragan	Bangunrejo	19.99 ha	19.99 ha	0 ha
		Tegalmulyo	46.32 ha	46.32 ha	0 ha
		Karangharjo	12.05 ha	12.05 ha	0 ha
TOTAL			290.45 ha	284.29 ha	-6.16 ha

Sumber: DPKP, 2019

Selain penataan kawasan permukiman kumuh, mengingat sejarah Kabupaten Rembang yang sangat panjang maka banyak terdapat kawasan permukiman tradisional yang perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2017 telah disusun

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan perkotaan Lasem yang merupakan perpaduan dari budaya Jawa dan Tionghoa. Penyusunan ini selain untuk meningkatkan kualitas permukiman juga bertujuan untuk melindungi bangunan-bangunan pusaka yang ada di wilayah tersebut. Ke depan akan disusun juga masterplan kawasan-kawasan permukiman tradisional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas perkotaan sebagaimana amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan minimal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan. RTH publik perkotaan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat diwujudkan sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan rel KA, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Selengkapnya RTH di Kabupaten Rembang pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang

NO	NAMA RTH	LOKASI	TIPOLOGI RTH	JENIS RTH	LUAS (M2)
1	Alun-alun Kota Rembang	Jalan KH. Mas Mansyur Kel Kutoharjo Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	12.722
2	Taman Borotugel	Jl Pahlawan (belakang RSUD) ds Kabongan Kidul kec Rembang.	Publik	Taman Kota	10.400
3	RTH Desa Mondoteko	Jalan Mondoteko Desa Mondoteko Kecamatan Rembang.	Publik	Taman Kota	29.000
4	RTH KBT Tasikagung	Jl Pelabuhan Periknan Pantai Tasik agung ds Tasikagung Kec Rembang.	Publik	Taman Kota	5.200
5	Taman Tugu Batas Kota Barat	Jalan Gajahmada ds Banyudono Kecamatan Kaliori	Publik	Taman Kota	420,84
6	Taman Tugu Bataskota Timur	Jalan Sudirman Desa Tireman Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	420,84
7	Taman Tugu PKK	Jalan Gajah Mada Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	130,38
8	Taman Tugu Adipura	Jalan Gajah Mada – Diponegoro Kel Kutoharjo kec Rembang	Publik	Taman Kota	147,33
9	Taman Balai Kartini	Jalan Diponegoro Desa Pandean Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	437,8
10	Taman Tugu Lilin	Jalan Veteran Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	411
11	Taman Depan Terminal	Jalan Sudirman Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang	Publik	Taman Kota	269
12	Pemukaman Krapyak	Jalan Majapahit Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang.	Publik	Pemukaman	74.135
13	Pemukaman Turusgede	Jalan Rembang – Blora Desa Turusgede Kecamatan Rembang	Publik	Pemukaman	54.253
14	Jalur Hijau Jalan Kartini	Jl Kartini Kel Kutoharjo, Kel Leteh, ds Sawahan Kecamatan Rembang.	Publik	Jalur pejalan kaki	677,51
15	Jalur Hijau Jl Dr. Sutomo	Jl dr. Sutomo Kel Kutoharjo, Kel Leteh Kecamatan Rembang	Publik	Jalur Pejalan Kaki	868,62

NO	NAMA RTH	LOKASI	TIPOLOGI RTH	JENIS RTH	LUAS (M2)
16.	Jalur Hijau Jl HOS. Cokroaminoto	Jl HOS. Cokroaminoto Kel Kutohar jo, kel Leteh, kel Sidowayah, ds Suko harjo, ds Kabngankidul kec Rembang.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	1.328,44
17.	Jalur Hijau Jalan Pemuda	Jl Pemuda ds Sumberjo, Kel Leteh, ds Kabongankidul, ds Ngotet, ds Mondoteko Kec Rembang.	Publik	Jalur Pejalan Kaki	4.050,04
18.	Hutan Kota Besi	Jl Rembang–Blora ds Turusgede Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	200.000
19.	Hutan Kota Rowosetro	Jl Clangapan ds PasarBanggi Kec Rembang	Publik	Hutan Kota	22.434
20.	Hutan mangrove Desa Tireman	Jalan - Desa Tireman Kecamatan Rembang.	Publik	RTH Sempadan Pantai	280.000
21.	Hutan mangrove ds Pasar Banggi	Jalan-ds Pasar Banggi Kec Rembang	Publik	RTH Sempadan Pantai	485.000

Sumber: DPKP, 2019

Sebagian besar RTH sebagaimana tercantum di atas berlokasi di Kecamatan Rembang. Luas Ruang Terbuka Hijau di atas mencapai 118,23 Ha yang terdiri dari taman aktif maupun pasif. Dilihat dari luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Rembang yang mencapai 3.214 Ha, maka prosentase RTH Publik di Kabupaten Rembang baru mencapai 3,68 %. Untuk memenuhi amanat Perda Tata Ruang sebesar 20 % dari luas perkotaan atau sekitar 642,8 hektar maka masih terdapat kekurangan luas RTH publik sebesar 524,57 hektar. Sejak Tahun 2018, Pemkab Rembang mulai melakukan penataan RTH di luar Perkotaan Rembang untuk mewujudkan target luasan sebagaimana amanat Perda Tata Ruang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan luasan RTH publik tersebut antara lain kurangnya lahan di perkotaan. Sehingga upaya perwujudan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan lahan di kawasan perkotaan.

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2014 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun sebanyak 121 kasus, menurun menjadi 67 kasus pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 82 kasus pada Tahun 2018. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Jenis Kasus Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Narkoba	4	6	19	15	16
2	Pembunuhan	1	0	2	0	1
3	Seksual	18	8	5	3	10
4	Penganiayaan	24	34	16	9	14

5	Pencurian	44	57	36	21	32
6	Penipuan	29	18	12	18	9
7	Pemalsuan Uang	1	0	0	1	0
Jumlah		121	123	90	67	82

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

f. Sosial

Pada tahun 2017 instrumen yang paling banyak diterima rumah tangga Kabupaten Rembang adalah BPNT (dulunya paket raskin/rastra), yaitu sebanyak 81,77 persen. Berturut-turut adalah instrumen Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 27,84 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 17,49 persen dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 9,02 persen.

Fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok tersebut termasuk kelompok miskin absolut individu. Adapun data pada tahun 2018 untuk lansia terlantar sebanyak 600 orang dan disabilitas berat 300 orang. Sedangkan permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh perangkat daerah terkait. Agar supaya bisa menangani permasalahan PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan jaminan biaya hidup diatas garis kemiskinan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan bisa tercukupi dan tertangani dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui forum CSR, Baznas maupun *personal responsibility*. Perkembangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang pada kurun waktu Tahun 2014 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.45
Populasi dan Penanganan PMKS di Kabupaten Rembang

No	Tahun	Jumlah PMKS	PMKS tertangani	Prosentase (%)
1	2014	11.544	248	2,15
2	2015	11.544	372	3,22
3	2016	11.544	197	1,71
4	2017	11.544	265	2,30
5	2018	11.544	311	2,70

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Berdasarkan Tabel 2.45 terlihat bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Rembang setiap tahunnya masih tetap sama yakni sebanyak 11.544 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang tertangani setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Prosentase tertinggi jumlah PMKS yang tertangani terdapat di tahun 2015 yakni sebesar 3,22% atau sebanyak 372 jiwa, sedangkan prosentase terkecil jumlah PMKS yang tertangani terdapat di tahun 2016 yakni sebesar 1,71% atau sebanyak 197 jiwa. Meskipun jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015-2016, namun secara umum jumlah PMKS yang tertangani setelahnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,13	66,97	56,4	70,78	67,46
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	4,51	4,3	3,19	2,87

Sumber: BPS, 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2014, meningkat di Tahun 2017 menurun menjadi 70,78%. Kemudian pada tahun 2018 angka TPAK turun lagi menjadi 67,46%. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami penurunan, dari 5,23 % menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018 menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.47

Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

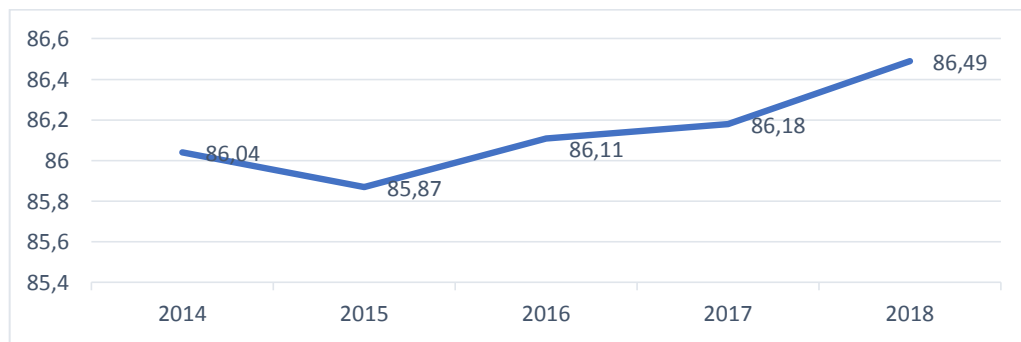
No	Indikator Kinerja	Satuan	2018
1	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Orang	496
2	Presentase pelatihan yang bersertifikat	%	80
3	Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,1
4	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,81
5	Rasio ketergantungan	%	41,28
6	% lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional	%	80
7	% perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan	%	100
8	Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Pemberdayaan Perempuan

Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2018

Grafik 2.19

Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun dalam 5 tahun (2014-2018) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2017 nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017

Komponen	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	17,78	20,00	na	22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	36,82	45,52	na	55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	31,27	31,68	na	31,69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,43	70,35	na	72,45

Sumber: BPS, 2018

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus meningkat dari tahun 2014, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017. Hal ini selaras dengan nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai angka 72,45%.

b) Perlindungan Anak

Kabupaten Rembang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Beberapa indikator terkait penilaian Desa Ramah Anak tersebut seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hingga kini pemerintah masih

melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ppnt Semai "Rwc3" Rembang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS			
			FISIK	SEKSUAL	PSIKOLOG	PENELANTARAN
1	2014	14	11	1	0	1
2	2015	12	10	2	0	0
3	2016	18	12	43	2	4
4	2017	6	3	0	0	4
5	2018	5	3	2	0	0

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 18 korban, adapun penurunan yang terjadi mulai 2017 sebanyak 6 korban dan 2018 sebanyak 5 korban. Penurunan tersebut dikarenakan adanya edukasi terkait dengan hal-hal yang dapat mengantisipasi kejadian kekerasan terhadap perempuan serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.

Sementara itu, dalam peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil pemeringkatan capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama. Capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, dan tingkat madya, di kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.50
Capaian Tingkat Pratama Kabupaten Rembang

TAHUN	PEROLEHAN
2014	NINDYA
2015	TINGKAT MADYA
2016	TINGKAT MADYA
2017	TINGKAT MADYA
2018	TINGKAT MADYA

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Dari tabel diatas capaian Tingkat Pratama Kabupaten Rembang diraih pada Tahun 2014 dan sejak tahun 2018 meningkat menjadi madya sampai sekarang. Kedepan akan ditingkatkan capaiannya yang lebih baik. Untuk meningkatkan Capaian yang lebih tinggi kearah nindya maupun utama perlu didorong dalam implementasi secara nyata dalam melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan.

c. Pangan

Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal, dengan skor tahun 2013 sebesar 86,7% dan Tahun 2014 naik sebesar 86,8%, namun terjadi penurunan di Tahun 2015, dan 2016. Pada tahun 2017 skor PPH Kabupaten Rembang kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,58% dan pada tahun 2018 sebesar 86,8%. Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbangya konsumsi kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain dengan kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan substitusi lain. Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan.

Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 1.983,3 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata penduduk sudah cukup baik, namun upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal seperti jagung, ketela dan ubi sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan-bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras.

Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,8	85,9	85,4	87,58	86,8
2	Ketersediaan energi per kapita (kcal/kapita/hari)	5.000	5.280	5.044	6.515	5.044
3	Ketersediaan informasi pasokan harga & akses pangandaerah (%)	100	100	100	100	100
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100	100	100	100
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	92	80	100	100	100
6	Penanganan daerah rawan pangan (%)	21	66,6	100	100	100
7	% peningkatan kelas penyuluh/tahun (%)	8,12%	10%	10%	10%	15,78
8	Jml diklat formal/non formalyg diikuti penyuluh/th	18	20	15	15	16
9	Jml Pos Penyuluhan desa/th (Posluhdes)	2	2	42	55	55
10	% peningkatan kelas kelompok tani (%)	34,92	17	17	9,09	10

Sumber: Dintanpan, 2019

d. Pertanian

Kebijakan pada urusan pertanian diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanian dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanian. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanian adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terdapat 124 pengaduan kasus pertanian dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan tertib administrasi pertanian di tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanian di 14 kecamatan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanian diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanian. Salah satunya dalam upaya reaktifasi kereta api komuter di Kabupaten Rembang. Perlu dilakukan identifikasi terkait lahan-lahan yang merupakan asset PT. KAI sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program reaktifasi kereta api di Kabupaten Rembang.

e. Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan membawa konsekuensi logis meningkatnya jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu penanganan masalah sampah di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada belum memenuhi syarat kelayakan yaitu sistem operasional TPA masih dengan sistem control landfill, fasilitas TPA untuk zona penimbunan belum dilengkapi dengan bangunan kedap air, pengendalian gas tidak ada, serta instalasi pengolahan lindi yang kondisinya rusak.

Timbulan sampah di Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 4 %. Faktor umum yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah perkotaan diantaranya yaitu pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat sehingga telah menyebabkan timbulan sampah di daerah perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut baik jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R). Selengkapannya data timbulan sampah di Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.52
Data Timbulan Sampah di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Timbulan Sampah (kg/hari)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sumber	18	10,389	10,426	10,475	12,221	12,650
2	Bulu	16	7,931	7,958	7,995	9,381	9,653
3	Gunem	16	7,092	7,134	7,184	8,087	8,706
4	Sale	15	11,159	11,227	11,309	13,152	13,706
5	Sarang	23	18,950	19,124	19,322	20,580	23,529
6	Sedan	21	16,001	16,109	16,237	18,492	19,701
7	Pamotan	23	13,611	13,664	13,733	16,926	16,591
8	Sulang	21	11,482	11,554	11,640	13,407	14,112
9	Kaliori	23	12,068	12,146	12,239	14,410	14,844
10	Rembang	34	26,536	26,791	27,082	31,236	33,003
11	Pancur	23	8,585	8,652	8,729	10,485	10,608
12	Kragan	27	18,362	18,526	18,714	22,440	22,782
13	Sluke	14	8,287	8,332	8,386	10,452	10,155
14	Lasem	20	14,618	14,699	14,796	17,828	17,918
JUMLAH		294	185,070	186,340	187,841	219,097	227,956

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terbagi menjadi empat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, pengelolaan melalui bank sampah, pengelolaan melalui TPS 3R dan sampah yang diangkut menuju TPA. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang hanya sebesar 0,5 m³/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Sedangkan besaran sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.53
Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah di Kabupaten Rembang

No	Nama Kecamatan	3R		Volume sampah yg terangkut ke TPA		Total volume sampah yang terangkut		Total Timbulan Sampah Se Kabupaten m ³ /hari
		%	m ³ /hari	%	m ³ /hari	%	m ³ /hari	
1	Sumber	-	-	-	-	-	-	70,35
2	Bulu	-	-	-	-	-	-	81,59

No	Nama Kecamatan	3R		Volume sampah yg terangkut ke TPA		Total volume sampah yang terangkut		Total Timbunan Sampah Se Kabupaten
		%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	m3/hari
3	Gunem	-	-	-	-	-	-	97,61
4	Sale	-	-	-	-	-	-	136,61
5	Sarang	-	-	0,02%	0,25	0,02%	0,25	162,83
6	Sedan	-	-	-	-	-	-	94,45
7	Pamotan	-	-	1,02%	16	1,02%	16	229,71
8	Sulang	-	-	0,19%	3	0,19%	3	73,59
9	Kaliori	-	-	-	-	-	-	112,28
10	Rembang	0,03%	0,5	9,38%	147,45	9,41%	147,95	124,12
11	Pancur	-	-	-	-	-	-	157,52
12	Kragan	-	-	0,38%	6	0,38%	6	105,13
13	Sluke	-	-	0,58%	9,2	0,58%	9,2	60,29
14	Lasem	-	-	3,18%	50	3,18%	50	66,63
Jumlah		0,03%	0,5	14,75%	231,9	14,78%	232,4	1.572,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun sampah non permukiman. Pada tahun 2018, volume sampah yang terangkut sebesar 231,90 m3/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 147,45 m3/hari (9,41% dari jumlah total volume sampah se-Kabupaten Rembang). Hal ini dikarenakan Kecamatan Rembang merupakan ibukota Kabupaten Rembang. Selain di Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 50 m3/hari (3,81%). Volume sampah yang terangkut ke TPA juga merepresentasikan tingkat pelayanan eksisting sekarang ini. Untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rembang akan dilakukan pengembangan TPA di Kecamatan Sulang. Diharapkan pengembangan TPA tersebut dapat semakin meningkatkan umur teknis bangunan serta meningkatkan kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Rembang..

Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2014-2018 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara, dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolahan limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih jelasnya, perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Jenis Sarana	2014	2015	2016	2017	2018
1	Truk Sampah (unit)	5	5	4	5	6
2	Truk Container (Unit)	7	7	5	6	8
3	Kontainer (unit)	56	56	56	55	63
4	Gerobak dan Becak Sampah (unit)	98	98	114	114	114
5	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	36	36	46	52	59

No	Jenis Sarana	2014	2015	2016	2017	2018
6	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kualitas Lingkungan hidup sering digunakan sebagai acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi yang ideal. Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi diambil sampel di perempatan jaeni, Industri di PLTU Sluke, Perumahan di desa Sidowayah, Komersial Perkantoran di jalan Pemuda km.2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh DLH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.55
Pengukuran Kualitas Udara di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	Lokasi pengukuran	Lama pengukuran	SO2	CO	NO2	O3	TSP	PM10	Hc
			µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
1	Perempatan Jaeni	1 jam	65,63	3865,03	117,79	51,86	81,65	0,018	38,41
2	PLTU Sluke	1 jam	64,21	5248,8	135,72	118,72	163,39	0,03	42,89
3	Desa Sidowayah	1 jam	62,12	2879,45	106,53	41,76	52,63	0,012	35,11
4	Jalan Pemuda Km.2	1 jam	63,37	3456,92	109,87	60,74	78,11	0,02	37,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Sedangkan untuk pengukuran kualitas atau pencemaran air sungai menggunakan komposisi parameter fisik (bau, warna, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa) kimia (bahan an-organik : besi, seng, aluminium, kesadahan, klorida, mangan, pH, sulfat, serta tembaga) dan bakteriologis (jumlah kuman dan total coli). Kabupaten Rembang menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang kecamatan Sarang, sungai Babagan kecamatan Lasem, sungai Karanggeneng Rembang. Analisis pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBTPI Semarang yang sudah terakreditasi oleh KAN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut.

Tabel 2.56
Pengukuran Kualitas Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	parameter	Sat	Sungai pengambilan sampel						Baku mutu			
			kalipang		Karanggeneng		babagan		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
			Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II				
1	TSS	mg/l	25	28	34	26	27	44	50	50	400	400
2	pH		6,7	7,8	7,7	6,5	6,9	7,8	6-9	6-9	6-9	6-9
3	BOD	mg/l	7.02	7,82	5,75	6,09	4,56	8,67	2	3	6	12
4	COD	mg/l	10,56	13,42	15,79	17,65	20,65	38,67	10	25	50	100
5	DO	mg/l	4,01	4,33	3,95	3,56	2,89	4,91	6	4	3	0
6	Total Coli	jumlah/ 100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				
7	e Coli	Jumlah/ 100ml	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Indikator terakhir untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi. Tutupan lahan menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan yang akurat merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan lebih akurat. Tutupan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari luas lahan dengan kenampakan hutan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisian Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
1	Capluk	Areal Penggunaan Lain	17,979.86	97.34	82.41	31.20	16.09	18,206.90
2		Hutan Produksi	2,374.85	986.86	259.25	2.82	-	3,623.78
3	Panggung	Areal Penggunaan Lain	2,679.69	-	-	-	-	2,679.69
4	Jambangan	Areal Penggunaan Lain	1,464.50	-	-	-	-	1,464.50
5	Kiringan	Areal Penggunaan Lain	1,395.35	-	-	-	-	1,395.35
6	Lasem	Areal Penggunaan Lain	14,804.18	1,501.04	906.61	400.83	201.59	17,814.25
		Hutan Konservasi	-	7.63	-	-	-	7.63
		Hutan Lindung	38.43	37.85	324.55	109.89	-	510.72
		Hutan Produksi	1,571.51	1,426.28	293.02	36.27	6.51	3,333.59
		Hutan Produksi Terbatas	121.24	1,066.04	191.65	13.30	4.27	1,396.50
8	Tasiksono	Areal Penggunaan Lain	1,104.33	102.94	769.94	131.05	46.29	2,154.55
		Hutan Lindung	-	-	36.66	21.56	24.05	82.27
9	Bonang	Areal Penggunaan Lain	377.93	121.40	104.49	6.36	1.37	611.55
		Hutan Lindung	2.02	4.64	68.54	31.97	-	107.17
		Hutan Produksi	0.55	-	-	-	-	0.55
10	Leran	Areal Penggunaan Lain	196.36	62.08	104.78	33.18	-	396.40
		Hutan Produksi	32.63	30.45	36.35	32.95	-	132.38

No.	Nama DAS	Kawasan	Kekritisian Lahan (Ha)					Total
			Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	sangat Kritis	
11	Malang	Areal Penggunaan Lain	464.27	78.71	140.07	48.83	-	731.88
		Hutan Produksi	1.44	1.08	49.72	7.52	-	59.76
12	Kladen	Areal Penggunaan Lain	568.86	8.38	600.16	146.08	-	1,323.48
		Hutan Lindung	13.05	-	305.01	74.07	-	392.13
		Hutan Produksi	-	-	0.71	-	-	0.71
13	Sranduk	Areal Penggunaan Lain	92.75	65.73	265.51	93.56	-	517.55
		Hutan Lindung	-	-	0.05	-	-	0.05
14	Randualas	Areal Penggunaan Lain	149.07	-	117.00	52.44	-	318.51
15	Kepel	Areal Penggunaan Lain	285.69	-	229.64	211.21	-	726.54
		Hutan Lindung	11.81	-	136.99	8.83	-	157.63
16	Kresak	Areal Penggunaan Lain	613.53	98.30	246.85	5.31	12.26	976.25
		Hutan Lindung	4.89	-	195.03	2.66	-	202.58
17	Anyar	Areal Penggunaan Lain	752.93	30.57	20.67	12.70	4.42	821.29
18	Kesambi	Areal Penggunaan Lain	11,433.45	1,616.36	971.12	220.15	26.68	14,267.76
		Hutan Lindung	92.98	259.80	665.51	47.42	-	1,065.71
		Hutan Produksi	1,486.93	963.49	18.13	81.46	-	2,550.01
		Hutan Produksi Terbatas	19.76	107.48	42.56	8.28	-	178.08
19	Randugunting	Areal Penggunaan Lain	7,487.40	3.93	3.08	0.52	-	7,494.93
		Hutan Produksi	497.30	326.97	42.72	16.66	-	883.65
20	Serang	Areal Penggunaan Lain	373.48	153.55	9.02	-	0.71	536.76
		Hutan Produksi	1,213.13	358.62	3.03	-	-	1,574.78
		Hutan Produksi Terbatas	235.29	147.27	6.37	-	1.10	390.03
21	Temperak	Areal Penggunaan Lain	4,447.96	21.21	-	-	-	4,469.17
		Hutan Produksi	509.30	581.04	11.66	-	-	1,102.00
		Blank	-	-	-	-	-	-
22	Solo	Areal Penggunaan Lain	719.32	544.32	3,227.20	416.98	-	4,907.82
		Hutan Konservasi	4.07	-	11.80	-	-	15.87
		Hutan Produksi	80.54	1,557.20	3,502.72	68.46	-	5,208.92
		Hutan Produksi Terbatas	3.64	16.65	430.99	40.85	-	492.13
Jumlah			75,706.27	12,385.21	14,431.57	2,415.37	345.34	105,283.76

Sumber : Dintanpan, 2019

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Pelayanan pencatatan sipil;
3. Pengumpulan data kependudukan;

4. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/ Kota;
5. Penyusunan profilkependudukan Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada 2011 menjadi 81% pada tahun 2015. Kedua indikator tersebut perkembangannya masih dibawah target yang termuat dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100% adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian.

Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	89,20	87,52	94,00	98,40	98,24
2	Persentase bayi ber-akte kelahiran (%)	94,25	96,45	95,6	97,91	98,45
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	59,58	81	45,27	48,14	105
4	Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim) (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan kartu keluarga (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%)	100	100	100	100	100
7	Informasi Administrasi Kependudukan (%)	71,70	85,50	95,50	99,00	99,00

Sumber: Dindukcapil, 2019

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2014–2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Posyandu aktif sejak tahun 2014 sd. 2017 sebanyak 1.225 buah, namun pada tahun 2018 bertambah 8 posyandu menjadi 1.233 posyandu. Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.59

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Kondisi Saat Ini				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PKK aktif (Unit)	309	309	309	309	309
2	Posyandu aktif (unit)	1.225	1.225	1.225	1.225	1.233
3	Persentase Posyandu Purnama Dan Mandiri (%)	46,85	47,75	47,75	46,6	59,7
4	% Lembaga Kemasyarakatan,	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Saat Ini				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Lembaga Adat yang telah diberdayakan (%)					
5	% Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif(%)	100	100	100	100	100
6	% swadaya masy thd program pemberdayaan masy (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masy (%)	100	100	85	85	85
8	%kadesyg telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)	100	100	100	100	100
9	Pembangunan kawasan pedesaan	0	1	1	1	2
10	Badan kerjasama antar desa	13	13	13	13	19

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Keluarga Berencana

Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Total Fertility Rate Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukkan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan daripembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan padapeningkatan kesertaan ber-KB serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraankeluarga. Peserta KB aktif di Kabupaten Rembang pada kurun waktu tahun 2014 sampaidengan tahun 2018 fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah peserta KB aktifmengalami kenaikan, namun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018secara umum mengalami penurunan yaitu sebesar 83,57% di tahun 2015 dan sebesar 80,02 % di tahun 2018.

Tabel 2.60
Peserta KB Aktif di Kabupaten Rembang Tahun 2014– 2018

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB aktif	Persentase
2014	135.081	111.777	82,75
2015	132.422	110.660	83,57
2016	124.537	112.121	83,34
2017	137.874	115.959	84,11
2018	135.480	108.389	80,02

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Tabel 2.61
Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Rembang Tahun 2014 – 2018

Tahun	Peserta KB aktif	PESERTA KB MKJP					
		IUD	MOW	MOP	IMPLAN	JUMLAH	%
2014	111.777	2468	2293	382	11902	17045	15,25
2015	110.660	2597	2173	347	13260	18377	16,61
2016	112.121	2805	2225	323	14781	20134	17,96
2017	115.959	3085	2300	304	17103	22792	19,66
2018	108.389	3.084	2.187	289	16.997	22.557	20,81

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Tabel 2.62
Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (Orang)	Unmet Need KB (%)
1	2014	135.081	10.676	7,90
2	2015	132.442	9.075	6,85
3	2016	134.537	9.004	6,76
4	2017	137.874	9.562	6,94
5	2018	135.460	13.286	9,81

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 75,42 % menjadi sebesar 99,54 % di tahun 2018. Sedangkan keaktifan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Kelompok Lansia (BKL) pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan keluarga bagi remaja dan lansia.

Tabel 2.63
Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2014 – 2018

Tahun	BKB			BKR			BKL		
	Jumlah	aktif	%	Jumlah	aktif	%	Jumlah	aktif	%
2014	594	448	75,42	266	234	87,97	267	232	86,89
2015	427	418	97,89	231	229	99,13	235	234	99,57
2016	420	419	99,76	250	250	100,00	252	252	100,00
2017	434	434	100,00	262	262	100,00	263	263	100,00
2018	434	432	99,54	262	260	99,24	265	261	98,49

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan keikutsertaan masyarakat ber-KB. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dari tahun 2014 cenderung menurun yaitu sebanyak 252 kelompok menjadi 138 di tahun 2018. Meskipun jumlah kelompok UPPKS yang aktif mengalami penurunan, namun persentase keaktifannya cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 68,48 % di tahun 2014 menjadi 95,17 % di tahun 2018.

Tabel 2.64
Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tahun 2014 – 2018

Tahun	Kelompok UPPKS		
	Jumlah	Aktif	%
2014	368	252	68,48
2015	203	192	94,58
2016	241	162	67,22
2017	145	141	97,24
2018	145	138	95,17

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

b) Keluarga Sejahtera

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Rembang pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 54,96 persen dan pada tahun 2018 sebesar 51,13 persen. Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014–2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Total fertility Rate (TFR)	1,86	2,07	2,05	2,07	2,07
2	Rasio akseptor KB /1000 PUS	827,48	825,23	837,05	841,11	800,2
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	100	100	100	120,89	123,04
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th	3,46	3,68	3,22	1,56	1,55
5	Cakupan PUSyg ingin ber-KB tdk terpenuhi (Unmet Need)	7,83	6,93	6,73	6,94	9,81
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 th) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	35	35	34	32	32
7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	82,75	83,57	83,61	84,11	80,02
8	Angka Drop out KB	14,19	13,62	12,08	8,72	7,27
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	keluarga di setiap desa/kelurahan					
10	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	54,96	54,64	51,94	50,46	51,13
11	Ratio PLKB / penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	4,39	4,52	4,98	4,98	6,12
12	Ratio PPKBD	100	100	100	100	100
13	% kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	100	100	100	100	100
14	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKSyg berKB	92,21	91,12	91,64	92,47	90
15	Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	91,97	92,12	89,89	89,56	100
16	Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	15,25	16,61	17,96	19,65	20,81
17	Cakupan Peserta KB Aktif Pria	1,14	1,14	1,14	1,21	1,11
18	Cakupan Tribina	91,42	83,80			

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

i. Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir. Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Terminal angkutan penumpang
2. Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia di Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati No.551-4/0984/2016 terdiri dari tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Dari tujuh terminal tersebut ada dua terminal yang potensial ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B maupun terminal tipe A sesuai dengan lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal yang potensial untuk ditingkatkan statusnya sesuai dengan rencana tat ruang wilayah adalah Terminal Rembang menjadi tipe A dan Terminal Lasem menjadi tipe B. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukannya,

meskipun masih memerlukan perbaikan. Sejak tahun 2014 belum ada perbaikan yang cukup signifikan untuk merevitalisasi terminal tipe C. Perbaikan hanya berupa pemeliharaan rutin terminal sehingga kinerja terminal dari tahun 2014 tetap dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumbersari Kragan, Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang. Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik (%)	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42	terminal tipe c dlm kondisi baik jml 5, dr 7 terminal tipe C
2	Tersedianya Terminal Angkutan penumpang pd setiap kab/ kota yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek	70	70	70	70	70	
3	peningkatan fasilitas parkir mobil barang	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
4	%sarpras perhubungan dlm kondisi baik	85	85				
5	jumlah angka kecelakaan di kabupaten rembang (kali)	418	408	470	456	391	data dari Satlantas
6	cakupan ketersediaan halte bus pada jaringan trayek	2	2	2	3	5	2018 tambah 2 unit
7	ketersediaan rambu rambu lalu lintas (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tdk ada penambahan
8	persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan						
	rambu (%)	67	67	67	67	67	2015-2018 tidak ada penambahan
	Marka(%)	63	65	6.3	23	11	terpasang/kebutuhan 10.000 *100 (2016-2018)
	guardrill (%)	35	35	35	35	11,6	terpasang/kebutuh

No	Uraian	Tahun					keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
							an 1232 *100 (2016-2018)
	LPJU (%)	5	5	5	1.056	5.25	terpasang/kebutuhan 13350 *100 (2016-2018)
	APPIL (%)	19	36	34,7	37,1	42,9	satuan unit Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (IPPL)
9	kelas akreditasi dari tempat uji sesuai SPM	n.a	n.a	n.a	C	C	
10	tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jltuk jaringan jalan kab/kota (unit)	925	1014	1014	1102	1105	
11	jml orang mll terminal/th/org	2.156.071	2.308.680		897.944	875.143	
12	rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 1 th)	64	68	61	69	0	Pindah ke DPMPSTSP naker 2018
13	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6436	6936	7705	8290	8903	
14	jumlah kendaraan yang telah melakukan uji (unit)	10616	11616	8196	9779	7864	
15	lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	90	90	55	55	55	
16	biaya pengujian kelayakan angkutan umum	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.00 0 KII: 32.00 0 KIII: 35.00 1	KI: 30.00 0 KII: 32.00 0 KIII: 35.00 2	KI: 30.00 0 KII: 32.00 0 KIII: 35.00 3	Perda No 6 2010, ganti tanda uji berkala Rp 5.000, ganti buku/dokumen lain uji berkala Rp 8.500, ganti label pemeriksaan emisi gas buang/ uji asap Rp 4.000, stiker samping Rp 12.000
17	% kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) (%)	90	98	90	95	98	
18	% kendaraan umum yg berada dalam kondisi laik jalan (%)	94	94	99	98	99	

Sumber: Dinhub, 2019

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun 2014-2018 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam

rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.67
Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Indikator kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
1	pelanggaran ijin trayek (kasus)	33	33	16	1	2
2	pelanggaran uji (kasus)	58	58	38	16	7
3	pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya (kss)	0	0	3	3	1
4	kendaraan bermotor wajib uji (unit)	6.436	6.936	7705	8290	8903
5	kendaraan bermotor yang di uji (unit)	10.616	11.616	8196	9779	7864
6	jumlah angkutan darat (unit)	925	1014	1014	1102	1105
7	Jml penumpang angkutan darat (orang)	2.156.071	2.156.071		897.944	875.143

Sumber: Dinhub, 2019

Kondisi pelayanan perhubungan terkendala dengan fasilitas alat uji yang masih menggunakan sistem analog. Mulai tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi human error pada proses pengujian. Kedepan untuk meningkatkan akreditasi tempat uji perlu ditingkatkan penggunaan teknologi digital sesuai dengan standar yang diperlukan. Termasuk dalam upaya pemantauan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, ke depan akan dikembangkan automated traffic control system. Sementara itu, perkembangan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya dapat diketahui dari proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.102 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 875.143 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2014-2018. Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Fasilitas Perhubungan	2014	2015	2016	2017	2018	Keterangan
1	Rambu 60 x60 cm	40	40	40	40	40	
2	Rambu 90 x90 cm	90	90	90	90	90	
3	Rambu model F	14	14	14	14	14	
4	RPPJ kecil 1 muka	48	48	48	48	48	
5	RPPJ besar 1 muka	4	4	4	4	4	
6	RPPJ besar 2 muka	1	1	1	1	1	
7	Warning Light Pijar	13	19	0	0	0	Ganti LED
8	Warning Light LED	11	11	0	0	6	
9	Traffic Light Pijar	3	3	0	0	0	
10	Traffic Light LED	1	1	0	1	1	

No	Fasilitas Perhubungan	2014	2015	2016	2017	2018	Keterangan
11	Guardrill (m)	140	140	0	0	144	
12	LPJU LED	62	62	3497	141	702	2016 dari ESDM
13	LPJU Solar Cell	12	12	0	0	0	
14	Marka (m2)	660	234	689	2300	1100	Zebra Cross & marka 1keg
15	Zebra Cross	2	2	0	0	0	
16	Shelter	2	2	2	1	2	
17	Paku Jalan	282	282	0	0	0	blm pernah pngadan

Sumber: *Dinhab, 2019*

Program rekatifikasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang telah tertampung dalam revisi Peraturan Menteri Nomor : 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, saat ini revisi tersebut masih dalam proses penetapan. Rencana pembangunan trase Kudus – Pati Rombang diperkirakan antara tahun 2021-2030 sedangkan untuk trase Cepu – Rombang diperkirakan antara tahun 2025-2030. Rencana reaktifasi kereta api yang merupakan program strategis pemerintah pusat akan memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk dalam tataran transportasi lokal (Tatralok). Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian trayek angkutan dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten Rombang sehingga seluruh angkutan penumpang dan barang dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan baik.

Pelabuhan Rombang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rombang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rombang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Pelabuhan Pengumpul. Sedangkan Pelabuhan Tasik Agung Rombang walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional hierarkinya sebagai pengumpan regional, namun kondisinya lebih layak sebagai pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan tersebut sudah tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan umum sehingga diarahkan sebagai pelabuhan perikanan pantai. Sedangkan Pelabuhan Rombang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang kedepan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan Republik Indonesia diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pengembangan Pelabuhan Rombang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan dapat menjadi pemicu bagipertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rombang dengan peluang kegiatan antara lain:

- Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan produk pertanian.
- Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor.

- Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
- Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

j. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Pelayann Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.69
Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah jaringan komunikasi	29	58	62	62	165
2	Jumlah penyiaran radio	13	13	14	14	14
3	Cakupan layanan SST	5.500	5.500	6.500	5.000	5.000
4	Jumlah aplikasi e-government di lingkup pemda kab/kota	15	20	20	20	22
5	% PD telah memiliki website (%)	86,97	86,97	100	100	100
6	Cakupan pengembangan & pemberdayaan klp informasi masy di tk kec	21	22	21	21	21
7	Jml Pelaksanaan Diseminasi & Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: Media massa(majalah,radio, teve); Media baru spt website (media online); Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;Media interpersonal spt sarasehan, ceramah & lokakarya; Media luar ruang spt media buletin, leaflet, booklet,brosur,spanduk, & baliho.	2	2	2	2	2
		Na	11	1	1	1
		1	1	1	1	1
		1	1	-	-	-
		2	2	2	2	2

Sumber: Dinkominfo, 2019

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabelberikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKMdi Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml UMKM (unit)	39.363	39.363	39.173	39.632	39.830
2	Jml LKM koperasi dan UKM (unit)	275	279	284	286	289
3	jml UMKM ygtlh mengikuti pameran promosi produk (unit)	5	6	NA	NA	NA
4	% koperasi aktif (%)	78,68	79,00	53,34	90,28	90,40
5	% KSP/USP koperasi sehat (%)	32,00	35,00	22,60	67,57	69,59
6	Cakupan bina kelompok UMKM	1.968	1.972	1.152	1.162	1.165
7	Jml Wirausaha Baru (buah)	5.463	5.112	140	312	198

Sumber: Dinperindagkop dan UMKM, 2019

Pada tabel diatas, koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan, yakni Jumlah wirausaha baru pada Tahun 2017 sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah, capaian yang kecil tidak menunjukkan kinerja yang buruk, karena jika dihitung total jumlah wirausaha baru dari Tahun 2014 berjumlah 11.225 buah.

I. Penanaman Modal Daerah

Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 7,173T, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya 2017 sebesar 5,722 T. Meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Rembang, memberikan multiplier effect kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Tenaga yang terserap pada tahun 2017 sebesar 7.016 orang, mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.910 orang pada tahun 2018. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil invstasi	1 profil investasi
2	Terselenggaranya fasilitasi pemdadm rangka kerjasama kemitraan	3	3	1	2	0
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kab	3	3	3	4	2
4	Terselenggara sosialssi kebijakn penanman modal kpdmasy dunia usaha.	3	3	9	9	1
5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10	20	28	41	78
6	Nilai investasi	646,8 M	3,478 T	5,172 T	5,28 T	7,71 T
7	Terslenggaranya yan perijinan & nonperijinan bid pennamn modal mlyan Terpadu Satu Pintudi bid Penanaman Modal.	100	100	100	100	100
8	Terselenggaranya bim pelksanan Keg Penanman Modal kpd masyarakat dunia usaha (%)	100	100	100	100	100
9	Sistem Pelayanan Informasi & Investasi scr Elektronik (SPIPISE) (%)	100	100	100	100	100
10	% kerjasama dibidang penanaman modal yg terlaksana (%)	18,51	37,03	50	90	90
11	% PMA/PMDN diKab Rembang yg taat aturan (%)	60	65	55	82,79	82,79
12	Tenaga kerja lokal yang terserap pada penanaman modal (orang)	2.672	7.742	7.784	7.016	10.910
13	% pengaduan yan perijinan & investasi yg ditindaklanjuti(%)	95	95	100	100	100

Sumber: DPMPTSPNaker,2019

m. Kepemudaan dan Olahraga

Selama kurun tahun 2011-2015 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara. Namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	KNPI	1	1	1	1	1
2	AMPI	1	1	1	1	1
3	Pemuda Ansor	1	1	1	1	1
4	Pemuda Muhammadiyah	1	1	1	1	1
5	Pramuka	1	1	1	1	1
6	KUPP/KWP (klp Wirausaha Pemuda)	22	22	22	22	22
7	KOSGORO	1	1	1	1	1
8	Rembang Bangkit Foundontion	1	1	1	1	1
9	Gerakan Pemuda Nusantara	1	1	1	1	1
10	Puma Prakarya Muda Indonesia	1	1	1	1	1
	Jumlah	31	31	31	31	31

Sumber: Dinbudpar, 2019

Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam even di tingkat karesidenan, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2018, medali di even tingkat Karesidenan mendapatkan 187 medali, sedangkan di even tingkat Provinsi mendapatkan 46 medali. Untuk tingkat nasional, kontingen dari Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan medali.

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Lapangan Sepak Bola	252	252	252	252	252
2	Lapangan Basket	46	46	46	47	47
3	Lapangan Volley	276	276	322	322	324
4	Lapangan Bulu Tangkis	38	38	38	38	38
5	Kolam Renang	2	2	2	2	2

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
6	Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna	19	19	19	19	19

Sumber: Dinbudpar, 2019

Adapun Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.74
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pemuda (orang)	138.863	150.955		
2	Jml anggota pasukan paskibraka (org)	76	76	76	76
3	Jumlah peserta TUB BB (orang)	20	20	20	20
4	Jmlpst Jambre Pemda Indonesia (org)	14	14	14	14
5	Jml peserta kemah bakti (kontingen)	14	14	14	24
6	Jml pemuda pelopor yg berprestasi di Tingkat provinsi (org)	8	10		
7	Jml Kewirausahaan pemuda yg mandiri (Usaha)	22	22	22	22
8	Jml OKP (organisasi Kepemudaan)	31	31	31	31
9	Jml kasus narkoba di kab Rembang (kss)	4	6	19	15
10	Jml tenaga pelatih yg terlatih (orang)	30	30	30	30
	Jml atlet yg terlatih (orang)	30	30	30	30
	Jml pengurus cabor yg terlatih (org)	10	10	10	10
11	Jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda Kab (Atlet)	-	200	226	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tkt Karesidenan (Atlet)	59	64	-	-
	jml atlet pelajar yg berprestasi di kejur Popda tingkat Provinsi (Atlet)	16	60	-	-
12	Jml club olahraga di tingkat pelajar	171	179	-	-
	Jml club olahraga di tk mahasiswa (club)	2	3		
	Jml club olahraga di masy (Club)	472	485		
13	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk Karesidenan	130	130		
	Jml atlet yg menerima penghargaan prestasi di tk provinsi	32	35		
	Jml atlet yg menerima penghargaan di tk nasional	2	5		
14	Jml lapangang olahraga milik Pemerintah Kabupaten Rembang	4	4	4	4
15	Jml gelanggang olahraga milik pemerintah kabupaten Rembang	3	3	3	3

Sumber: Dinbudpar, 2018

n. Statistik

Produk berupa buku statistik yang telah dihasilkan dan dipublikasikan selama kurun waktu 2014–2018 antara lain adalah Rembang Dalam Angka (setiap tahun); Buku

PDRB (setiap tahun); Kecamatan Dalam Angka; NTP; Profil Kependudukan, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Profil Ketenagakerjaan

o. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten/daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sampai saat ini pemanfaatan persandian di Kabupaten Rembang baru sebatas pada pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

p. Kebudayaan

Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65 km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir. Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Coket'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek – Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang. Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252 kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75

Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018

No.	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH (KELOMPOK)
1.	Kelompok Sanggar Seni Tari	12
2.	Musik tradisional	104
3.	Sanggar Seni Lukis	5
4.	Teater Tradisional	19
5.	Tari Tradisional/tayub	5
6.	Musik Modern	92
7.	Barongan	5
8.	Wayang Kulit	10

Sumber : Dinbudpar, 2019

Pada tahun 2018 kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik tradisional sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni tersebut secara keseluruhan masih belum maksimal dan ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas.

Tabel 2.76
Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & budaya (keg)	16	18	9	9	10
2	Jml klp kesnian tradisional (klp)	311	311	134	137	137
3	Jml cagar budaya yg dilestarikan (cagar budaya)	3	3	3	3	3
4	Jumlah Cagar budaya	47	47	47	47	107
5	Jumlah seniman (orang)	1.251	1.252	3.034	3.034	3.039
6	Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian)	18	18	20	20	11
7	Jumlah Museum	1	3	1	1	1
8	Jumlah Sanggar Budaya	2	2	1	1	1
9	Jml organisasi penghayat kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi)	13	13	11	11	10

Sumber: Dinbudpar, 2019

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Lain-lain
Sumber	3	3	1	1	1
Bulu	2	2	-	-	1
Gunem	-	1	3	-	-
Sale	1	1	1	-	-
Sarang	-	1	-	-	1
Sedan	-	-	-	-	-
Pamotan	1	1	-	-	-
Sulang	2	3	-	-	-
Kaliori	3	3	-	-	1
Rembang	2	5	-	-	1
Pancur	5	-	-	-	-
Kragan	1	2	-	-	-
Sluke	1	1	1	-	-
Lasem	5	3	1	-	1
2018	26	26	7	2	6
2017	23	23	5	2	-
2016	23	23	5	2	-
2015	23	23	5	2	-
2014	20	20	12	9	11

Sumber: Dinbudpar, 2019

q. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir terutama dialami pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah perpustakaan desa sebesar 61 meningkat menjadi 94 pada tahun 2018. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan fluktuatif, yaitu pada tahun 2014 sebesar 16.672 orang pengunjung menjadi 24.456 orang pengunjung di Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya minat baca pada masyarakat Kabupaten Rembang. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2014 sebesar 26.582 eksemplar meningkat menjadi sebesar 43.004 eksemplar pada tahun 2018.

Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet. Perkembangan pelaksanaan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml perpustakaan					
	Daerah (unit)	1	1	1	1	1
	Kecamatan (unit)	1	2	2	3	14
	Desa (unit)	61	61	61	65	94
	Masyarakat (unit)	19	21	30	40	45
	Keliling (unit)	1	1	1	1	1
2	% gedung perpustakaan dlm kondisi baik (%)	76,83	82,35	82,53	82,85	82,85
3	Angka kunjungan perpustakaan/th (org)	16.672	16.819	21.813	22.120	24,456
4	Cakupan naskah kuno yg dilstarikan (naskah)	270	270	275	277	278
5	Jml Koleksi buku yg tersedia di perpusda (buku)	26.582	30.182	34.697	41.045	43,004

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2019

r. Kearsipan

Di Kabupaten Rembang, pelaksanaan urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai back up data. Dalam pengelolaan dan penanganan arsip mempunyai tenaga arsiparis yng memiliki kompetensi hanya memiliki 2 arsiparis. sarana dan prasarana kearsipan cukup baik.

Dari keseluruhan peralatan kearsipan 80% dalam kondisi baik, begitu pula jumlah gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya

Dalam hal pengelolaan, pengelolaan arsip secara baku baru dilakukan 53,4% pada tahun 2018. Pengelolaan arsip juga dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan persentase, sampai pada tahun 2018, tercatat ada 82% desa/kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kearsipan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	% arsip yang dialih mediakan (%)	10 %	15 %	20%	25%	30%
2	Persentase arsip yang dimusnahkan (%)	2,4	2,5	30%	40%	50%
3	Jml arsiparis yang memiliki kompetensi	2	2	2	2	2
4	Jumlah pengguna arsip (PD)	34	34	36	36	45
5	Pengelolaan arsip secara baku (%)	29,7	31,9	38,29	46,3%	53,4%
6	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)	14,5	15	16	17	18
7	Persentase Desa/Kelur yg telah mengelola arsip secara baku (%)	43,5	52	54	70	82
8	% sarpras kearsipan dlm kondisi baik					
	Gedung (%)	65	70	70	80	80
	Ruangan (%)	65	70	70	80	90
	Peralatan (%)	50	60	60	70	80

Keterangan: PD = Perangkat Daerah

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2019

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya belum dimanfaatkan secara optimal baik budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan laut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk pengembangan perikanan budidaya tersebut. Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun potensi perikanan budidaya darat meliputi budidaya air tawar dan air payau. Namun demikian budidaya perikanan air laut secara geografis kurang memungkinkan karena berada pada Laut Jawa dan bukan merupakan wilayah kepulauan dengan air tenang.

Salah satu yang menjadi komoditas unggulan budidaya air payau adalah bandeng dan udang vaname, sedangkan komoditas air tawar adalah lele, nila, wader. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rembang mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya dari 2014-2018 dengan produksi pada tahun 2018 adalah 5.519.057 kg walaupun mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4.017.500 kg, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2017 yakni sebesar 6.318.110 kg.

b. Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang, mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2014–2018, pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 42.452.505 kg. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 65.523.652 kg, tetapi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 36.243.036 kg. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain cuaca yang tidak mendukung, yakni sering adanya ombak yang tinggi, serta kebijakan pelarangan nelayan cantrang untuk melaut, hal tersebut berpengaruh besar pada hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebar di berbagai desa yaitu Tunggulsari, Tanjungsari, Tasikagung I, Tasikagung II, Pasar Banggi, Pangkalan, Pandangan, Karanglincak, Karanganyar, dan Sarang.

c. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kabupaten Rembang memiliki potensi hasil kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Dapat ditunjukkan dengan produksi hasil olahan ikan beberapa tahun terakhir (2014-2018) yang sangat besar yaitu pada tahun 2014 sebanyak 210.024.000 kg walaupun mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebanyak 193.908.500 kg, kemudian mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2018 sebesar 193.908.600 kg.

Jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama beberapa tahun terakhir (2014-2018) mengalami penurunan, pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1.570 orang menjadi 1.531 orang pada tahun 2018. Meskipun jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang menurun, namun jumlah nelayan terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2014 sebanyak 20.718 orang menjadi 25.208 orang pada tahun 2018. Peningkatan jumlah nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dimana konsumsi perkapita Kabupaten Rembang 29 kg/kapita/tahun, masih di bawah target nasional yaitu 35 kg per kapita per tahun. Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan budidaya (kg)	4.017.500	7.477.000	7.190.232	6.318.110	5.519.057
2	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/bulan)	11.152.686	23.703.783	23.514.295	20.242.123	17.629.829
3	tk Cakupan binan klp pmbudidaya ikan(%)	32	32	33	33	34
	tk Cakupnbinaan klp pmbdidaya ikan (klp)	134	141	142	142	146
4	tk Ckupan bantuan klp	38	41	42	43	44

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	pembudidaya ikan(%) tk Ckupan bntuan klp pembudidaya ikan (Kelompok)	14	14	15	15	17
5	jml usaha pngolhn ikan (unit)	2.762	2.769	2.749	2.740	2.740
6	jml produksi hsl olahan ikan (kg)	210.024.000	212.035.000	203.957.400	193.908,500	193.908,600
7	Produksi perikanan tangkap (kg)	60.772.646	60.904.207	65.523.652	36.243.036	42.452.505
8	Rata-2 pendapatan nelayan (rp/bln)	1.593.728	1.657.150	1.627.373	1.375.931	1.357.307
9	Cakpan klp nlayan yg dibina (%) Ckupan klp nelayn yg dibina (klp)	66 23	68 24	71 25	71 25	74 26
10	tk cakupn bntuan klp tngkp ikan (%) tk ckupan bntuan klp tngkp ikan (klp)	66 23	68 24	71 25	71 25	74 26
11	Cakupan TPI dlm kondisi baik (unit)	10	10	10	10	10

Sumber: Dinlutkan,2019

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae. Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

d. Usaha Garam Rakyat

Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliore, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Adapun Perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.81

Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Luas lhn Produksi (Ha)	Jml Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
1	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-

No	Tahun	Luas lhn Produksi (Ha)	Jml Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
2	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-
3	2016	1.564,66	1.239	1.850	1.464,40	1.225.330,-
4	2017	1.579,89	1.144	3.160	93.490,56	161.592.370,-
5	2018	1.573,90	1.144	3.160	165.467	285.999.162,-

Sumber: *Dinlutkan, 2019*

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, tetapi perkembangan di tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, peningkatan jumlah produksi di tahun 2018 dikarenakan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator), harga garam juga mengalami peningkatan, sehingga nilai produksi di Tahun 2018 mencapai Rp. 286 M. Pemerintah harus mencari solusi produksi garam rakyat agar tidak terpengaruh musim sehingga produksi garam tetap bisa dilaksanakan walaupun pada musim hujan.

e. Pariwisata

Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata alam. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang tercatat sejumlah 8 buah obyek wisata unggulan, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Pantai Pasir Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Binangun, Pasujudan Sunan Bonang, dan Old Town Heritage.

Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tren peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.270.268 orang dan menjadi 1.460.808 orang pada tahun 2017 lalu kembali meningkat menjadi 1.810.369 di Tahun 2018. Tujuan wisata bagi wisatawan adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini. Naiknya kunjungan wisata pada tahun terakhir dikarenakan semakin banyaknya obyek wisata baru yang dikelola desa dan semakin berkembang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.459.662.385,00 atau memberikan kontribusi sebesar 2,12% terhadap PAD tahun 2018. Pengembangan kepariwisataan semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan pusat perekonomian. Secara rinci Perkembangan Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82

Perkembangan Urusan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Kunjungan Wisman & Wisnus (orang)	993.363	727.453	1.270.268	1.460.808	1.810.369
2	Persentase obyek wisata yg dipromosikan (%)	5	5	13,3	14,3	18,1
3	Rata-rata lama menginap (hari)	1	1	1,28	1,21	1,3

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4	Dokumen RIPARDA kab Rembang (dokumen)	1	1	1	1	2
5	Jumlah obyek wisata unggulan (obyek)	3	3	3	3	3
6	jumlah restoran (unit)	25	29	29	29	29
7	Jumlah hotel Berbintang & Non bintang (unit)	20	21	21	21	22
8	Persentase pramuwisata bersertifikat					
	Muda (%)	4	4	na	na	4

Sumber: *Dinbudpar, 2019*

Perkembangan total kunjungan wisman dan wisnus pada tahun 2014 s/d 2018 mengalami kenaikan secara drastis karena mulai bermunculan obyek-obyek wisata desa sesuai potensi yang dimiliki dan seringnya digelar acara-acara hiburan di obyek wisata sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Destinasi pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat desa, belum dikenai retribusi kecuali biaya parkir dan pengelolaannya masih bersifat tradisional.

f. Pertanian

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,63% atau seluas 29.021 hektar, lahan bukan sawah sebesar 51,85% atau seluas 52.561 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 19,52% atau seluas 19.826 hektar. Lahan sawah masih terbagi menjadi 28,12% atau seluas 8.160 Ha untuk lahan sawah irigasi dan 71,88% atau 20.861 Ha untuk sawah tadah hujan. Daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang salah satunya adalah adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyen. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi.

Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang teraliri irigasi adalah 16.935 Ha dan telah memiliki embung sejumlah 194 embung meningkat dari Tahun 2016 sebesar 189 embung. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah. Apabila dikaitkan dengan target LP2B Kabupaten Rembang seluas 37.339 Ha maka luasan sawah beririgasi tersebut baru mencapai 45,35 % dari target LP2B. Mengingat kondisi air di Kabupaten Rembang yang masih mengandalkan curah hujan maka target LP2B tersebut sangat sulit terwujud.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rembang meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman pangan utama terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi tanaman utama jenis padi pada tahun 2018 sebesar 220.440 ton, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 240.374ton. Produksi jagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, tetapi perkembangan tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017sebesar 143.692ton menjadi sebesar 110.912 ton pada tahun

2018. Sementara dalam periode yang sama produksi kedelai juga mengalami fluktuasi, tetapi produksi kedelai di Tahun terakhir yakni tahun 2018 lebih tinggi sebesar 2.684 ton dari tahun 2017 sebesar 2.039 ton. Walaupun perkembangan terakhir meningkat, tetapi capaian produksi kedelai di tahun 2017 masih rendah dibawah capaian produksi tahun 2015 sebesar 3.544 ton, tahun 2014 sebesar 5.570 ton dan tahun 2013 sebesar 4.972.

Jenis tanaman hortikultura meliputi bawang merah, cabe besar, nanas, mangga dan durian. Produksi tanaman hortikultura didominasi oleh jenis buah mangga dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 512.710 kwintal dan cabe yang mencapai 79.693 kwintal. Produksi hasil perkebunan terdiri dari tebu, tembakau dan kelapa dalam. Dari hasil perkebunan, produksi paling tinggi dihasilkan dari tebu yang mencapai 31.388 ton pada tahun 2018. Data perkembangan produksi pertanian/perkebunan Tahun 2014-2018 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Tahun	Jenis Komoditas		
	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
2018	220.444	110.912	2.684
2017	240.374	143.692	2.039
2016	152.822	119.348	1.620
2015	256.211	111.145	3.544
2014	183.002	128.389	5.570

Sumber: Dintanpan, 2019

Tabel 2.84

Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Tahun	Jenis Komoditas		
	Bawang Merah (Kw)	Cabe (Kw)	Mangga (Kw)
2018	13.719	79.693	512.710
2017	20.654	156.061	874.177
2016	18.803	58.567	1.136.034
2015	25.378	265.172	661.802
2014	12.838	121.951	1.244.061

Sumber: Dintanpan, 2019

Tabel 2.85

Perkembangan Produksi Perkebunan di Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018

Kecamatan	Jenis Komoditas		
	Tebu Gula Kristal (Ton)	Tembakau (Ton)	Kelapa (Ton)
2018	31.388	14.032	4.207
2017	28.778	6.763	3.659
2016	29.648	5.100	4.214
2015	28.816	2.804	4.039
2014	27.444	3.000	4.012

Sumber: Dintanpan, 2019

Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Rembang dilakukan melalui promosi produk. Tercatat selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, promosi produk pertanian/perkebunan dilakukan 3 kali setiap tahunnya, tetapi di tahun 2016, 2017 dan 2018 pelaksanaan promosi hasil pertanian dan perkebunan dilaksanakan 4 empat event (di Kabupaten Rembang sendiri dan event di kabupaten sekitar maupun di tingkat Provinsi/ Nasional. Sedangkan untuk promosi produk peternakan dilaksanakan 2 kali setiap tahun pada tahun 2017 dan 2018. Perkembangan Upaya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.86

Perkembangan Promosi Hasil Produksi Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan	3	3	4	4	4
2	Promosi produk peternakan (event)	1	1	2	2	2

Sumber: Dintanpan, 2019

Peningkatan produksi pertanian juga dilaksanakan melalui pembinaan kelompok tani dan penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian, Alat mesin pertanian di tahun 2016 bertambah sangat banyak sejumlah 12.331 alat, karena ada pengadaan mesin perontok padi manual, dibandingkan dengan pengadaan alat pertanian di tahun 2015 hanya sejumlah 220 alat mesin. Sedangkan di tahun terakhir (2017) pengadaan alat mesin pertanian oleh dintanpan berjumlah 724 alat. Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.87

Perkembangan Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produktivitas padi (ton/ha)	4,61	6,10	4,02	4,47	5,51
2	Bertambahnya plk usaha pertanian, perkebunan, peternakan (plk usaha)	115	158	560	632	648
3	Peningkatan luas lahan pertanian yang teraliri Irigasi (Ha)	1.850	5.500	15.865	18.815	16.935
4	Bertambahnya alat mesin pertanian tuk kelompok tani (Unit)	107	220	12.331	724	
5	Bertambahnya jalan pertanian dalam kondisi baik (Km)	60	28	38,74	54,82	50,48

Sumber: Dintanpan, 2019

g. Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Rembang yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi sawah, jagung dan kedelai dalam kurun waktu lima tahun (2014-2018) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2014-2018. Produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kacang tanah (ton)	3.234	2.303	1.672	1.442	530
2	Kacang hijau (ton)	2.977	2.238	1.393	924	1.005
3	Ubi kayu (ton)	129.330	106.296	116.272	97.152	43.383
4	Ubi jalar (ton)	6.569	2.219	1.480	3.138	1.051

Sumber: Dintanpan, 2019

h. Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Rembang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangan cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Rembang. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain Tebu, Kelapa, Wijen dan Mete. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tebu (ton)	40.897	41.039	44.055	43.778,4	45.420
2	Kelapa (ton)	4.021	4.039	4.213,98	3.658,96	4.207,18
3	Wijen (ton)	48,98	49,23	35	45	37,66
4	Mete (ton)	109,75	112,28	398,79	190,36	190,34

Sumber: Dintanpan, 2019

i. Peternakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing-masing daerah. Peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Rembang masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat.

Jenis ternak di Kabupaten Rembang terdiri dari Sapi potong, Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Kelinci. Populasi Komoditas peternakan selama lima tahun terakhir (2014-2018) mengalami fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018 yaitu sapi potong. Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di

Jawa Tengah, populasi sapi potong pada tahun 2018 mencapai 134.602 ekor dan menempati urutan keempat di Jateng. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Perkembangan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Populasi komoditas peternakan utama (ekor)					
	- Sapi potong	120.934	128.123	130.610	132.388	134.602
	- Kambing	150.062	158.990	162.091	161.794	163.894
	- Domba	123.999	156.725	157.771	157.680	160.368
2	produksi daging (kg)					
	- Sapi	1.215.270	917.007	864.415	777.031	700.990
	- Kambing	135.585	146.433	171.310	169.805	169.573
	- Domba	58.560	76.832	83.946	110.512	92.554
3	Jumlah produksi Telur					
	- Ayam (kg)	618.780	1.468.689	552.969	990.444	1.147.650
	- Itik (kg)	914.784	855.849	910.659	893.628	893.628

Sumber: Dintanpan, 2019

j. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebesar 13,5%, dan merupakan kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014-2017, 13,68% (tahun 2014 dan 2015), 13,5% (tahun 2016 dan 2017). Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari tahun ke tahun tapi belum mampu menaikkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang.

Nilai ekspor Kabupaten Rembang selama kurun waktu lima tahun 2014-2018, yaitu sebesar \$18.983.364,60 (tahun 2014), meningkat menjadi \$62.142.857,14 (tahun 2018). Disamping itu ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2014-2018. Adapun perkembangan sektor perdagangan tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Perkembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jml sidang tera ulang (kss)	44	44	72	77	80
2	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi (unit)	52	52	60	65	68
3	%kssyg diselesaikan mlunit yan pngduan konsumen (%)	2	2	4	4	5
4	Ketersediaan info pantauan hrg pokmas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
5	Jml promosi dagang yang diikuti (kali)	1	1	1	1	1
6	Nilai Ekspor	\$18.983.36 4,60	\$18.983. 364,60	\$37.190. 000,00	\$48.785.45 1,29	\$62.142.8 57,14
7	Kntribusi sekr dagangthdp PDRB (%)	13,68%	13,68%	13,5%	13,5%	NA
8	Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina (kelompok)	16	16	17	19	20
9	Jml pasar daerah (unit)	12	12	12	13	15
10	Jml pasar daerah yg memenuhi kriteria pasar sehat (uni)	12	12	12	13	15
11	Lokasi PKL yg tertata (lokasi)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinperindagkop dan UMKM, 2019

k. Perindustrian

Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri menengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain. Secara rinci perkembangan sektor industri di Kabupaten Rembang tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan IKM yang dibina (%)	1,1	1,1	4	5	2,53
2	Cakupan klp IKM ygmdpt bantuan (%)	100	100	0,15	1	2,55
3	Kontribusi sektor Industri thdp PDRB (%)	20,84	20,84	21,27	21,8	NA
4	% industri kecil & menengahthdtotal jml industri (besar, menengah & kecil)	99	99	99	98	98,20
5	Jml IKM ygdpt fasilitasi Perijinan	25	25	15	15	9
6	Jml IKM ygtlh mengikuti pameran promosi produk	12	12	15	260	280
7	Pertumbuhan IKM (%)	2,76	1	1,17	0,66	2,14
8	Jmlfasilitas peningkatan kemampuan teknologi	13	13	9	10	2,14

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	industri					
9	Jumlah klaster industri	8	9	9	9	9
10	Jumlah sentra industri	37	37	33	40	9

Sumber Data : Dinperindagkop dan UMKM, 2019

I. Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

2.1.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a. Kepegawaian

Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 tercatat sebanyak 8.271 orang yang terdistribusi pada 39 unit badan/dinas/lembaga termasuk di dalamnya instansi vertikal. Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki 5.034 orang (57,25%) dan perempuan sebanyak 3.759 orang (42,75%). Berdasarkan pengelompokan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 38,54%, Golongan IV sebanyak 34,93% sa Golongan I sebesar 3,33% dan Golongan II sebesar 23,20%.

Kualitas sumberdaya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana (72,8%) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang berpendidikan perguruan tinggi, dengan perincian lulusan program diploma sebesar 25,68%; pendidikan sarjana sebesar 45,55% dan sebanyak 1,57% telah menyelesaikan pendidikan magister (S-2). Sementara itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 27,2% saja. Dengan demikian maka diharapkan pendidikan aparatur akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat serta kalangan dunia usaha. Upaya peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selengkapnya Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93

Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Program Pendidikan Kedinasan					
1	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim II	1	2	8	-	-
2	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim III	1	-	11	8	7
3	Jml Aparatur yg mengikuti Diklat Pim IV	40	40	1	4	2
4	Jml PNS mengikuti Diklat Teknis tiapth	82	192	264	129	93

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
1	% PNS yg kenaikan pangkatnya tepat waktu	99.56%	94.70%	99%	99%	100%
2	jml PNS Pensiun setiap tahun	136	136	-	-	304
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	9.09	75	14	3	14

Sumber: BKD, 2019

Gambaran kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pelaksanaan program-program peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, adalah sebagai berikut:

1. Program pendidikan kedinasan;
2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan melalui berbagai diklat. Kegiatan Diklat Aparatur rata-rata mencapai 336 orang aparatur yang telah memenuhi kualifikasi dan prosedur pengajuan. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi.

Selain menyelenggarakan diklat, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BKD bertugas untuk menyusun regulasi standar kompetensi pegawai dan manajemen talenta. Standar Kompetensi pegawai meliputi penyusunan regulasi standar kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi managerial. Manajemen talenta meliputi Asessment Pegawai, pemetaan asessment pejabat Eselon II dan III dan tindak lanjut asessment. Kedua hal tersebut akan diupayakan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara lengkap Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Perkembangan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1
b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda	1	1	1	1	1
c) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dg Perbup	1	1	1	1	1
d) %Penjabaran Program RPJMD dlm RKPD	78	80	78	88	87

Sumber: Bappeda, 2019

c. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan (Litbang) yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Perencanaan Kelitbangan, Jurnal Penelitian, Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan, Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kabupaten Inovasi dan Daya Saing Daerah, serta Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil Litbang dan Inovasi dalam perencanaan, kebijakan, pembangunan maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

d. Pengawasan

Sebagai gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah melaksanakan dua (2) program yang terkait dengan sistem pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, yaitu:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
2. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat di Kabupaten Rembang Tahun 2014–2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml Laporan hsl Pemeriksaan (LHP) Reguler	240	100	144	240	136
2.	Jumlah LHP Khusus/Kasus	93	63	141	101	97
3.	Jml hsl tindak lanjut temuan hsl pengawasan yg telah disusun	240	160	160	180	192
4.	% Rekomendasi Hsl Pemeriksaan ygsdh selesai ditindaklanjuti	81,3	80	92	83,9	52,9
5.	Lap hsl Monitoring Penyelenggaraan Urusan pemdes	96	84	13	-	-
6.	Laporan Hasil Reviu LKPD	1	1	1	1	1
7.	Laporan Reviu LKJIP Kabupaten	1	1	1	1	1
8.	Laporan Evaluasi LKJIP PD	12	24	-	16	16
9.	Koordinasi Pengawasan Secara komprehensif di Kabupaten Rembang	1	1	1	1	1
10.	Jml tenaga pemeriksa yg menguasai teknik was&penilaian akuntabilitas kinerja (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) & Pengawas Penyeleng Urusan Pem di Daerah (P2UPD)):					
	a. JFA	-	8	7	7	8
	b. P2UPD	-	6	6	5	5
11.	Level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Rembang	1	1	1	2	3

Sumber: Inspektorat, 2019

e. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Rembang, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS

Dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang terus melaksanakan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabelberikut ini.

Tabel 2.96
Nilai SAKIP Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
1	Perencanaan Kinerja	30	20,59	19,29	18,92	19,59	19,91
2	Pengukuran Kinerja	25	8,75	9,06	10,02	11,47	14,11
3	Pelaporan Kinerja	15	7,60	9,28	10,26	10,15	10,20
4	Evaluasi Kinerja	10	5,07	4,91	4,78	5,09	5,29
5	Capaian Kinerja	20	8,27	8,04	8,50	8,75	9,12
	Nilai SAKIP	100	50,28	50,59	52,49	55,04	58,64
			CC	CC	CC	CC	CC

Sumber : *Bagian Organisasi Setda, 2019*

Berdasarkan Tabel diatas diketahuijumlah score SAKIP Kabupaten Rembang dari Tahun 2014 sampai 2018 terus mengalami peningkatan namun nilainya masih yaitu CC.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan daerah untuk memastikan bahwa pencapaian target-target jangka pendek dan menengah lebih berorientasi pada *outcome*, dan meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD serta menerapkan manajemen

kinerja sekaligus budaya kinerja. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Rembang juga melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.97
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah UPP yang melakukan pengukuran IKM	Keterangan
2014	8 UPP	Nilai Rata-rata 76,20 (Kategori Baik)
2015	14 UPP	Nilai Rata-rata 73,58 (Kategori Baik)
2016	14 UPP	Nilai Rata-rata 73,12 (Kategori Baik)
2017	14 UPP	Nilai Rata-rata 76,86 (Kategori Baik)
2018	14 UPP	Nilai Rata-rata 77,81 (Kategori Baik)

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2019

Berdasarkan Tabel 2.97 terlihat bahwa Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, yakni sebanyak 8 UPP pada tahun 2014 meningkat menjadi 14 UPP pada tahun 2018, dimana nilai pengukuran pada setiap tahunnya berada pada nilai rata-rata dengan kategori baik.

f. Sekretariat DPRD

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan rincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut: Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PDIP dan Nasdem sebanyak 8 anggota; Fraksi PKB sebanyak 6 anggota; Fraksi Gerindra sebanyak 5 anggota; Fraksi Karya Sejahtera sebanyak 4 anggota dan Fraksi Harapan sebanyak 4 anggota. Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Rembang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, terutama fasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010–2015, adalah sebagai berikut:

- a. Program penyusunan peraturan perundangan;
- b. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD;
- c. Program fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD;
- d. Program konsultasi publik.

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.98
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No	Program / Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Perda yang ditetapkan	9	8	9	16	9
2	Perda yang disetujui DPRD	9	8	9	16	9
3	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	3	16	11	16	9
4	% Capaian Prolegda (%)	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya fungsi Pengawasan DPRD (kali)	30	30	57	120	110
6	Tersedianya Tenaga Ahli untuk DPRD	7	7	7	8	9
7	Terselenggaranya rapat- rapat DPRD diluar pembahasan perda (kali)	64	100	153	123	105
8	Terselenggaranya pendalaman tugas, orientasi dan pengembangan SDM (kali)	9	8	7	8	6

Sumber: Sekretariat DPRD, 2019

Berdasarkan Tabel 2.98 terlihat bahwa rata-rata jumlah perda yang disetujui maupun yang ditetapkan pada tahun 2014 hingga 2018 sejumlah 9 buah perda, dengan jumlah perda yang ditetapkan maupun disetujui tertinggi berada pada tahun 2017 yakni sebanyak 16 perda.

2.1.4. Aspek daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.99
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Metode Baru) (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang	9 013,01	10.903,96	13.191,65	14.510,82	15.961,89

Sumber: BPS 2019

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

a. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinhubkominfo Kabupaten

Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas yang berkeselamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang.

b. Ketaatan Terhadap RTRW

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang.

c. Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi menjadi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas 869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor pantura yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

d. Luas Wilayah Kebanjiran

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber.

e. Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Di Kabupaten Rembang berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.

g. Pariwisata

1. Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2014 rumah makan di Kabupaten Rembang berjumlah 23 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 31 buah tenaga kerja di rumah makan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 230 orang.

2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 21 buah. Terdiri dari 1 hotel bintang dan 20 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

3. Utilitas Publik

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung-embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.100
Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Item	2014	2015	2016	2017	2018
1	Air minum %	70	80,34	84,27	84,68	85,66
2	Sanitasi (dasar) %	71,25	77,42	79,98	80,64	100*
3	Persampahan %	20,4	20,7	21,2	21,9	23,5

*. Capaian sanitasi dasar berdasarkan cakupan desa ODP versi STBM

Sumber: DPKP Tahun 2019

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

a. Angka Kriminalitas

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal semakin menunjukkan peningkatan hingga menapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan

tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.101
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal		
		Kasus	Tertangani	Rasio
1	2014	52	32	61,5
2	2015	84	81	96,4
3	2016	21	19	90,4
4	2017	96	87	90,6
5	2018	57	57	100

Sumber: Polres Rembang, 2019(data diolah)

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

b. Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Rembang. Keberadaan pelayanan perijinan terpadu diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi atau berusaha. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari PP Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem OSS (Online Single Submission), maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Rembang telah melakukan inovasi dengan menindaklanjuti menerapkan sistem OSS untuk pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang. Sistem OSS ini dapat diakses secara daring dan terintegrasi di semua kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rembang meliputi semua ijin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta pelayanan perijinan diluar OSS seperti fasilitasi ijin pertambangan, ijin trayek, ijin penyelenggaraan reklame, ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, ijin alih fungsi lahan, dan lain-lain, dengan jumlah total pelayanan sekitar 100 jenis pelayanan perijinan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai dari 5 s.d. 10 hari. Lebih rinci Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.102
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

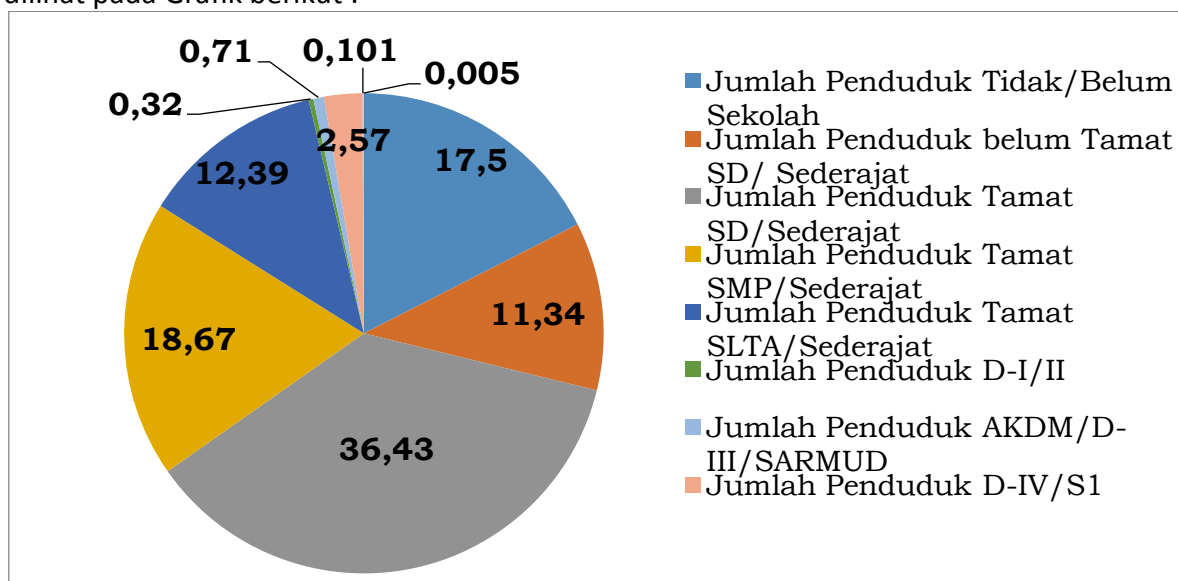
No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
2	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
3	SIUP	5 hari
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 hari
5	fasilitasi ijin pertambangan	1 bulan
6	ijin trayek	5 hari
7	ijin penyelenggaraan reklame	5 hari
8	ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini	5 hari
9	ijin alih fungsi lahan	1 bulan.

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019

c. Fokus Sumber Daya Manusia

Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada Grafik berikut :



Sumber Dindukcapil Kab.Rembang Tahun 2018

Grafik 2.20

Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terakhir kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta 3.

d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang, inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. Rembang diarahkan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat, diantaranya yaitu :

a) Istri Mantab (Industri Rumahan (IR) – Mantab)

Industri Rumahan (IR) atau Istri Mantab (Industri Rumahan Mantab) merupakan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka memberdayakan perempuan miskin untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan berdasar pada pertimbangan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, merupakan wilayah pengembangan pariwisata dan industri, serta perempuan berpotensi menambah penghasilan keluarga, maka melalui Inovasi Istri Mantab dengan memberdayakan kaum perempuan yang kurang mampu, maka diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan laporan perkembangan data jumlah pelaku Industri Rumahan pada tahun 2016 sebanyak 201 orang, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 1.288 orang. Replikasi pengembangan IR desa binaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 2 desa dan pada tahun 2018 menjadi 18 desa. Disamping itu juga jumlah IR tersebut mengalami kenaikan status pada tahun 2016 jumlah IR 1 sebanyak 119 orang dan IR 2 sebanyak 31 orang, tahun 2017 IR 1 sebanyak 86 orang, IR 2 sebanyak 48 orang dan IR 3 sebanyak 13 orang, serta IR yang mempunyai ijin usaha yang semula pada tahun 2016 tidak ada, sedangkan pada tahun 2017 yang telah mempunyai ijin usaha sebanyak 43 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 154. Jejaring pengelolaan IR dilakukan oleh :

- 1). Pemerintah (pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pendampingan melalui sinergi oleh seluruh OPD terkait)
- 2). Pemerintah Pusat (pelatihan, dan pendampingan)
- 3). Swasta (Fasilitasi dan pembinaan melalui CSR, perbankan dan kemitraan).
- 4). Desa (Dana Desa, pelatihan dan kerjasama dengan BUMDes)
- 5). PKK (Pembinaan)
- 5). Akademisi (KKN Tematik, Mou dengan 9 Perguruan Tinggi).

Adapun laporan perkembangan jumlah pelaku Industri Rumahan sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Laporan Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Rumahan Kabupaten Rembang Kondisi sampai dengan Tahun 2018

NO	DESA – KECAMATAN	JUMLAH PELAKU INDUSTRI RUMAHAN (Orang)		
		TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Desa Tri Tunggal, Kec. Rembang	39	57	98
2.	Desa Pasar Banggi, Kec. Rembang	111	128	219
3.	Desa Meteseh, Kec. Kaliiori	0	0	26
4.	Desa Babagan, Kec. Kaliiori	0	0	15
5.	Desa Ringin, Kec. Pamotan	0	0	90

NO	DESA – KECAMATAN	JUMLAH PELAKU INDUSTRI RUMAHAN (Orang)		
		TAHUN		
		2016	2017	2018
6.	Desa Bangunrejo, Kec. Pamotan	0	0	148
7.	Desa Ronggomulyo, Kec. Sumber	0	0	72
8.	Desa Waru Gunung, Kec. Bulu	0	0	21
9.	Desa Panohan, Kec. Gunem	0	0	49
10.	Desa Tahunan, Kec. Sale	0	0	140
11.	Desa Bonjor, Kec. Sarang	0	0	18
12.	Desa Bogorejo, Kec. Sedan	0	0	33
13.	Desa Kemadu, Kec. Sulang	0	0	123
14.	Desa Criwik, Kec. Pancur	0	0	22
15.	Desa Woro, Kec. Kragan	0	0	44
16.	Desa Manggar, Kec. Sluke	0	0	39
17.	Desa Gowak, Kec. Lasem	0	0	17
18.	Desa Waru, Kec. Rembang.	0	0	109
	Jumlah	150	520	1.283

Sumber: Dinperindakop UMKM, 2019

b) Pendampingan OPD kepada Desa Prioritas Kemiskinan (Desa Merah)

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang, juga telah dilakukan inovasi melalui sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh semua OPD terkait. Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 050/1538/2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Organisasi Perangkat Daerah Pendamping Di Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2019.

Tabel 2.104

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendamping Desa Prioritas PenanggulangaKemiskinan di Kabupaten Rembang tahun 2018 – 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DESA DAMPINGAN
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	1).Desa Gambiran Kec. Pamotan 2).Desa Tahunan Kec. Sale
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Desa Bonjor Kec. Sarang
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	1).Desa Woro Kec. Kragan 2).Desa Lodan Kulon Kec. Sarang
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	1).Desa Ringin Kec. Pamotan 2).Desa Meteseh Kec. Kaliori
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	1).Desa Menoro Kec. Sedan 2).Desa Karangasem Kec Bulu
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rembang	1).Desa Sumberjo Kec. Rembang 2).Desa Soditan Kec. Lasem
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Desa Waru Kec. Rembang
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Desa Sulang Kec. Sulang
9.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	1).Desa Sidorejo Kec. Sedan 2).Desa Jatihadi Kec. Sumber
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Desa Karangharjo Kec. Kragan

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DESA DAMPINGAN
11.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	1).Desa Doropayung Kec. Pancur 2).Desa Tegaldowo Kec. Gunem
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Desa Bendo Kec. Sluke.

Sumber : Dinpermades, 2019

c) Kamalia Merekah (Koin Amal Lansia Bagi Mereka yang Rentan Menjadi Berkah)

Kamalia Merekah dimulai pada tahun 2018 juga merupakan Inovasi Pemkab. Rembang dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada lansia terlantar. Bantuan diberikan kepada lansia terlantar setiap bulan sebesar angka garis kemiskinan di Kabupaten Rembang. Kamalia Merekah yaitu Koin Amal Lansia Bagi Mereka Menjadi Berkah adalah gerakan mengumpulkan koin oleh Pemkab. Rembang OPD bersama BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, serta lembaga sosial seperti BAZNAS dan lainnya, yang ada di Kabupaten Rembang. Adapun laporan Kamalia Merekah dan Instansi/Lembaga Pengasuh Lansia Terlantar Kabupaten Rembang Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.105
Laporan Kamalia Merekah dan Instansi/Lembaga Pengasuh Lansia Terlantar Kabupaten Rembang Tahun 2018

NO	INSTANSI/LEMBAGA PENGASUH LANSIA TERLANTAR	JUMLAH LANSIATERLANTAR(Orang)
1	PT. Semen Gresik/PT. Semin Indonesia (SI)	36
2	PD. BPR BKK Lasem	10
3	KSP Bhina Raharja	5
4	OPD melalui BAZNAS	19
5	Bank Jateng Cabang Rembang	5
6	BAPPEDA Kabupaten Rembang	3
7	DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	3
	Jumlah	81

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Pemkab. Rembang juga telah melakukan kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pendampingan program penanggulangan kemiskinan melalui inovasi kegiatan kemitraan dan kerjasama KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Mahasiswa Perguruan Tinggi di Desa Prioritas Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Kegiatan kemitraan dan kerjasama KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dan telah dilakukan Mou dan perjanjian kerja sama untuk selama 5 tahun mendatang, dengan 8 perguruan tinggi. Adapun laporan pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Desa Prioritas Kemiskinan di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.106
Laporan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Desa Prioritas Kemiskinan
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

NO	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DESA PRIORITAS KEMISKINAN LOKASI KKN TEMATIK	
		TAHUN	
		2018	2019
1.	IPB (Institut Pertanian Bogor)	6	7
2.	UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta	1	3
3.	UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang	21	21 x 2 periode
4.	UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang	6	10
5.	UMK (Universitas Muria Kudus)	14	14
6.	INSUD (Institut Pesantren Sunan Drajat) Lamongan	13	13
7.	STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) AL Anwar Sarang	6	12
8.	UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) Surakarta	0	8

Sumber : Bappeda, 2019

Selanjutnya secara keseluruhan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dapat kami sajikan 3 bentuk inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi :

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang bertujuan membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan perbaikan kualitas pelayanan kerja aparatur, sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih efisien dan berkualitas. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari 32 sistem yang eksisting sampai akhir 2018, yang terdiri dari 12 SIM Tata Kelola Pemerintahan dan 10 SIM Pelayanan Publik. Adapun perkembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Rembang yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Daftar Inovasi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Inovasi	Instansi - Keterangan
1.	JDIH	Bag. Hukum, website informasi produk hukum Pemkab. Rembang
2.	Produk Hukum	Bag. Hukum, SIM pengelolaan dan pelayanan penyusunan produk hukum Pemkab. Rembang
3.	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)	Dinarpus, SIM pelayanan informasi arsip Daerah.
4.	E-Retribusi Pasar	Dinperindagkop dan UMKM, SIM pengelolaan dan pelayanan pembayaran retribusi pedagang pasar.
5.	Sistem Penataan naskah dinas & arsip sekretariat DPRD	Setwan, SIM pengelolaan dan penataan naskah dinas & arsip sekretariat DPRD
6.	SIP@NDU (Sistem Informasi Perencanaan Terpadu)	Bappeda, SIM pengelolaan perencanaan

		pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
7.	E-presensi	BKD, SIM pengelolaan presensi daftar hadir pegawai Pemkab Rembang
8.	SIMDA Keuangan	BPPKAD, SIM pengelolaan keuangan, penyusunan RKA – DPA dan pelaporan keuangan
9.	SIMDA BMD	BPPKAD, SIM pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset
10.	SISMIOP	BPPKAD, SIM pengelolaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
11.	SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	BPPKAD, SIM pengelolaan pajak daerah (Pajak Hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineba, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Rumah Dinas dan Retribusi Sewa Tanah)
12.	E-BPHTB	BPPKAD, SIM pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : Bappeda, 2019

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efisien, serta dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum, serta dalam rangka membantu masyarakat dalam pengembangan potensi-potensi daerah dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Adapun perkembangan Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Inovasi	Instansi - Keterangan
1.	rembangkab.go.id	Dinkominfo, Website Pemerintah Kabupaten Rembang, berisi informasi tentang hasil pembangunan Kabupaten Rembang
2.	SI LINCAH (Sistem Layanan Informasi Nyaman Cepat Akuntabel dan Hemat)	Dinkominfo, SIM Layanan informasi keterbukaan publik yang lebih cepat.
3.	ARJUNO (Aplikasi Rujukan ke RSUD dr. R. Soetrasno)	RSUD, SIM layanan rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD dr. R. Soetrasno.
4.	E-KIR (Elektronik KIR)	Dinhub, SIM layanan KIR kendaraan.
5.	BKO (Bursa Kerja Online) Job Fair	DPMPTSPNaker, SIM layanan pencari kerja ke perusahaan.
6.	Enjoy Rembang	Dinbudpar, SIM-aplikasi layanan informasi tentang promosi pariwisata Kabupaten Rembang.

7.	Kresno (sistem nomor antrian online)	RSUD, SIM layanan antrian pasien secara online di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
8.	Pulang Gratis	RSUD, pelayanan antar pasien pulang gratis.
9.	Website perizinan	DPMPTSPNaker, SIM SIPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) Pelayanan Perizinan Pusat yang terintegrasi dengan Daerah, yang dapat dilakukan pendaftarannya secara online terdiri dari 100 jenis perizinan dan fasilitas pelayanan lainnya.
10.	KIARA (Klinik Pelayanan Perencanaan)	BAPPEDA, memfasilitasi konsultasi perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang
11.	Metamorfosa Batik	Dinperindagkop dan UMKM, diselenggarakan dalam rangka promosi, pembinaan dan pelestarian batik tulis Lasem
12.	Jurnal Litbang Rembang (JLR)	BAPPEDA, dalam satu tahun diterbitkan 1 edisi JLR, yang didalamnya terdapat daftar judul penelitian, daftar inovasi OPD, daftar Krenova dan keanggotaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Rembang.
13.	SIM Litbang	BAPPEDA, SIM pengelolaan dan pelayanan Kelitbangan yang terintegrasi dengan Kesbangpoldan DPMPTSPNaker
14.	SIM Ketenagakerjaan	DPMPTSPNAKER, SIM pengelolaan data dan pelayanan informasi data Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Dindukcapil dan Kecamatan.

Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2019

3. Inovasi Lainnya

Inovasi Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dimiliki Kabupaten Rembang adalah inovasi yang bersifat eksternal, dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada publik sehingga hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan Kabupaten Rembang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang maupun bersama stakeholder terkait dan swasta. Berikut perkembangan Inovasi Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.109

Daftar Inovasi Lainnya Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Inovasi	Instansi - Keterangan
1.	KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)	Bappeda, diselenggarakan dalam rangka menggali dan melakukan pembinaan terhadap produk krenova yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Kabupaten Rembang
2.	BDI (Bursa Desa Inovasi)	Dinpermades, diselenggarakan dalam rangka menggali potensi inovasi pada setiap desa di Kabupaten Rembang
3.	Kamalia Merekah (Koin Amal Lansia Bagi Mereka Menjadi Berkah)	Bappeda, kegiatan pengumpulan koin untuk memberikan santunan kepada lansia terlantar, dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan

4.	Istri Mantab (Industri Rumahan Mantab)	Bappeda dan DinsosPPKB, kegiatan untuk menggali dan menumbuhkembangkan industri rumahan rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan
5.	Desa Inovasi	Bappeda dan Dinpermades, kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan terhadap desa yang telah melakukan inovasi
6.	Klinik TTG (Teknologi Tepat Guna)	Dinpermades dan masyarakat, forum konsultasi dan pembinaan inovasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.	Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)	Dinpermades dan masyarakat, lembaga masyarakat yang menangani inovasi-inovasi yang ada di masyarakat berbasis teknologi tepat guna.
8.	Forum TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	Bappeda dan Perusahaan, forum perencanaan dan monev fasilitasi dana TSP dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Rembang.
9.	Festival Lasem Kreatif	Dinbudpar dan Masyarakat, kegiatan dalam rangka promosi dan pelestarian seni, sejarah dan budaya Lasem.

Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2019

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Daya dukung inovasi Kabupaten Rembang tidak hanya berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Tabel 2.110

Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No	Perguruan Tinggi	Inovasi
1	STIE YPPI	Menginduk LPPM, KKU (Kuliah Kerja Usaha)
2	STAI AI ANWAR	Menginduk LPPM
3	STAI AI Akmal	Menginduk LPPM
4	AKSI	Menginduk LPPM
5	PSDKU UNDIP	Menginduk LPPM.

Sumber : Data diolah, 2019

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan mengacu perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Terdapat perbedaan Program antara RPJMD lama dengan Perubahan RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.111

Irisan RPJMD Lama dan Perubahan RPJMD

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
B.	BELANJA LANGSUNG	B.	BELANJA LANGSUNG	

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
	Urusan Umum		Urusan Umum	
I	URUSAN KESEKRETARIATAN	I	URUSAN KESEKRETARIATAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
	<i>program baru</i>	3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Seluruh Perangkat Daerah
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah		<i>bergeser ke FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (Keuangan Daerah)</i>	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
II	URUSAN PENDIDIKAN	II	URUSAN PENDIDIKAN	
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
8	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal			
9	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
10	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal			
11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)			
12	Program Pendidikan Menengah	6	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
15	Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah			
III	URUSAN KESEHATAN	III	URUSAN KESEHATAN	
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	02 Dinas Kesehatan
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	10	Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	
20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	
21	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			
22	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita			
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			
25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			
26	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	12	Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan	
27	Program Pengawasan Obat dan Makanan			
28	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya			
29	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	13	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan	
30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	14	Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular	
31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular			
32	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang	03 Rsud Dr. R. Soetrasno
33	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	16	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
IV	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IV	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
34	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	17	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
35	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
36	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			
38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
39	Program pembinaan jasa konstruksi			
40	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			
41	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			
42	Program pembangunan sistem informasi irigasi	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
43	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
44	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya			
45	Program penyediaan dan pengolahan air baku			
46	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		<i>bergeser di URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN(Program Pengembangan Kawasan Pemukiman)</i>	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
47	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah		<i>bergeser di URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN(Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung)</i>	
48	Program perencanaan tata ruang	19	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
49	Program pengendalian pemanfaatan ruang			
50	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
V	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
51	Program pengembangan perumahan	20	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
52	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	21	Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	
53	Program lingkungan sehat perumahan	22	Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman	
54	Program pengelolaan areal pemakaman			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
VI	URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT	VI	URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT	
55	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	23	Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas	06 Satuan Polisi Pamong Praja
56	Program Penegakan Peraturan Daerah			
57	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan			
58	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	24	Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	
59	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			
60	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	25	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
61	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
62	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	26	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
63	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana	27	Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana	
64	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	28	Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana	
VII	URUSAN SOSIAL	VII	URUSAN SOSIAL	
65	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	29	Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
66	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.			
67	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin			
68	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	30	Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	
69	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
70	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
71	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			
72	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
73	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)			
74	Program Penanganan Anak Terlantar			
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
VIII	URUSAN TENAGA KERJA	VIII	URUSAN TENAGA KERJA	
75	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	31	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
76	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
77	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	32	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
78	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
IX	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IX	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
79	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	33	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
80	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			
81	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	34	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	
82	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan			
83	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak			
84	Program Pemberdayaan Perempuan anak			
85	Program Sistem Data Gender dan Anak			
X	URUSAN PANGAN	X	URUSAN PANGAN	
86	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah	35	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
87	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
88	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan			
89	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan			
90	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan			
91	Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
92	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar			
93	Program Desa Mandiri Pangan			
XI	URUSAN PERTANAHAN	XI	URUSAN PERTANAHAN	
94	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	36	Program Fasilitasi Pertanahan	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
95	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
96	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan			
XII	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	XII	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
97	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	12 Dinas Lingkungan Hidup
98	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			
99	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			
100	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
101	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan			
102	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	38	Program Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
103	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			
104	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
105	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	39	Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas	
106	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
XIII	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	XIII	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
107	Program penataan Administrasi Kependudukan	40	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		41	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	
108	Program pengembangan data dan informasi kependudukan	42	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
XIV	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	XIV	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD	
109	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	43	Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
110	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa				
111	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa	44	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa		
112	Program peningkatan keberdayaan masyarakat				
113	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan				
114	Program Penanggulangan kemiskinan				
115	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	45	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		
116	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah				
117	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum				
XV	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	XV	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
118	Program Keluarga Berencana	46	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
119	Program Pelayanan Kontrasepsi				
120	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				
121	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja				
122	Program Ketahanan Keluarga	47	Program Keluarga Sejahtera		
123	Program promosi kesehatan Ibu. bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita				
124	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD				
XVI	URUSAN PERHUBUNGAN	XVI	URUSAN PERHUBUNGAN		
125	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	48	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	15 Dinas Perhubungan	
126	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
127	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
128	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	49	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
129	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	50	Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan		

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
130	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
131	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas			
132	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran			
XVII	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	XVII	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
133	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	51	Program Pengembangan E-Government	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
134	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi			
135	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	52	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	
136	Program kerjasama informasi dan media massa			
137	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi			
XVII I	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	XVII I	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
138	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	53	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
139	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
140	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	54	Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	
141	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha			
142	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			
143	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah			
144	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru			
XIX	URUSAN PENANAMAN MODAL	XIX	URUSAN PENANAMAN MODAL	
145	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	55	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
146	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
147	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	56	Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan	

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
148	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal			
149	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan			
XX	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	XX	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
150	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	57	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
151	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			
152	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			
153	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			
XXI	URUSAN STATISTIK	XXI	URUSAN STATISTIK	
154	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	58	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XXII	URUSAN PERSANDIAN	XXII	URUSAN PERSANDIAN	
155	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XXIII	URUSAN KEBUDAYAAN	XXIII	URUSAN KEBUDAYAAN	
156	Program pengembangan nilai budaya	60	Program Pengembangan Nilai Budaya	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
157	Program pengelolaan kekayaan budaya			
158	Program pengelolaan keragaman budaya			
159	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya			
160	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat			
161	Program Pembinaan Sejarah Lokal			
162	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa			
XXI V	URUSAN PERPUSTAKAAN	XXI V	URUSAN PERPUSTAKAAN	
163	Program pengembangan budaya baca	61	Program Pelayanan Perpustakaan	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
164	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan			
XXV	URUSAN KEARSIPAN	XXV	URUSAN KEARSIPAN	
165	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	62	Program Pengelolaan Kearsipan	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
166	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
167	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			
	URUSAN PILIHAN		URUSAN PILIHAN	
XXV I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	XXV I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
168	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	63	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
169	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha			
170	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan			
171	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	64	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	
172	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
173	Program pengelolaan TPI terpadu			
174	Program pengembangan nelayan kecil	65	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
XXV II	URUSAN PARIWISATA	XXV II	URUSAN PARIWISATA	
175	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	66	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
176	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
177	Program pengembangan ekonomi kreatif			
178	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	67	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
XXV III	URUSAN PERTANIAN	XXV III	URUSAN PERTANIAN	
179	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	68	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
180	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			
181	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)	69	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	
182	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	70	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	
183	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	71	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	
184	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	72	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	
185	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan			
186	Program Pengembangan Agribisnis	73	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	
187	Program Peningkatan Produksi Pertanian			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
XXIX	URUSAN PERDAGANGAN	XXIX	URUSAN PERDAGANGAN	
188	Program Pengembangan Sistem Distribusi	74	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
189	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi			
190	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	75	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan	
191	Program Peningkatan Kemetrollogian dan perlindungan Konsumen			
192	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
193	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
194	Program Pembinaan Pedagang			
195	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan			
196	Program Promosi Produk Unggulan Daerah			
197	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
XXX	URUSAN PERINDUSTRIAN	XXX	URUSAN PERINDUSTRIAN	
198	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	76	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
199	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
200	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
201	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			
202	Program Penataan Struktur Industri			
203	Pembinaan Lingkungan Sosial			
204	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah			
205	Pembinaan Industri			
206	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	77	Program Pengembangan Industri Kreatif	
XXXI	URUSAN TRANSMIGRASI	XXXI	URUSAN TRANSMIGRASI	
207	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		<i>bergeser ke FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (Sekretariat Daerah, masuk Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan)</i>	23 Sekretariat Daerah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
XXXI	SEKRETARIAT DAERAH	XXXI	SEKRETARIAT DAERAH	

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
208	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	78	Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan	23 Sekretariat Daerah
209	Program Kerjasama Pembangunan			
210	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	79	Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan	
		80	Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan	
		81	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	
211	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	82	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan penataan Kelembagaan	
212	Program peningkatan kualitas pelayanan publik			
213	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur			
214	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	83	Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum	
215	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	84	Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah	
216	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	85	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan	
XXXI II	KEPEGAWAIAN DAERAH	XXXI II	KEPEGAWAIAN DAERAH	
217	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	86	Program Pelayanan dan Penataan Aparatur	42 Badan Kepegawaian Daerah
218	Program Pendidikan Kedinasan	87	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
219	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	88	Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian	
XXXI V	SEKRETARIAT DPRD	XXXI V	SEKRETARIAT DPRD	
220	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	89	Program Legislasi Daerah	24 Sekretariat DPRD
		90	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	
XXX V	PENGAWASAN	XXX V	PENGAWASAN	

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
221	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	91	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	39 Inspektorat
222	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	92	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
223	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			
XXX VI	KEUANGAN DAERAH	XXX VI	KEUANGAN DAERAH	
224	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	93	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
225	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	
226	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	<i>pergeseran program dari Urusan UMUM</i>	96	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
XXX VII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	XXX VII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
227	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan	97	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
228	Program Perencanaan pembangunan daerah			
229	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan			
230	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			
231	Program Pengembangan wilayah perbatasan			
232	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
233	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
234	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	98	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
235	Program Perencanaan Tata Ruang			
236	Program Pemanfaatan Ruang			
237	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang			

RPJMD LAMA		PERUBAHAN RPJMD		OPD
238	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
239	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	99	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
240	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	100	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
241	Program Kerjasama Pembangunan			
242	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek	101	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK	
XXX VIII	PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN	XXX VIII	PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN	
	<i>program baru</i>	102	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	43 14 Kecamatan
242	RPJMD LAMA	102	RPJMD PERUBAHAN	40 OPD

2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Tahun 2018

Penyusunan RKPd Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- a. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, ($X \leq 50\%$);
- b. Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$);
- c. Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$);
- d. Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$);
- e. Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$).

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No.	Indikator	Satuan	2018		Status Capaian
			Target RPJMD	Realisasi RKPd	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,64	-	
2	Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp.Ribu	22.5	-	
3	Laju Inflasi	%	3.33	2.64	Tinggi
4	Indeks Gini	Indeks	0,29	-	
5	Persentase Penduduk Miskin	%	14,97	15,41	
6	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	13.47	-	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	68,5	69,46	
8	Indeks Pembangunan Gender	Skor	86,9	-	
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	68	-	

No.	Indikator	Satuan	2018		Status Capaian
			Target RPJMD	Realisasi RKPD	
10	Nilai PMPRB	Nilai	64	-	-
11	Rata-rata Nilai SKP	Skor	87	-	
12	Tingkat maturitas SPIP	Nilai	2	2.736	Sangat Tinggi
13	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	Sangat Tinggi
14	Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WTP	WDP	Sedang
15	Nilai SAKIP	Nilai	62	-	-
16	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	3.01	22.24	Sangat Tinggi
17	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	60	66	Sangat Tinggi
18	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	87.19	Sangat Tinggi
19	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	85	99.47	Sangat Tinggi
20	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	Sangat Tinggi
21	Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	77	-	-
22	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	100	100	Sangat Tinggi
23	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	100	100	Sangat Tinggi
24	Ketersediaan Data Pembangunan Daerah	%	80	95	Sangat Tinggi
25	Persentase Surat/Santel yang dikelola	%	100	100	Sangat Tinggi
26	Indeks Produksi Padi	Skor	1,09	-	-
27	NTP	Skor	100,68	-	-
28	Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian`	Skor	1.45	1.14	Tinggi
29	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5	-	-
30	Produksi ikan	Ton	12,120	6,455	Rendah
31	Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2,789	2,770	Sangat Tinggi
32	Persentase pertumbuhan ekspor	%/Tahun	4	129.46	Sangat Tinggi
33	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	14.50	13.55	Sangat Tinggi
34	Kontribusi sektor industri pengolahan	%	21.4	21.83	Sangat Tinggi
35	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.10	2.87	Sedang
36	Persentase penduduk miskin	%	14.97	15.41	Sangat Tinggi
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	66.5	50	Tinggi
38	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	4,521,408	7,173,000	Sangat Tinggi
39	Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	8.25	6.28	Tinggi
40	Presentase koperasi aktif	%	86	90.40	Sangat Tinggi
41	Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	39	69.59	Sangat Tinggi
42	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	%/th	5	178.29	Sangat Tinggi
43	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	2.2	2.12	Sangat Tinggi
44	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	66.01	67.91	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	2018		Status Capaian
			Target RPJMD	Realisasi RKPD	
45	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	82.54	89.68	Sangat Tinggi
46	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	86.34	87	Sangat Tinggi
47	persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	8,49	7,74	Sedang
48	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	2,80	2,12	Sedang
49	Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	95,00	85,66	Sedang
50	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	83,50	100	Sangat Tinggi
51	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	16,34	3,68	Rendah
52	Persentase cakupan Air baku	%	76	75	Sangat Tinggi
53	Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	3	3	Sangat Tinggi
54	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	90	92	Sangat Tinggi
55	Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	70	72	Sangat Tinggi
56	AKI (Angka Kematian Ibu)	Kasus	7	9	Sangat Tinggi
57	AKB (Angka Kematian Bayi)	Kasus	120	149	Sangat Tinggi
58	Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	135	170	Sangat Tinggi
59	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.16	0.11	Sedang
60	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.5	6.94	Sangat Tinggi
61	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12	12.04	Sangat Tinggi
62	APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 7 – 12 tahun	%	99.78	95.38	Sangat Tinggi
63	APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun	%	100	91.38	Sangat Tinggi
64	APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	84	87.76	Sangat Tinggi
65	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	61.87	100	Sangat Tinggi
66	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	35	46	Sangat Tinggi
67	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	19	Sangat Tinggi
68	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	97.93	89	Sangat Tinggi
69	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	Sangat Tinggi
70	Persentase Pemilih dalam menggunakan hal pilih melalui pemilu Pilpres dan Pileg Pilgub	%	75	65.2	Tinggi
71	Persentase PMKS yang ditangani	%	55	58.67	Sangat Tinggi
72	Rasio KDRT	Ratio	8/178.53	0.002	Rendah
73	Cakupan desa ramah anak	%	65	65	Sangat Tinggi
74	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	60	70	Sangat Tinggi
75	Persentase perempuan yang menduduki	%	31	27.68	Tinggi

No.	Indikator	Satuan	2018		Status Capaian
			Target RPJMD	Realisasi RKPD	
	jabatan di lembaga pemerintah				
76	Posyandu aktif	Jumlah	1.225	1.228	Sangat Tinggi
77	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	1.1	1.3	Sangat Tinggi
78	Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa	%	70	80	Sangat Tinggi
79	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14	17	Sangat Tinggi
80	Cakupan peserta KB aktif	%	100	123.04	Sangat Tinggi
81	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0.71	0.69	Sangat Tinggi
82	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6.67	9.81	Sangat Tinggi
83	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49	%	83.64	80.02	Sangat Tinggi
84	Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana	%	11.31	7.27	Rendah
85	Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	92.9	100	Sangat Tinggi
86	Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Org	10	-	-
87	Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	%	100	100	Sangat Tinggi
88	Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	100	100	Sangat Tinggi
89	Skor PPH	Skor	87.7	86.8	Sangat Tinggi
90	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	k/kal/kapita	6.71	5.044	Tinggi
91					
92	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (000)	10	893,475	Sangat Tinggi
93	Indeks Produksi pertanian	(kw/ha)	6,4	-	
94	Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	2	1.4	Sedang

Sumber : Bappeda, 2019 data diolah

2.2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program tahun 2018

a) Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Bagian Kesejahteraan Rakyat,Setda. Pada urusan ini terdapat 6 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	%	93.79	99.89	95.06	97.62		

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	a. APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	72.58	90.95	78.52	87.76	87.76	Sesuai
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)	%	91.16	89.70	65.66	94.18		
	a. APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7 – 12 th	Skor	98.11	98.04	97.28	95.38	95.38	Sesuai
	b. Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	6.92	6.92	6.94	6.97	6.94	Belum Tercapai
	c. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.73	12.02	12.05	12.04	12.04	Sesuai
3	Program Pendidikan Menengah	%	88.31	84.96	94			
	a. APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 th	Skor	100	100	100	91.38	91.38	Sesuai
4	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal	%	-	-	-	98.80		
	a. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	26.12	42.62	46.62	100	100	Sesuai

Berdasarkan evaluasi capaian indikator program pada Urusan Pendidikan, dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan urusan Pendidikan, upaya pelaksanaan program harus tetap diusahakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

b) Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soetrasno. Pada urusan ini terdapat 4 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.114
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	%	98.69	87.22	100	94.64		
	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	8	15	13	9	12	Melampaui
	b. Kasus Kematian Bayi (AKB)	Kasus	134	143	135	149	155	Belum tercapai
	c. Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	164	183	158	170	150	Belum tercapai
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	%	100	87.22	100	95.35		
	a. Prevalensi Gizi Buruk	%	0.21	0.12	0.11	0.11	0.14	Belum tercapai

Mengacu pada hasil evaluasi di atas terlihat bahwa pencapaian indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Rata-rata pencapaian tahun 2018 meningkat menjadi 105,18 % dari sebelumnya 61,0 % di tahun 2017.

c) Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada urusan ini terdapat 5 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi 5 indikator kinerja memenuhi target. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.115
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	%	82.40	90	64.36	91.64		
	a. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	44.96	50.01	62	67.91	67.91	Sesuai
	b. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	73.02	97	79	89.68	89.68	Sesuai
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	-	-	-	-		

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	a. Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	0	0	1	3	3	Sesuai
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	69.80	100	100	76.10		
	a. Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	4.57	0	6.93	13.25	0.12	Melampaui
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	%	97.80	82.50	74.54	85.49		
	a. Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	48	55	57	87	87	Sesuai

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diampu oleh DPKP. Pada urusan ini terdapat 5 Indikator Kinerja Program, dengan rincian realisasi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	%	100	100		74.76		
	a. Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	4.7	34.96	2.9	2.12	0.4	Melampaui
	b. persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	6.76	78.8	8.21	7.05	9.35	Belum Tercapai
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	%				80.38		

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	a. Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	80.34	81.74	81.91	92.8	93	Belum Tercapai
3	Program lingkungan sehat perumahan	%				71.69		
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	77.42	79.98	81.13	80.5	81.5	Belum Tercapai
4	Program penyediaan dan pengolahan air baku	%				7.47		
	a. Persentase cakupan air baku	%	66	0	69	75	75	Sesuai

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya target meningkatnya jumlah rumah layak huni sebagai berikut:

1. Belum ada rencana aksi keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang guna melaksanakan program penanganan kawasan kumuh.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat perempuan, dan kaum yang dirugikan, dalam perencanaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Solusi terhadap permasalahan pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan kumuh sebagai berikut:

1. Perlu disusun strategi dan rencana aksi keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah karena Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh.
3. Pelibatan masyarakat, perempuan, dan kaum yang dirugikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan merupakan kunci penting dalam menjamin keberlanjutan dari hasil peningkatan kualitas permukiman kumuh.

e) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Kesbangpolinmas, BPBD dan Satpol PP. Pada urusan ini terdapat 4 Indikator Kinerja Program. Selengkapnya kinerja penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Ket.
				2016	2017	2018		
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	97.02	94.31	100	96.32		
	a. Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	96.32	97.77	89.24	89	98.01	Belum Tercapai
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	%	100	99.14	100	98.92		
	a. Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu, Pilpres dan Pileg- Pilgub	%	Na		73.3	-	85	-
3	Program Penegakan Peraturan Daerah	%	98.33	100	98	95		
	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100	100	100	Sesuai
4	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100	100	91	96.61		
	a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	Na	98.66	94.56	70	70	Sesuai

Mengacu pada hasil evaluasi diatas, rasio Linmas per 10.000 penduduk sebesar 89%, kinerja tersebut masih dibawah target. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,1%, menunjukkan adanya hambatan dalam mencapai target tersebut. Adapun hambatan tersebut yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dapat ditempuh diantaranya dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi kesiapsiagaan mendeteksi adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

f) Urusan Sosial

Permasalahan sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Rembang, dari 22 kategori PMKS yang relatif menonjol adalah kemiskinan, pengangguran, keterlantaran dan tuna sosial. Urusan ini diampu oleh Dinsos PPKB dengan hasil kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	95	66	100	86.69		
	a. Persentase PMKS yang ditangani	%	21.72	53.76	33.79	67.18	60	Melampaui

Realisasi persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2018 adalah sebesar 67,18%. PMKS di Kabupaten Rembang sebanyak 111.330 orang, yang tertangani sebanyak 74.794 orang. Pencapaian ini diatas target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 60% atau capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 134,82. Dalam kurun waktu tahun 2106-2018, capaian kinerja persentase PMKS yang tertangani adalah 119,47%, 99,66% dan 134,82%. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017, persentase PMKS yang ditangani di Kabupaten Rembang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan bagi upaya pencegahan dan penanganan PMKS telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang. Pada tahun 2018 telah berhasil untuk menekan sekaligus mengentaskan permasalahan sosial yang ada. Salah satu kegiatan yang berpengaruh dalam penanganan PMKS diantaranya, pelatihan kewirausahaan karena secara efektif mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial sekaligus langkah tepat untuk mencetak wirausahawan-wirausahawan baru. Suatu daerah dikatakan maju jika memiliki 2% wirausahawan dari jumlah penduduk, sedangkan di Rembang baru memiliki 7000 wirausahawan dari 600 ribu lebih jumlah penduduknya. Sehingga menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat menjadi suatu yang mutlak untuk memperbaiki taraf hidup.

g) Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 adalah sebesar 3,62. keadaan ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 131,66% dan tahun 2016 sebesar 107,50%. Beberapa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan – pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memasuki dunia kerja, menyalurkan pencari kerja melalui pengembangan informasi pasar kerja dan penempatan pencari kerja baik didalam negeri maupun luar negeri, selain itu penurunan tingkat pengangguran terbuka akibat meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Rembang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini baru dalam tahap pembangunan pabrik sepatu ‘PT. Seng Dam Jaya Abadi’ dan pabrik gula ‘PT.Wadah Karya Rembang’, yang berpotensi menyerap tenaga kerja ±4.000 apabila nanti perusahaan sudah mulai operasional. Adapaun Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	%	100	82.50	78.80	96.83		
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.23	4.51	4.03	3.62	2.87	Melampaui

h) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini diampu oleh Dinsos PPKB dengan 4 indikator dengan hasil capaian selengkapny sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	%	100	10	100	93.11		
	a. Rasio KDRT	Ratio	0.013	0.011	0.009	0.009	0.002	Melampaui

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	b. Cakupan desa ramah anak	%	33	46	45	89.79	65	Melampaui
	c. Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	25.8	25.8	27.6	23.3	27.68	Belum Tercapai
2	Program Pemberdayaan Perempuan anak	%	100	100	100	99.66		
	a. Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	41	49	50	56	70	Belum Tercapai

Realisasi persentase perempuan yang menduduki jabatan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2018 adalah sebesar 27,68%. Dari total 578 jabatan di pemerintahan, sebanyak 160 jabatan diisi oleh perempuan. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 31%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 98,86% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, capaian kinerja persentase perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan belum mencapai 100% (pada kisaran 96,55% sampai dengan 98,86%).

i) Urusan Pangan

Urusan ini diampu oleh dinas Pertanian Tanaman Pangan menggunakan 2 indikator dengan tingkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	%				99.21		
	a. Skor PPH	Skor	86.8	85.9	86.85	87.58	86.80	Melampaui
2	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	%				98.02		
	a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	k/kal/ka pita	5956	6141	5.16	6.515	5.044	Melampaui

Skor PPH pada tahun 2018 menunjukkan angka 87,58. Capaian PPH selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 0,58% di tahun 2017 dan meningkat 1,04% di tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman konsumsi masyarakat Rembang sudah semakin lebih baik dan bisa dikatakan bahwa secara kualitas, konsumsi masyarakat Rembang semakin baik. Skor PPH ini belum bisa mencapai target karena pola pangan masyarakat Rembang masih belum beragam baik dalam komposisi maupun mutu gizinya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, capaian skor PPH tahun 2018 sudah diperoleh nilai sebesar 98,30%.

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa persentase capaian pada tahun 2018 sebesar 98,97% yang di kategorikan dalam kategori sangat berhasil. Sedangkan berdasarkan kriterianya, skor PPH Kabupaten Rembang berada pada kondisi segitiga perak yang berada pada range skor 78 - 88 dan dicirikan dengan jumlah energi yang diperoleh dari konsumsi padi-padiandan umbi-umbian yang menurun namun masih diatas norma PPH, energi dari konsumsi pangan hewani, sayur dan buah yang masih rendah dari norma PPH dan energi dari konsumsi minyak, kacang-kacangan dan gula yang sudah memenuhi norma PPH. Kondisi segitiga perak ini menyebabkan kondisi Pola Pangan Harapan di Kabupaten Rembang masih berada pada posisi aman karena konsumsi dari jenis pangan masih berada di norma PPH hanya saja untuk perlu ditingkatkan lagi untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah.

j) Urusan Pertanahan

Urusan ini memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase luas lahan bersertifikat dengan realisasi 0,86 % dari target yang ditetapkan sebesar 1 % (tidak memenuhi target).

Tabel 2.122

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%			89.00	79.31		
	a. Persentase luas lahan bersertifikat	%	0.55	0.65	0.86	0.86	1	Belum Tercapai

k) Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan ini terdapat 2 indikator dengan tingkat capaian 1 indikator tercapai dan 1 indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2.123

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%			100	98.86		
	a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5.12	4.66	6	5.35	6	Belum Tercapai
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100		
	a. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	59.2	61.1	62.7	63.3	50	Melampaui

I) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun indikator kinerja sebanyak 2 indikator, selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program penataan Administrasi Kependudukan	%	98.19	100	100	97.64		
	a. Persentase penduduk ber-KTP	%	80.32	80.32	94	93.6	100	Belum Tercapai
	b. Persentase bayi ber-akta kelahiran	%	94.25	96.45	95.6	97.32	100	Belum Tercapai

Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yang wajib KTP sebanyak 493.837 jiwa. Adapun penduduk yang telah memiliki KTP sejumlah 462.642 sehingga persentase penduduk ber-KTP adalah 93,68 %. Adapun jumlah bayi ber akta kelahiran dihitung dari jumlah kepemilikan akta kelahiran terhadap jumlah anak. Tahun 2018 jumlah anak di kabupaten Rembang sebanyak 157.155 jiwa dan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 152.948 jiwa. Persentase bayi atau anak yang memiliki akta kelahiran sebesar 97,32 % dengan capaian 97,32 %.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah masih ada masyarakat dengan tingkat kesadaran kurang tentang arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan yang lain.

m) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini diampu oleh Dinpermades dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Adapun kinerja urusan ini masih dibawah target yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.125

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD			-	-	94.03		
	a. Posyandu aktif	Jumlah	1234	1225	1.225	1.228	1.228	Sesuai
	b. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0.4	0.4	0.8	1	1.1	Belum Tercapai

n) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat 5 indikator kinerja pada urusan ini, dengan tingkat pencapaian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.126

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Keluarga Berencana	%	99.65	100	99.79	89.51		
	a. Cakupan peserta KB aktif	%	98.08	82.1	116.88	85.84	123.04	Belum Tercapai
	b. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	19.71	18.76	6.76	14.15	9.81	Melampaui
	c. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	82.75	83.57	83.34	83.61	80.02	Belum Tercapai
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	%					88.07	

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	a. Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana	%	14.19	13.12	8.62	12.51	11.31	Melampaui
3	Program Ketahanan Keluarga	%				98.18		
	a. Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	91.97	92.12	93.9	91.96	100	Belum Tercapai

o) Urusan Perhubungan

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan tingkat pencapaian kinerja keduanya tidak memenuhi target.

Tabel 2.127

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	100	100	100	100		
	a. Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	94	94	90	91	92	Belum Tercapai
	b. Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	69	67	60	68	72	Belum Tercapai

p) Urusan Komunikasi dan Informatika

Terdapat 4 indikator kinerja pada urusan ini, dengan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.128

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi		100	100	98.33	98.44		
	a. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	2.13	2.52	2.43	2.22	2.24	Belum Tercapai
2	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		100	100	93.2	97.82		

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	a. Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	100	100	100	100	100	Sesuai
	b. Persentase PD telah memiliki website aktif	%	86.97	86.97	100	100	100	Sesuai
	c. Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	100	100	100	100	100	Sesuai

q) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Terdapat 3 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.129

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		41.38	94.73	100	99.40		
	a. Presentase koperasi aktif	%	78.8	82.37	53.34	54	55	Belum Tercapai
2	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		100	90.91	100	99.78		
	a. Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	6.38	6.33	6.31	6.40	6.28	Melampaui
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	%	100	99.69	100	100		
	a. Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	32	35	22.6	67.57	69.59	Belum Tercapai

r) Urusan Penanaman Modal

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.130

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi	Capaian Kinerja	Target	Keterangan
----	--------------------------	--------	---------	-----------------	--------	------------

	ator		awal (2015)	2016	2017	2018	2018	n
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	85.01	100	99.89		
	a. Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	646,829	3,672,901	5,172,530	5,772,530	7,173,000	Melampaui

s) **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.131
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan *Kepemudaan dan Olahraga*

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olah Raga	%	91.67	87.88	84.93	98.12		
	a. Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	8	8	22	31	46	Melampaui
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	%	85	100	94.54	98.89		
	a. Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	100	100	100	100	Sesuai

t) **Urusan Statistik**

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.132
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	%	100.00	100.00	100.00	99.68	-	

	a. Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	50	60	70	50	95	Belum Tercapai
--	---	---	----	----	----	----	----	----------------

u) Urusan Persandian

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	%	-	-	-	89.18	-	
	a. Persentase Surat/Santel Yang dikelola	%	100	100	100	100	100	Sesuai

v) Urusan Kebudayaan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.134
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya		-	-	-	97.41	-	
	a. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	12	12	17	Belum Tercapai

w) Urusan Perpustakaan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.135
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program		100	100	100	98.05	-	

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	pengembangan dan pembinaan perpustakaan							
	a. Angka kunjungan perpustakaan per tahun	Orang	14,272	14,199	17,000	15,719	24,456	Belum Tercapai

x) Urusan Kearsipan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.136
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan		100.00	100.00	50.00	99.26	-	
	a. Pengelolaan arsip secara baku	%	43.5	52	55.3	60	61	Belum Tercapai

y) Urusan Kelautan dan Perikanan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.137
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	%	100.00	100.00	58.33	90.94	-	
	a. Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	1.14	0.86	4.68	5.5	1.4	Melampaui

z) Urusan Pariwisata

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.138
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	100	100	97.56	99.39	-	
	a. Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	%/th	3.8	5.2	-0.02	5.3	178.29	Belum Tercapai
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	%	100.00	95.63	78.91	75.19	-	
	a. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.43	0.44	0.49	0.51	2.12	Belum Tercapai

aa) Urusan Pertanian

Terdapat 4 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.139
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	%	99.78	100	100	97.63	-	
	a. Nilai Tukar Petani	Skor	100.15	100.64	100.38	100.31	100.31	Sesuai
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian	%	81	98	100	97.07	-	
	a. Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha	5.72	6.18	4.55	4.55	5.51	Belum Tercapai
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	90.75	100	100	98.13	-	
	a. Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	Skor	0.93	1.14	1.02	1.76	1.02	Melampaui
4	Program Pengembangan Agribisnis	%	100	100	100	98.74	-	
	a. Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	0.56	0.77	0.63	0.81	1.03	Belum Tercapai

bb) Urusan Perdagangan

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.140
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	%	100	99.38	100	84.91	-	
	a. Persentase pertumbuhan ekspor	%	0.71	0.93	95.91	31.18	59.46	Belum Tercapai
2	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	%	-	-	-	100	-	
	a. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	13.68	13.5	13.5	13.55	14	Belum Tercapai

cc) Urusan Perindustrian

Terdapat 3 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.141
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan perindustrian

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	%	63.33	93.81	100	99.88	-	
	a. Prosentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri	%	39.92	39.85	41.76	40.05	42	Belum Tercapai
	b. Kontribusi sektor industri pengolahan	%	20.84	21.27	21.8	21.83	21.85	Belum Tercapai
2	Program Penataan Struktur Industri	%	100	97	100	100	-	
	a. Jumlah Klaster Industri	klaster	4	4	10	10	9	Melampaui

dd) Urusan Transmigrasi

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.142
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	%		-	-	-	-	
	a. Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	11	10	3	10	10	Sesuai

ee) Fungsi Perencanaan Pembangunan

Terdapat 4 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.143
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Pembangunan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	99.84	-	
	a. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.	%	na	60	65	66	69	Belum Tercapai
	b. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	na	80	83	87.19	91	Belum Tercapai
	c. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	na	95	95.15	99.47	85	Melampaui
2	Program Pengembangan Data/Informasi	%	100	100	100	99.68	-	
	a. Persentase ketersediaan data dan informasi	%	na	80	95	100	100	Sesuai

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
	Perencanaan Pembangunan							

ff) Fungsi Keuangan

Terdapat 2 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Keuangan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		93.65	87	95.22	95.42	-	
	a. Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Sesuai
	b. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	14.12	23.86	28.25	1.78	13.47	Belum Tercapai

gg) Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Terdapat 1 indikator kinerja pada urusan ini, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.145
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		82.91	83.23	99.81	83.10		
	a. Rata-rata Nilai SKP	Skor	81.22	83.21	84.37	80	80.3	Belum Tercapai

hh) Fungsi Lainnya

Hasil evaluasi capaian kinerja memperlihatkan capaian kinerja 79 % dengan predikat sangat berhasil, dengan analisa sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target level 2, terealisasi 2, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Upaya yang dilakukan oleh Pimpinan

Daerah dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP di Kabupaten Rembang adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan yang saling keterkaitan antara kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM aparat pengawas dalam hal ini Inspektorat agar dapat terwujud peran APIP yang efektif dan efisien dalam pengawasan .

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun, dengan target WTP dan realisasinya WTP.

Adapun capaian kinerja selengkapnya sebagaimana berikut.

Tabel 2.146

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Lainnya

No	Urusan/Program/Indikator	Satuan	kondisi awal (2015)	Capaian Kinerja			Target 2018	Keterangan
				2016	2017	2018		
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	93.65	87	95.22	95.42	-	
	a. Nilai SAKIP	Nilai	na	52	55.04	Na	62	Belum Tercapai
	b. Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Sesuai
	c. Tingkat maturitas SPIP	Nilai	1	1	2	2,736	2,736	Sesuai
	d. Nilai PMPRB	Nilai	na	62	57	64.39	64	melampaui
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	%	100	94.16	100	94.04		
	a. Tingkat kapabilitas APIP	Level	1	2	2	3	3	Sesuai
3	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	%	-	-	-	-	-	
	a. Rata-rata Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	75.79	75	76.2	78.02	78,02	Sesuai

2.3. Permasalahan

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja tahun 2018, maka permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Rembang adalah “Belum

optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang”. Adapun rincian permasalahan sebagaimana berikut:

1. **Tingginya Angka Kemiskinan;**
Realisasi persentase penduduk miskin pada tahun 2018 adalah sebesar 15,41%. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD yang pada tahun 2018 ditetapkan 14,97%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 97,06% dari target yang ditetapkan. Selama kurun waktu tahun 2014-2018 persentase penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun penurunannya hanya 1,02% per tahun. Akar permasalahan yaitu: masih diperlukannya penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin; serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
2. **Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan;**
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah, masih rendahnya budaya kerja aparatur, dan Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan
3. **Rendahnya Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;**
Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor potensial perekonomian daerah; Belum optimalnya pelayanan perijinan dan iklim investasi; Distribusi produk belum efektif dan efisien; Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
4. **Kurangnya pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar;** dan
5. **Rendahnya kualitas sumber daya manusia.**
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan; layanan kesehatan di semua lini yang belum tuntas; meningkatnya angka pengangguran; serta belum optimalnya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- Perlunya penguatan keluarga di dalam penerapan pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme.

b. Kesehatan

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- Masih ditemukannya kasus penyakit menular;
- Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) terutama jalur wilayah penambangan di kecamatan Sale, Sedan dan Gunem. Kerusakan jalan terutama terjadi pada jalur jalan kewenangan propinsi Lasem – Jatirogo terutama di sekitar kecamatan Sedan dan Sale serta jalur jalan kewenangan kabupaten di Kecamatan Sale, Sedan dan Gunem.
- Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa hutan maka banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa / kecamatan yang berada di lahan hutan sehingga pembangunannya harus melalui prosedur kerjasama.
- Banyak jalan kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku.
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
- Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.
- Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak;
- Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- Keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tampungan air di wilayah tengah hingga hilir di Kabupaten Rembang.
- Keterbatasan air baku sebagai bahan baku air minum;
- Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan SPAM di wilayahnya;
- Sulitnya merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terkait pelayanan sanitasi;
- Capaian sanitasi masih merupakan akses dasar belum memenuhi standar kelayakan;
- Keterbatasan lahan yang tersedia untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik setempat di desa/ kelurahan maupun terpusat di kecamatan / kabupaten.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses pelayanan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih ada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang terutama di wilayah pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai;
- Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah / kekurangan rumah (backlog);
- Masih banyak rumah yang tidak layak huni;

- Penataan dan pengembangan kawasan permukiman tradisional belum dilakukan secara optimal salah satunya di kawasan Kota Lasem;
 - Kurang optimalnya pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan.
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
 - Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
 - Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.
- f. Sosial**
- Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
 - Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
 - Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang.

c. Pangan

Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

d. Pertanahan

- Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
- Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat. Salah satunya pembangunan embung, pembangunan sarana prasarana permukiman, pasar hewan dan reaktifasi kereta api.
- Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

e. Lingkungan Hidup

- Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- Kurang optimalnya pengelolaan / pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.

- Masih tingginya pencemaran lingkungan sebagai dampak aktivitas industri pengolahan hasil perikanan dan industri batik.
 - Penanganan konservasi lahan kritis belum optimal sehingga kualitas sumber daya air semakin menurun karena berkurangnya area resapan air.
 - Masih rendahnya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia.
 - Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik.
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat Akan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
 - Rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
 - Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
 - Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i. Perhubungan**
- Belum optimalnya fungsi terminal;
 - Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir;
 - Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;
 - Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi salah satunya adalah Pelabuhan Rembang serta belum terpenuhinya kelengkapan jalan di jalan kewenangan pusat dan propinsi;
 - Belum terkoneksi dan terintegrasinya moda angkutan penumpang terutama dalam menyambut reaktifasi kereta api yang diperkirakan sebagian besar akan memanfaatkan lahan baru.
- j. Komunikasi dan Informatika**
- Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
 - Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.
- k. Koperasi dan UKM**
- Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;

- Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.

l. Penanaman Modal

- Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Rembang.

m. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

n. Statistik

validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

o. Persandian

Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

p. Kebudayaan

- Lunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda
- terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan
- kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

q. Perpustakaan

permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakaan, dan tenaga keperustakaan.

r. Kearsipan

belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan;
- Belum optimalnya produksi perikanan tangkap akibat adanya regulasi pemerintah yang sulit diterapkan di daerah.

b. Pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan DTW;
- Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

c. Pertanian

- Rendahnya curah hujan di kabupaten Rembang mengakibatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian kurang;
- Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
- Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;

d. Perdagangan

Rendahnya daya saing pasar, serta sarana prasarana pusat perdagangan;

e. Industri

- Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

f. Transmigrasi

terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

2.3.2.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan**a. Perencanaan**

- Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah.

b. Keuangan

belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

c. Kepegawaian

- Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

d. Pengawasan

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

2.3.2.5. Fungsi lain

- Perbaiki nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
- Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP;
- Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

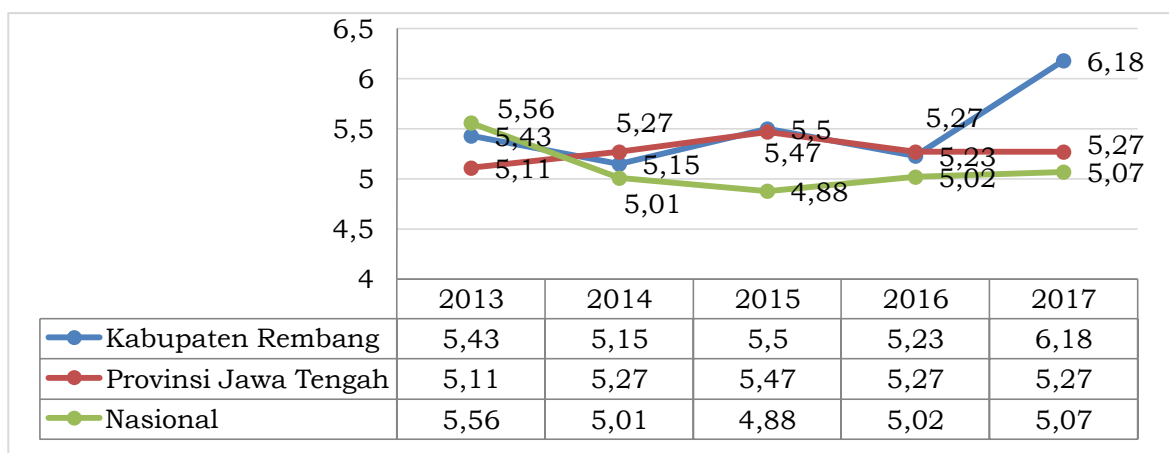
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2020. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pemerintah daerah pada hakekatnya telah mengusahakan agar ekonomi Kabupaten Rembang tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2018 tumbuh 6,19 persen meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 6,18 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen pada periode yang sama.

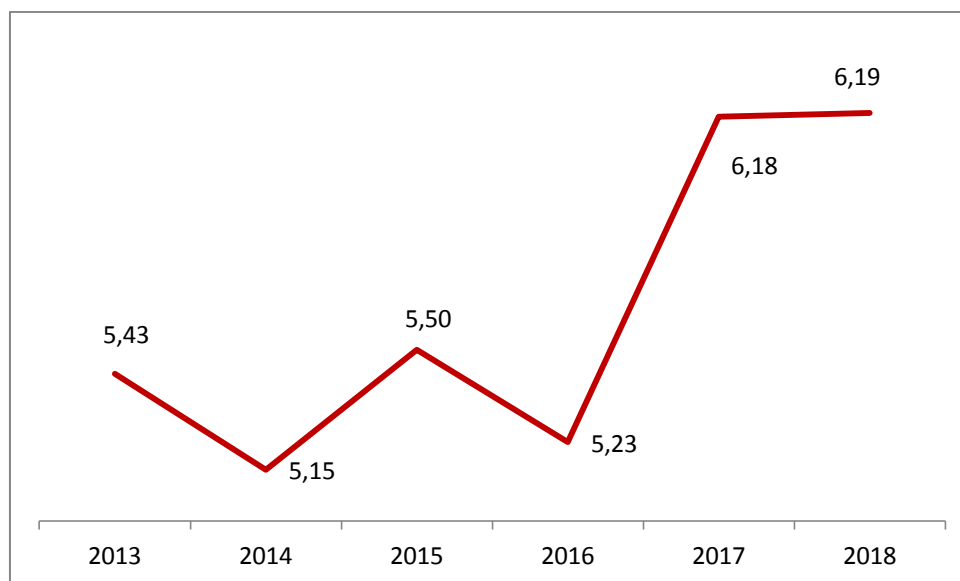


Grafik 3.1.

Posisi Pertumbuhan Ekonomi Rembang Nasional dan Jawa Tengah

Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian 0,89 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 70,32 persen.

Perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang 2013-2018 dapat digambarkan pada grafik berikut.



Grafik 3.2.

Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2018

Disisi lain, apabila dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian Rembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuh belas sektor pembentuk PDRB tumbuh positif di setiap sektor meskipun untuk sektor primer pertanian justru tingkat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan listrik, perdagangan dan jasa. Gambaran perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Rembang 2013-2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,22	-5,62	4,16	1,63	3,87
B.	Pertambangan dan penggalian	5,58	6,51	4,03	6,3	20,84
C.	Industri pengolahan	9,88	15,2	7,66	7,86	6,34
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,2	5,3	2,59	6,77	7,07
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0,19	1,98	1,71	2,98	3,71
F.	Konstruksi	-4,4	14,65	6,18	7,46	7,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor	3,14	4,05	4,11	5,28	6,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,54	10,55	6,78	5,44	6,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	11,18	6,13	5,63	6,1
J.	Informasi dan Komunikasi	10,09	17,16	7,27	7,81	8,64
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	5,63	6,22	4,46	6,77	4,21

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
L.	Real Estate	4,7	6,38	6,18	5,78	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	16,68	7,15	8,84	9,92	8,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	0,67	4,87	2,78	3,81
P.	Jasa Pendidikan	15,97	14,86	6,81	7,51	7,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	14,97	9,75	9,83	8,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,86	9,38	4,07	8,3	8,36
	PDRB	5,43	5,15	5,5	5,23	6,18

*) : Angka Sementara

Sumber: BPS, 2018

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang menunjukkan keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Rembang selama kurun waktu tertentu. Guna melihat secara riil perkembangan PDRB, maka digunakan pendekatan tahun dasar atau atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan ADHK 2010, perkembangan PDRB tahun 2019 diperkirakan mengalami kenaikan pada seluruh sektor, perkembangan tertinggi diperkirakan masih terjadi pada sektor dominan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nilai PDRB riil pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 12,02 triliun rupiah dan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 12,68 triliun rupiah. Perkembangan dan Proyeksi PDRB Kabupaten Rembang Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 untuk tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang
Tahun 2013 - 2017

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.171.162,16	32,4	2.992.910,68	29,1	3.117.527,80	28,7	3.168.229,36	27,8	3.290.989,85	27,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	291.765,56	2,98	310.767,69	3,02	323.291,63	2,98	343.653,90	3,01	415.258,93	3,43
C.	Industri Pengolahan	1.860.445,88	19	2.143.284,16	20,8	2.307.391,43	21,3	2.488.767,34	21,8	2.646.597,21	21,83
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8.733,72	0,09	9.196,67	0,09	9.434,85	0,09	10.073,49	0,09	10.785,29	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.438,49	0,06	5.546,09	0,05	5.640,84	0,05	5.809,15	0,05	6.024,43	0,05
F.	Konstruksi	677.377,74	6,93	776.630,15	7,55	824.642,21	7,6	886.134,34	7,76	952.802,86	7,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.351.957,53	13,8	1.406.724,91	13,7	1.464.601,23	13,5	1.541.934,41	13,5	1.643.010,86	13,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	375.320,78	3,84	414.922,27	4,03	443.036,47	4,08	467.117,18	4,09	495.336,15	4,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	302.419,11	3,09	336.231,73	3,27	356.833,89	3,29	376.930,99	3,3	399.907,68	3,3
J.	Informasi dan Komunikasi	124.069,69	1,27	145.366,04	1,41	155.940,86	1,44	168.123,59	1,47	182.655,76	1,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	383.294,92	3,92	407.151,89	3,96	425.297,66	3,92	454.103,43	3,98	473.217,02	3,9
L.	Real Estate	99.192,48	1,01	105.520,70	1,03	112.044,16	1,03	118.520,31	1,04	124.500,64	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	26.308,16	0,27	28.188,71	0,27	30.679,79	0,28	33.723,93	0,3	36.484,32	0,3
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388.453,41	3,97	391.050,95	3,8	410.088,03	3,78	421.480,84	3,69	437.549,12	3,61
P.	Jasa Pendidikan	423.906,11	4,33	486.880,24	4,73	520.048,58	4,79	559.128,80	4,9	603.075,53	4,97
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.304,22	1,05	117.619,36	1,14	129.087,85	1,19	141.779,71	1,24	153.344,22	1,26

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
R,S, T,U	Jasa Lainnya	188.600,44	1,93	206.282,10	2,01	214.681,91	1,98	232.497,97	2,04	251.928,97	2,08
PDRB ADHK		9.780.750,39	100	10.284.274,36	100	10.850.269,20	100	11.418.008,73	100	12.123.468,84	100

*) : Angka Sementara

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2013 - 2017 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%, dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 22,46%. Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Rembang Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang
Tahun 2013 - 2017

JENIS PENGELUARAN	2013		2014		2015		2016		2017*	
	Rp	Persen (%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7 976 937,08	69,72	8 782 543,17	68,5	9 731 003,28	70,02	10 422 089,98	70,1	11 400 996,63	70,32
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3 694 149,53	32,29	4 011 903,70	31,29	4 474 558,63	32,2	4 849 448,23	32,62	5 321 099,80	32,82
b. Pakaian dan Alas Kaki	349 806,24	3,06	374 738,09	2,92	404 467,18	2,91	430 756,48	2,9	470 119,34	2,9
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	746 408,59	6,52	838 256,77	6,54	912 053,53	6,56	970 047,53	6,52	1 045 398,44	6,45
d. Kesehatan dan Pendidikan	464 430,26	4,06	510 279,06	3,98	555 647,95	4	597 851,27	4,02	642 851,04	3,96
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2 044 562,01	17,87	2 268 679,23	17,69	2 527 915,88	18,19	2 646 148,19	17,8	2 902 315,49	17,9
f. Hotel dan Restoran	558 542,22	4,88	647 438,57	5,05	710 179,72	5,11	770 045,21	5,18	843 533,18	5,2
g. Lainnya	119 038,23	1,04	131 247,75	1,02	146 180,37	1,05	157 793,07	1,06	175 679,34	1,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	167 669,62	1,47	195 427,68	1,52	204 854,77	1,47	218 941,23	1,47	236 350,55	1,46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 106 461,25	9,67	1 230 266,31	9,6	1 323 420,73	9,52	1 432 360,72	9,63	1 536 667,59	9,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 479 460,15	21,67	2 748 776,99	21,44	2 984 350,28	21,47	3 223 010,30	21,68	3 640 946,62	22,46
a. Bangunan	2 067 005,16	18,07	2 298 364,91	17,93	2 517 412,29	18,11	2 729 620,71	18,36	3 111 940,65	19,19
b. Non-Bangunan	412 454,99	3,61	450 412,08	3,51	466 937,98	3,36	493 389,58	3,32	529 005,97	3,26
Perubahan Inventori	548 460,78	4,79	401 740,39	3,13	258 955,60	1,86	205 541,38	1,38	448 179,68	2,76
Ekspor	3 829 463,49	33,47	3 805 798,57	29,68	3 695 773,39	26,59	3 953 277,64	26,59	4 468 618,27	27,56
Impor	4 667 349,32	40,79	4 342 837,47	33,87	4 300 541,46	30,94	4 588 145,50	30,86	5 517 733,72	34,03
Ekspor	- 837 885,83	-7,32	- 537 038,90	-4,19	- 604 768,07	-4,35	- 634 867,86	-4,27	-1 049 115,45	-6,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.441.103,05	100	12.821.715,64	100	13.897.816,58	100	14.867.075,74	100	16 214 025,61	100

* Angka sementara

Sumber : BPS, 2018

Tabel 3.4.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang
Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)

JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE	2013	2014	2015	2016	2017*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.642.628,16	6.902.847,24	7.312.754,27	7.676.837,48	8.144.561,06
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.896.089,91	2.938.669,49	3.062.039,47	3.209.514,97	3.401.023,87
b. Pakaian & Alas Kaki	335.495,20	351.015,63	374.756,49	393.847,64	416.048,26
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	639.668,41	676.291,70	725.175,01	758.865,65	786.493,23
d. Kesehatan dan Pendidikan	423.655,55	440.504,46	468.381,86	490.507,18	510.488,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.760.664,40	1.867.955,37	2.005.869,55	2.108.131,08	2.257.913,94
f. Hotel dan Restoran	480.884,45	514.184,65	552.377,44	585.497,97	631.946,94
g. Lainnya	106.170,24	114.225,93	124.154,46	130.473,00	140.646,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138.975,00	151.264,74	148.876,62	156.950,90	164.194,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	889.423,57	919.516,45	939.212,99	976.867,15	1.003.549,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.125.245,17	2.214.727,19	2.345.804,58	2.492.673,90	2.713.089,96
a. Bangunan	1.753.847,91	1.851.411,46	1.977.562,72	2.118.666,85	2.329.871,63
b. Non-Bangunan	371.397,27	363.315,73	368.241,86	374.007,05	383.218,34
5. Perubahan Inventori	271.450,61	236.710,77	142.979,18	153.746,02	265.160,84
6. Ekspor	3.520.023,81	3.369.200,05	3.523.138,39	3.640.589,73	3.861.435,11
7. Impor	3.806.995,92	3.509.992,07	3.562.496,83	3.679.656,44	4.028.522,49
8. Ekspor/ Exports	- 286.972,11	- 140.792,02	- 39.358,44	- 39.066,71	- 167.087,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.780.750,39	10.284.274,36	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84

* Angka sementara

Sumber : BPS, 2018

Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Rembang. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkiraan pada tahun 2019 sektor pertanian masih memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang meskipun, cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 3,24 triliun rupiah dengan kontribusi sektoral 27%. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan nilai PDRB sebesar 2,67 triliun dengan kontribusi sektoral 22%. Perkembangan kontribusi sektoral dari tahun ke tahun dapat menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Rembang tengah mengalami transformasi ke arah industri.

3.1.1.3 Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Rembang (YoY) pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,31%, atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang sebesar 1,75%. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2017 juga lebih rendah dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 3,71%. Pada tahun 2018 inflasi di Kabupaten Rembang sebesar 2,53persen. Perkiraan angka inflasi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 berada pada kisaran $\pm 3\%$ -1%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah, yaitu kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, yang akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Rembang yaitu:

- a. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Rembang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- b. Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku industri UMKM batik dan bahan penolong lainnya yang seringkali menyulitkan pengusaha.
- c. Pada sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal, pengembangan industri baik industri pengolahan maupun industri maritim serta pengembangan destinasi wisata masih harus terus ditingkatkan dengan menggandeng investor.
- d. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Rembang dengan pembangunan *technopark* perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
- e. Meskipun letak Kabupaten Rembang strategis (berada pada pertengahan jalur distribusi Jakarta – Surabaya), namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat karena kenaikan TDL, elpiji dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktifitas.

Namun disisi lain prospek perekonomian di Kabupaten Rembang masih memberikan optimisme dengan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengolahan yang disokong tumbuhnya UMKM menjadi motor transformasi ekonomi dari perkembangan sektor pertanian yang semakin melambat. Inovasi pada sektor UMKM terlihat semakin mampu berdaya saing untuk menjadi tuan rumah dalam tataran perekonomian lokal dan regional. Demikian pula kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Rembang yang terutama disokong oleh maraknya kegiatan perdagangan elektronik. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Rembang semakin dirasakan berdampak ganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan munculnya usaha-usaha pariwisata di tingkat lokal. Sementara pemerintah pusat turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif. Selain itu, munculnya industri besar berskala nasional yaitu Semen Indonesia menjadi pemicu meningkatnya perekonomian di Kabupaten Rembang.

Merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Rembang tahun 2020 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020, maka kondisi perekonomian Kabupaten Rembang Tahun 2020 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020 secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah asumsi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi. Terjadinya pelambatan laju

pertumbuhan sektor pertanian akibat faktor struktural seperti benih, pupuk, sarana produksi pertanian, perubahan pola iklim serta cuaca serta regulasi sub sektor perikanan yang menjadi kendala produksi perikanan tangkap. Namun demikian, melalui kebijakan merevitalisasi sektor pertanian, arus investasi dan belanja pemerintah yang berkeadilan, perluasan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan elestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh positif.

Berdasarkan asumsi tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang diproyeksikan pada Tahun 2020 pada kisaran 5,5%-6,0%. Disisi lain tingkat inflasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, akan terkendali pada kisaran 3%-1% melalui upaya optimalisasi peran TPID dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

- b. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 diproyeksikan 13,18%-12,18%. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat tercapai apabila didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Kebijakan pengentasan kemiskinan diprioritaskan melalui; upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan, pendampingan dan regulasi kelembagaan; program rumah sederhana layak huni sebagai upaya mengurangi beban pengurangan dengan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni; pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi; penumbuhan BUMDes sesuai potensi lokal baik untuk pengelolaan wisata Desa maupun ekonomi Desa.
- c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,7%-2,6% pada Tahun 2020 melalui: Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha, melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, pengembangan wirausaha muda; dan Peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Fasilitas tenaga kerja ke perusahaan – perusahaan. Peningkatan, perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2020, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah daerah.

Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPd Kabupaten Rembang Tahun 2020, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan;
4. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan :

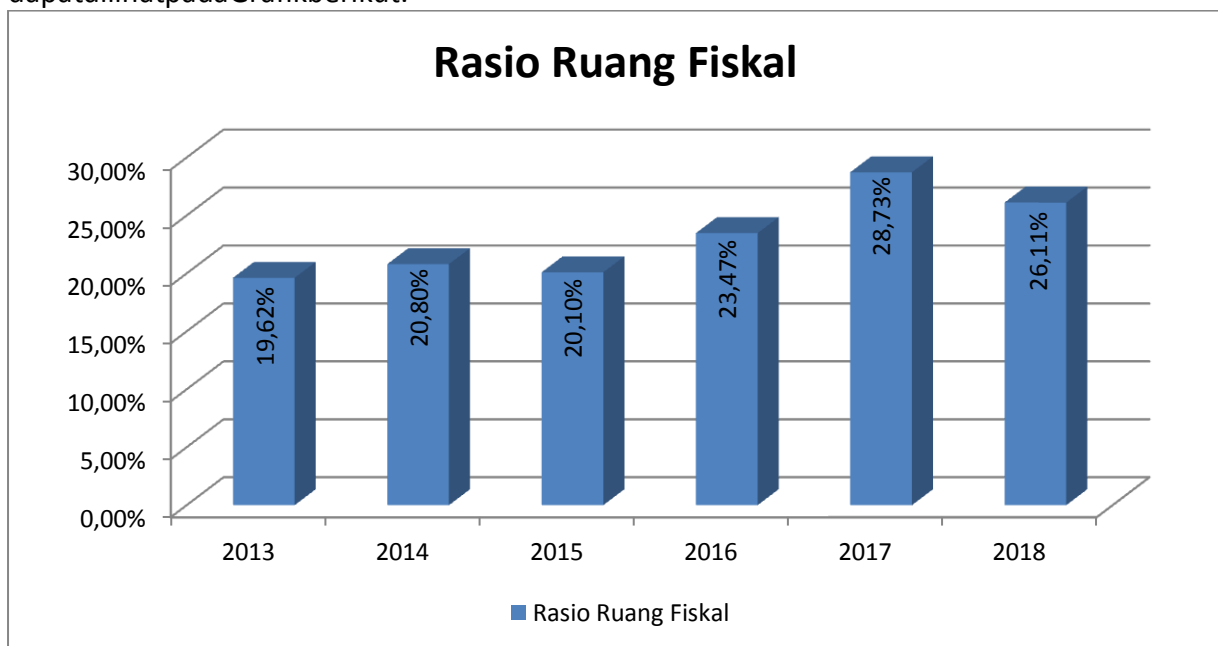
1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOPE-PBB)
3. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
4. Optimalisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi Piutang kepada seluruh Objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, Bintek, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya;
6. Modernisasi Administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
7. Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3.2.2. Arah Kebijakan Pendanaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilihat dari ruang fiskal. Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilisasi ekonomi negara (daerah). Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah "sisa" setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018

Grafik 3.3.
Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 (%)

Berdasarkan Grafik 3.3 terlihat bahwa ruang fiskal di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2013 ruang fiskal yang tersedia sebesar 19,62% dari total Pendapatan meningkat pada tahun 2018 ruang fiskal di Kabupaten Rembang telah mampu mencapai sebesar 26,11% dari total pendapatan. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama enam tahun terakhir.

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2018, Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 1,785,139,506,071.00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,912,305,783,279.64 pada tahun 2020 dengan proyeksi peningkatan sebesar 7.12%. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp. 1,827,508,350,914.00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 1,954,605,233,336.03 pada tahun 2020. Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), direncanakan Rp. 49,237,212,843.00 pada tahun 2019, Rp. 47,700,726,056.38 pada tahun 2020.

Secara rincirealisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (*unaudited*), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020 disajikan pada table berikut.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2020

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019 (Tahun Berjalan)	PROYEKSI 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15	1,785,139,506,071.00	1,912,305,783,279.64
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04	305,676,436,263.15	291,855,438,071.00	305,414,677,453.41
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	96,850,500,000.00	105,140,902,800.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	23,158,499,000.00	23,462,436,266.40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	10,030,000,000.00	11,635,072,876.37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	161,816,439,071.00	165,176,265,510.64
1.2	DANA PERIMBANGAN	935,943,695,312.00	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	1,086,414,856,000.00	1,125,318,615,921.90
1.2.1	Dana Transfer Umum	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	842,646,897,000.00	866,176,807,687.79
1.2.2	Dana Transfer Khusus	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	243,767,959,000.00	259,141,808,234.11
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	394,756,778,893.00	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	406,869,212,000.00	481,572,489,904.34
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	58,432,800,000.00	59,935,316,518.17
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	90,000,000,000.00	113,499,344,896.80
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	258,436,412,000.00	275,604,774,746.25
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00		32,533,053,743.12
2	BELANJA	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36	1,827,508,350,914.00	1,954,605,233,336.03
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,026,233,523,179.00	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	1,144,037,719,205.00	1,193,249,349,430.65

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019 (TahunBerjalan)	PROYEKSI 2020
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Belanja Pegawai	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	693,272,542,605.00	708,276,936,800.18
2.1.2	Belanja Bunga	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	1,131,632,000.00	971,733,613.33
2.1.4	Belanja Hibah	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	48,064,900,000.00	79,411,467,487.68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	7,284,660,000.00	7,409,006,585.94
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	11,944,474,900.00	12,862,869,388.65
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	381,339,509,700.00	383,317,335,554.87
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	16,730,000.00	815,608,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	708,070,558,749.58	778,741,423,431.22	750,650,510,349.20	683,470,631,709.00	761,355,883,905.38
2.2.1	Belanja Pegawai	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	179,311,949,050.00	165,526,459,903.01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	310,601,673,112.00	307,560,368,688.24
2.2.3	Belanja Modal	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	193,557,009,547.00	288,269,055,314.13
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169,435,241,973.03)	(106,835,332,068.18)	(19,751,796,984.21)	(42,368,844,843.00)	(42,299,450,056.38)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	396,607,873,805.61	232,225,166,662.58	108,161,445,444.40	49,237,212,843.00	47,700,726,056.38
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	49,237,212,843.00	47,700,726,056.38
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	17,729,980,680.00	-	-	-

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019 (TahunBerjalan)	PROYEKSI 2020
1	2	3	4	5	6	7
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00	6,868,368,000.00	5,401,276,000.00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	3,868,368,000.00	2,901,276,000.00
3 . 2 . 5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	39,079,920.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	384,311,148,383.61	223,996,777,512.58	95,443,817,524.40	42,368,844,843.00	42,299,450,056.38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	214,875,906,410.58	117,161,445,444.40	75,692,020,540.19	-	-

Kenaikan Pajak Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar Rp. 105,140,902,800.00 dengan persentase proyeksi peningkatan sebesar 8.56%. Adapun persentase proyeksi peningkatan Pajak Daerah tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase kenaikan Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2018 dikarenakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula harga patokan penjualan batu gamping untuk semen dan industri adalah sebesar Rp. 70.000/m³ turun menjadi Rp. 50.800/m³ dan harga patokan penjualan batu gamping semula sebesar Rp. 45.000/m³ turun menjadi 32.000/m³. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020 dan 2021 dimana pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Kapur (Batu Gamping) pada tahun 2018 mencapai Rp. 36.495.488.880,- dimana proporsi Pajak dari Kapur sendiri pada realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 memiliki proporsi sebesar 36.34%.

Sedangkan pada Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2020 Kenaikannya sangat sedikit dibandingkan realisasi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp. 9,000,000,000.00 yang pada target APBD Tahun Anggaran 2018 dimana penerimaan tersebut yang tidak setiap tahun rutin ada dan pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang pada Tahun Anggaran 2018 pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut digeser pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga sangat mendongkrak Realisasi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berkaitan dengan pos Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi kenaikan sebesar 2.16%, kenaikan tersebut memang dirasakan masih sedikit. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten telah memperhitungkan dengan adanya Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat mengurangi beban Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mempertimbangkan akan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2018 yang serapannya adalah sebesar 96.97% sehingga diperhitungkan dapat untuk membiayai Belanja Pegawai apabila terdapat penerimaan CPNS atau PPPK baru. Sedangkan Apabila pemerintah pusat terdapat kebijakan menaikkan Gaji Pegawai sebesar 5-6% maka Pemerintah Pusat juga akan memperhitungkan kenaikan tersebut dan menambahkannya pada Pos Dana Transfer Umum atau Dana Alokasi Umum sehingga dapat mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai tersebut.

Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada angka 19.26%. Akan tetapi terhadap Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan proporsinya lebih dari 25% terhadap total belanja. Adapun Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari Belanja Modal setelah ditambah dengan Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan

infrastruktur. Berkaitan terhadap target proporsi belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2020 direncanakan dapat mencapai target lebih dari 25 %, Pemerintah Kabupaten Rembang telah merencanakan kenaikan persentase Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 288,269,055,314.13 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp. 193,557,009,547.00 dengan persentase kenaikan sebesar 48,93%. Persentase tersebut lebih besar daripada persentase kenaikan belanja pegawai (pada belanja langsung) sebesar 0.68% dan persentase kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 3.85% sehingga hal tersebut dapat menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyajikan proporsi rencana belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2020 lebih besar dibandingkan proporsi belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengklasifikasikan Belanja Daerah menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam Proyeksi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Rembang masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu regulasi atau Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang masih berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan Pemerintah Daerah dimana Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2020 masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Namun Demikian Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Kabupaten Batang dan BPKP Jawa Tengah sebagai Pengembang Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran akan Kesiapan Pengklasifikasian Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6, kemudian Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 secara rinci tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020
1	2	3
1.	PENDAPATAN	1,912,305,783,279.64
2.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47,700,726,056.38
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47,700,726,056.38
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
		1,960,006,509,336.02
3.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Selain Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)	1,106,428,875,357.02
	Belanja Pegawai	708,276,936,800.18
	Belanja Bunga	971,733,613.33
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,862,869,388.65
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	383,317,335,554.87
	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
4.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Selain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah)	2,901,276,000.00
	Pembayaran Pokok Utang	2,901,276,000.00
	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	850,676,357,978.99

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2019 (data diolah)

Tabel3.7.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020
1	2	3
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	850,676,357,978.99
1.	PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	558,311,729,405.37
2.	PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah)	203,044,154,500.00
3.	PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal)	89,320,474,073.62

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2019 (data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2020 berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021, juga mengacu pada RKP demi terwujudnya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

A. Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

B. Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang **“madani”**. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah

pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

C. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

D. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausahaan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembangunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera jugaditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun

2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama dua tahun kedepan. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2020 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020		
1.	Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”	1	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	60-70		
				1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	1)	Nilai SAKIP	Poin	60-70
						2)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Poin	50-60
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3)	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	78,5-82,25)				
2.	Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah,	2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Persentase angka kemiskinan		%	12,18-13,18		
				3	Menurunnya angka pengangguran	4)	Persentase Tingkat Pengangguran terbuka	%	2,7-2,6
						4	Meningkatnya kesejahteraan	5)	Persentase penanganan PMKS

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020							
	maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup				an sosial									
								5	Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin	6)	Persentase keluarga miskin yang mempunyai usaha	%	65	
								3. Pertumbuhan Ekonomi					%	5,5-6,0
								6	Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan	7)	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	24-25	
								7	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	8)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	6,63	
								8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	9)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	6,45	
								3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	58,9
								9	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	10)	Indeks pencemaran lingkungan	Poin	43,26	
								10	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	11)	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	74,63	
								3.	Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif	4	Meningkatkan perekonomian daerah	5. Persentase pertumbuhan nilai Investasi		%
				11	Meningkatnya Investasi daerah	12)	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	Rp	9 Triliun					
				12	Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif	13)	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	%	12,5					
				6. Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata		%	5-10							
				13	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	14)	Nilai Realisasi hasil obyek wisata	Rp	7,04 Milyar					
4.	Melanjutkan	5	Meningkatkan	7. Indeks infrastruktur		Poin	69,26							

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	
	pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan	an kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah		14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	¹⁵⁾ Persentase aksesibilitas pusat kegiatan wilayah	%	70
				15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku	¹⁶⁾ Persentase ketersediaan air baku	%	35
				16	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	¹⁷⁾ Rasio pemanfaatan tata ruang	%	80
				17	Meningkatnya akses layanan dasar	¹⁸⁾ Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	90
				18	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	¹⁹⁾ Indeks akses transportasi	Poin	66,30
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan	6	Meningkatkan kualitas SDM	8. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		Angka	70,73	
				19	Meningkatnya kualitas pendidikan	²⁰⁾ Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,4
						²¹⁾ Rata-rata Lama Sekolah	Angka	7,7
				20	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	²²⁾ Angka Harapan Hidup	Angka	73-74
				21	Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak	²³⁾ IPG	Poin	87,3
					²⁴⁾ Nilai Capaian kabupaten Layak anak	Poin	725-760	
6.	Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	9. Persentase penanganan gangguan stabilitas dan ketertiban sosial		%	50-60	
				22	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	²⁵⁾ Persentase Partisipasi politik masyarakat	%	74
				23	Meningkatnya rasa aman masyarakat	²⁶⁾ Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	%	15

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	
		8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10. Persentase pertumbuhan penduduk		%	0,79	
				24	Menurunnya pertumbuhan penduduk	27) TFR	Poin	1,97-2,00
				25	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	28) Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi dukcapil	%	98-99
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan	9	Mewujudkan kedaulatan pangan	11. Skor PPH		Skor	86-87	
				26	Meningkatnya ketahanan pangan	29) Skor PPH Ketersediaan	Skor	88,93
						30) Skor PPH Konsumsi	Skor	86,8

Tema pembangunan Kabupaten Rembang pada tahun 2020 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2020 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Tema pembangunan nasional tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”, sehingga tema pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah: “*Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan menuju Kemandirian Ekonomi yang Berkualitas*”. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1	Mewujudkan Good Governance	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung dengan SDM yang tangguh.	1	Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				2	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi public
				2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Menurunnya angka pengangguran	1	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha, melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, Pengembangan wirausaha muda
				2	Peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan. peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
		4	Meningkatnya kesejahteraan sosial	1	Penguatan kelembagaan, basis data, Pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut (Lansia terlantar dan disabilitas terlantar) dengan pemberian jaminan hidup sebesar diatas angka garis kemiskinan kabupaten rembang dan pemberian jaminan kesehatan. Pemenuhan alat bantu pada

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
					disabilitas serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan secara berjenjang
		5	Meningkatnya usaha industri rumahan keluarga miskin	1	Peningkatan kemampuan pengembangan industri rumahan, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pendampingan
				2	Perluasan akses permodalan bagi keluarga miskin, akses pasar, dan manajemen usaha
				3	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan
		6	Meningkatnya keberdayaan petani dan nelayan	1	Peningkatan sarana prasarana dan teknologi pasca panen pertanian dan perikanan diikuti dengan penguatan kemitraan pemasaran
		7	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	1	Peningkatan jaringan distribusi perdagangan eceran, kecil dan besar
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industry	1	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	9	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	Peningkatan pengawasan dan penindakan sumber pencemaran air dan udara
		10	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Peningkatan kelestarian SDA dan lingkungan melalui penghijauan, resapan dan penampungan air
4	Meningkatkan perekonomian daerah	11	Meningkatnya Investasi daerah	1	Peningkatan kemudahan perizinan dan iklim investasi
		12	Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif	1	penataan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		13	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang menumbuhkan perekonomian lokal
5	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	1	Peningkatan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
		15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku	1	Peningkatan pengawasan dan akses layanan irigasi
		16	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	1	Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		17	Meningkatnya akses layanan dasar	1	Peningkatan kecukupan sarana prasarana permukiman
		18	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	1	Peningkatan kesadaran, kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas
6	Meningkatkan kualitas SDM	19	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
				3	Penciptaan layanan pendidikan yang berkualitas
		20	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penggerakan peran serta masyarakat
				2	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
		21	Meningkatnya keberdayaan gender serta	1	Penguatan dan pengawasan regulasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
			perlindungan anak		
7	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat	22	Meningkatnya stabilitas politik masyarakat	1	Peningkatan partisipasi politik masyarakat Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
		23	Meningkatnya rasa aman masyarakat	1	Penurunan kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
8	Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	24	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1	Penggerakan dan KIE KB KR yang merata dan berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera
		25	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				2	Peningkatan kepedulian aparat desa dan masyarakat pentingnya dokumen kependudukan
9	Mewujudkan kedaulatan pangan	26	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
				2	pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar
				3	Peningkatan indeks pertanaman
				4	Peningkatan daya saing perikanan, pengolahan jenis usaha perikanan

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, tema pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**. Tema pembangunan nasional tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tema Pembangunan Nasional

Berpenghasilan Menengah-Tinggi	Sejahtera	Adil	Berkesinambungan
<ul style="list-style-type: none"> ~ Transformasi struktural berjalan. ~ Produktivitas tenaga kerja meningkat. ~ Iklim investasi kondusif. ~ GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Kualitas hidup meningkat. ~ Perilaku disiplin dan beradab. ~ SDM berkualitas dan berdaya saing. ~ Indeks kebahagiaan meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Ketimpangan menurun. ~ Redistribusi berjalan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development). ~ Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2020, tema pembangunan nasional pada tahun 2020 adalah **“Peningkatan Sumber daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Prioritas Nasional pada tahun 2020 adalah :

1. Pembangunan manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan tahun 2020 ditujukan pada **“Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan arah kebijakan meliputi :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2020 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
- b. PDRB per kapita sebesar Rp.28,5 juta;
- c. Inflasi pada angka 3,0±1;
- d. Kemiskinan turun menjadi 9,81%;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;

- g. Indeks Gini sebesar 0,34;
- h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25; dan
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

4.2.3.1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dan perbandingan dengan Kabupaten sekitar, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan

- Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020, mengingat persentase kemiskinan Kabupaten Rembang masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,82%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebesar 15,41% yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian.
- Angka pengangguran di Kabupaten Rembang juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi supply dan demand. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebesar 3,19%, meskipun angka ini sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017 yaitu sebesar 4,20%, namun demikian perlu peningkatan dan produktivitas tenaga kerja melalui ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match.

2. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Perwujudan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi SDM Aparatur, keterbukaan dan transparansi informasi, pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis Tehnologi Informasi (TI), akuntabilitas kinerja dan integritas.
- Kinerja tata kelola pemerintahan yang baik cenderung belum optimal, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Rembang sampai saat ini masih CC. Sejalan dengan hal tersebut, maka perwujudan good governance menjadi isu yang patut diperhatikan agar lebih fokus, terukur dan realistis dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang ada.

3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

- Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang relatif kondusif. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 6,18% atau naik dari tahun 2016 sebesar 5,23%. Pertumbuhan ekonomi meningkat, salah satunya disebabkan telah beroperasinya industri besar di Rembang (Semen Indonesia). Pertumbuhan ekonomi tinggi akan berdampak pada peningkatan ketersediaan kesempatan/lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Tahun 2017 paling dominan yaitu sebesar 27,15. Namun pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung stagnan. Justru lapangan usahan pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan perlu didorong melalui inovasi teknologi pasca panen dan budidaya.

4. Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

- Penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memadai merupakan faktor yang dominan dalam rangka menyediakan prasarana layanan dasar bagi aktivitas penduduk. Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dapat mendorong kemudahan akses distribusi barang/jasa yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada pemenuhan akses layanan dasar (basic life access) masyarakat terutamanya kelompok rentan/miskin meliputi perumahan, air minum dan sanitasi.
- Isu pembangunan infrastruktur yang harus diperhatikan antara lain :
 - a. Panjang jalan kabupaten yaitu 642,75 km dengan rincian 67,90% dalam kondisi baik, dalam kondisi sedang sebesar 26,88% dan kondisi rusak sebesar 5,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Rembang secara umum dalam kondisi baik, sehingga peningkatan kualitas infrastruktur diarahkan pada pengembangan panjang jalan;
 - b. Belum optimalnya penataan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni dan akses layanan dasar lainnya.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan secara lebih luas di luar perhitungan PDRB per kapita. Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran komponen-komponen kesejahteraan masyarakat yang ditentukan meliputi usia harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. IPM Kabupaten Rembang masih relatif rendah dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Angka IPM Kabupaten Rembang tahun 2017 sebesar 68,95, lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Tengah (70,52) dan IPM Nasional (70,81).

Tabel 4.4
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Rembang dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Prioritas pembangunan Nasional 2020	Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2020	Isu strategis Kabupaten Rembang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang 2020
1. Pembangunan Nasional Pengentasan Kemiskinan	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Penurunan Angka Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Pengembangan infrastruktur wilayah dan Kawasan Strategis
3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan

Prioritas pembangunan Nasional 2020	Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2020	Isu strategis Kabupaten Rembang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang 2020
kerja			Perluasan Kesempatan Kerja
	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Layanan Pendidikan yang bermutu Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Peningkatan Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Air Baku.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Reformasi Birokrasi

4.2.3.2. Arah Kebijakandan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020 diarahkan pada **“pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan”**, dengan prioritas :

1. Pemantapan *Good Governance*, fokus pada :

- a. Peningkatan pelayanan publik (*direct service*) melalui : kunjungan lapangan dan “jemput bola”, serta membangun pemerintahan yang terbuka melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dan serapan aspirasi publik;
- b. Peningkatan pemanfaatan TI dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
- c. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif dan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah serta penegakan produk hukum;
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan ASN secara transparan, obyektif dan akuntabel.

2. Penanggulangan Kemiskinan, dengan fokus pada :

- a. Penyediaan akses layanan dasar (*basic life access*) untuk penduduk miskin melalui : akses pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh (air bersih, sanitasi, listrik);
- b. Pemberdayaan industri rumahan bagi keluarga miskin melalui fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar, penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan;
- c. Sinergitas program penanggulangan kemiskinan guna menghindari tumpang tindih atau *overlapping* program-program penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaan program lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;

- d. Peningkatan dan produktivitas tenaga kerja melalui ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*;
 - e. Perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
 - f. Peningkatan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Peningkatan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui: peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan;
 - h. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar; program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah;
 - i. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang mendorong akses distribusi barang/jasa yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - j. Peningkatan kualitas infrastruktur guna pemenuhan akses layanan dasar masyarakat terutamanya kelompok rentan/miskin meliputi perumahan, air minum dan sanitasi.
- 3. Meningkatkan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, fokus pada :**
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui : peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "*agriculture estate*" (integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan air lainnya;
 - b. Peningkatan produksi (kualitas dan kuantitas) hasil perikanan melalui: peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan dan permodalan; peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; perbaikan tata niaga perikanan;
 - c. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui : pengembangan industri rumahan; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk; pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran).
- 4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, fokus pada :** peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui : pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air); dan konservasi lingkungan.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 merupakan upaya guna mencapai target kinerja utamadaera tahun 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Target Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60 – 70
2	Persentase angka kemiskinan	%	12,18-13,18
3	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,5-6,0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,9
5	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	5-7
6	Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	%	5-10
7	Indeks infrastruktur	Poin	69,26
8	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Poin	70,96
9	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	50-60
10	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,79
11	Skor PPH	Poin	86,0-87,0

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2020, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang bersifat strategis, berdampak luas padapencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2020	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020	SATUAN
1. Pemantapan Good Governance			
	Nilai SAKIP	60-70	POINT
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	50-60	POINT
	Indeks kepuasan masyarakat	78,5-82,25	POINT
2. Penanggulangan Kemiskinan			
	Persentase Tingkat Pengangguran terbuka	2,7-2,6	%
	Persentase penanganan PMKS	27	%
	Persentase keluarga miskin yang mempunyai usaha	65	%
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,4	ANGKA
	Rata-rata Lama Sekolah	7,7	ANGKA
	Angka Harapan Hidup	73-74	ANGKA
	IPG	87,3	ANGKA
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	90	%

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2020	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020	SATUAN
3. Meningkatkan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian			
	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	24-25	%
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,63	%
	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	6,45	%
	Realisasi investasi baru PMA dan PMDN	9 T	RUPIAH
	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	12,5	%
4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			
	Indeks pencemaran lingkungan	43,26	POINT
	Indeks kualitas tutupan lahan	74,63	POINT

4.2.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang

Melalui penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses DPRD Kabupaten Rembang telah terinventarisasi sejumlah persoalan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

- a. Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Rembang dengan serapan tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lain. Mendorong kembali pertumbuhan sektor pertanian mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan mengingat masyarakat miskin mayoritas berada di sektor pertanian. Upaya merevitalisasi kondisi usahatani di Kabupaten perlu disokong dengan peningkatan kondisi infrastruktur pertanian berupa pembangunan jalan pertanian dan jalan usahatani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Pada aspek budidaya pertanian diperlukan modernisasi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian pula dalam pengembangan peternakan diperlukan upaya peningkatan populasi ternak pada kelompok-kelompok usaha peternakan yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Peningkatan layanan pendidikan dasar harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar terutama di tingkat SD, TK dan PAUD. Disamping itu, kelengkapan sarana prasana belajar juga tidak boleh terabaikan terutama untuk menunjang kegiatan pembelajaran di tingkat SMP. Kegiatan pembelajaran juga perlu didorong melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai prakarsa masyarakat untuk meningkatkan kesempatan warga masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan.
- c. Kondisi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Rembang yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas transportasi masyarakat maupun budidaya pertanian. Oleh karenanya perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada poros jalan maupun

jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Disamping masalah kerusakan, konstruksi pengaman jalan juga perlu dibangun secara bersamaan untuk tujuan meningkatkan umur teknis bangunan utamanya melalui perkuatan tebing jalan dan saluran drainase jalan

- d. Perbaiki kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di sejumlah tempat di Kabupaten Rembang, yang dipandang perlu untuk meningkatkan penyediaan prasarana dasar air bersih (PAB) serta penataan jalan lingkungan, guna mewujudkan kualitas permukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah besar keluarga miskin yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penanganan persoalan RTLH harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.
- e. Sejalan dengan tema pembangunan 2020 yang terfokus pada **Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**, maka kebijakan pembangunan juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat di bidang kewirausahaan dan sektor ekonomi masyarakat lainnya.

4.2.5. Inovasi Kebijakan Daerah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang yang termasuk kategori tinggi tidak dapat ditanggulangi dengan cara-cara konvensional. Paradigma kebijakan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin harus dirubah menjadi kebijakan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui langkah-langkah akselerasi sebagai berikut:

- a. Memperkuat pendampingan lintas OPD pada desa kategori merah telah menjadi keputusan Bupati Rembang sebagaimana surat keputusan No.050/1538/2017 tentang penetapan desa prioritas.
- b. Memperkuat ekonomi rumah tangga keluarga miskin dengan gerakan 'Istri mantap' (Industri rumahan mandiri tanggap).
- c. Memberikan biaya hidup pada lansia terlantar melalui gerakan "kamalia merekah" yang berkerjasama dengan Baznas, CSR, *Personal Responsibility*.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan melalui 'Dharma Siswa' dengan pemberian beasiswa pada siswa berprestasi bagi keluarga miskin dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.
- e. Meningkatkan layanan kesehatan melalui kemudahan pendaftaran *online* di RSUD Soetrasno serta layanan antar pulang gratis bagi pasien rawat inap dalam kota.
- f. Meningkatkan komitmen dalam penanganan RTLH 10 unit per desa melalui anggaran APBDes dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati No.141/0100/2017 Tanggal 15 Januari 2017.
- g. Pemberian bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kategori desa sebagaimana Perbub yang berlaku.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2020, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.1.1.1. *Urusan Pendidikan*

a. Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Fokus kegiatan adalah Peningkatan Akses Layanan PAUD, Pemenuhan standar isi, proses, dan Penilaian PAUD dan PNF, Pemenuhan standar kompetensi lulusan PAUD dan PNF, Pemenuhan standar sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan PAUD dan PNF, Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, dan Pengelolaan PAUD, Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan PAUD, dan Pemenuhan Standar Isi, Proses, dan Penilaian PAUD.

b. Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar

Fokus kegiatan adalah Fasilitasi Operasional Pendidikan SD, Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Penambahan Ruang Kelas Sekolah/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

c. Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Fokus kegiatan adalah Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP, Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Penambahan Ruang Kelas Sekolah/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan adalah sosialisasi disiplin PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), penyelesaian kasus kepegawaian PTK, pemberdayaan guru/PTK, bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1/S2, dan Peningkatan kesejahteraan PTK.

5.1.1.2. *Urusan Kesehatan*

a. Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.

b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Fokus kegiatan adalah Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dan Pengadaansarana dan prasarana posyandu

c. Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga

Fokus kegiatan adalah Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga, dan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional

Fokus kegiatan adalah Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA

e. Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan

Fokus kegiatan adalah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, rehabilitasi puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, pengadaan alat-alat kesehatan, servis alat-alat kesehatan, dan penyediaan biaya operasional kegiatan.

f. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan

Fokus kegiatan adalah Kegiatan Pengembangan Kompetensi tenaga medis, peningkatan puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.

g. Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular

Fokus kegiatan adalah Pelayanan pencegahandan penanggulangan penyakit menular, Peningkatan imunisasi, Peningkatansurveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah, Pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular, dan Fasilitasi Pengendalian penyakit menulardan tidaK menular.

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang

Fokus kegiatan adalah penyediaan biaya operasional RSUD dr. R. Soetrasno, dan peningkatan kualitas layanan.

i. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Fokus kegiatan adalah Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, Rehabilitasisedang/berat gedung RSUD, dan Pembangunan sarana prasarana RSUD.

5.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Fokus kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jalan dan pembangunan fisik jalan.

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer.

c. Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

Fokus kegiatan adalah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang, dan pendataan bangunan ber IMB.

5.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. **Program pengelolaan RTH dan areal pemakaman**
Fokus kegiatan adalah penataan dan pemeliharaan RTH.
- b. **Program pengembangan kawasan pemukiman**
Fokus kegiatan adalah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi, Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
- c. **Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung**
Fokus kegiatan adalah peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman, pembangunan IPAL Komunal dan MCK, pembangunan sarana airbersih, revitalisasi sarana dan prasarana air bersih, dan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong.

5.1.1.5. **Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas**
Fokus kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan operasi penegakan Perda dan Perbup diwilayah Kabupaten Rembang.
- b. **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**
Fokus kegiatan adalah pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional Linmas, dan pelayananpenanggulangan bahaya kebakaran.
- c. **Program Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan**
Fokus kegiatan adalah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, sosialisasi penanganan konflik sosial, sosialisasi dan sidak testurine bahaya penyalahgunaan narkoba.
- d. **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;**
Fokus kegiatan adalah peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulanganbencana, rintisan desa tangguh bencana.
- e. **Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana**
Fokus kegiatan adalah pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam, dan penanggulangan bencana.
- f. **Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana.**
Fokus kegiatan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terkena bencana.

5.1.1.6. **Urusan Sosial**

- a. **Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan**
Fokus kegiatan adalah Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
- b. **Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial**
Fokus kegiatan adalah peningkatan akses kepada jaminan sosial terutama bagi keluarga miskin.

5.1.2. **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

5.1.2.1. **Urusan Tenaga Kerja**

- a. **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
Fokus kegiatan adalah fasilitasi dan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pembinaan perusahaan tentang pengupahan, pemberdayaan dewan

pengupahan/pembinaan LKS BIPARTIT, dan pembinaan perusahaan tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

b. Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat, dan fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi.

5.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Fokus kegiatan adalah fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

b. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Fokus kegiatan adalah fasilitasi usaha ekonomi perempuan.

5.1.2.3. Urusan Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** dengan fokus kegiatan yaitu analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan pemantauan dan analisis ketersediaan pangan.

5.1.2.4. Urusan Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Fasilitasi Pertanian**, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan fokus kegiatan yaitu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

5.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku industri, penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan, koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

b. Program Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah perusahaan pengguna ABT.

c. Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas

Fokus kegiatan adalah sosialisasi pelaku usaha penghasil limbah B3 dan pengelolaan IPAL.

5.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

a. Program pelayanan pendaftaran penduduk

Fokus kegiatan adalah penerapan KTP-el dan Kartu.

b. Program Pelayanan Pencacatan Sipil

Fokus kegiatan adalah implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).

c. Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data

Fokus kegiatan adalah sosialisasi/penyuluhan administrasi kependudukan

5.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Fokus kegiatan adalah Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, Pengembangan Kerjasama, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

b. Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Lembaga Sosial Budaya.

c. Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa

Fokus kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Aset Desa, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa.

5.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Keluarga Sejahtera

fokus kegiatan yaitu Pemilihan Kelompok Tribina Penguatan Kelembagaan Tribina, Pelatihan Kader Tribina pada Fasilitasi Pendampingan Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, Pembinaan Kelompok UPPKS pada Penguatan kelembagaan UPPKS, Pemilihan Duta GenRe Kab. Rembang pada Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Rembang, Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Keluarga.

b. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus kegiatan yaitu penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu, danOperasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.

5.1.2.9. Urusan Perhubungan

a. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

Fokus kegiatan adalah penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang, fasilitasi dan pembinaan angkutan kendaraan tidakbermotor, monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / barang umum.

b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Fokus kegiatan adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas, lampu flashing, guadrail, marka jalan, zebra cross, barigade lalu lintas, APILL, sarana dan prasarana perlintasansebidang, pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas pemeliharaan.

c. Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan

Fokus kegiatan adalah pengendalian dan pengamanan lalu lintas, sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, fasilitasi operasional ATCS(Area Traffic Control System), dan operasi laik jalan.

5.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Fokus kegiatan adalah pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan SIM/aplikasi,sosialisasi/workshop/capacity building pemanfaatan SIM/aplikasi.Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasimasyarakat, Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik.

b. Program Pengembangan E-Government

Fokus kegiatan adalahPengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat.

5.1.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

Fokus pada Kegiatan Pengembangan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi.

b. Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Fokus pada Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

5.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

a. Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan

Fokus pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan Pendataan serta Pengendalian Perizinan.

b. Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi

Fokus pada kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Kepada Penanam Modal, Penyelenggaraan *Rembang Business Forum*, Promosi investasi melalui media elektronik (DARING), Temu Kemitraan antara Pelaku UMK dengan UMB, Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi, dan penyelenggaraan *Central Java Business Forum (CJIBF)* Tahun 2020.

5.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga** dengan fokus kegiatan yaitu pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.

5.1.2.14. Urusan Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan fokus kegiatan yaitu Pengelolaan Opendata, Publikasi Statistik Dasar (BPS), dan Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis.

5.1.2.15. Urusan Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah** dengan fokus kegiatan yaitu Pengelolaan persandian dan Keamanan informasi, Fasilitasi KAMI, dan Pengadaan alat studio dan Komunikasi.

5.1.2.16. Urusan Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Nilai Budaya** dengan fokus kegiatan yaitu Pengembangan Seni, Budaya dan Tradisi Masyarakat, Pelestarian dan Pengembangan Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan.

5.1.2.17. Urusan Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan Kearsipan** dengan fokus kegiatan yaitu Akuisisi Deposit dan Preservasi Kearsipan dan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.

5.1.3. Urusan Pilihan

5.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing perikanan

Fokus kegiatan yaitu Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Perikanan, Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Perikanan.

b. Program Pengembangan Perikanan budidaya dan garam

Fokus kegiatan yaitu Produksi Budidaya Perikanan dan Garam, Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan dan Garam.

c. Program Pengembangan Perikanan tangkap

Fokus kegiatan yaitu Produksi Budidaya Perikanan dan Garam, Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan dan Garam.

5.1.3.2. Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Fokus kegiatan yaitu Promosi Pariwisata, dan Pengembangan Pelayanan Informasi Pariwisata.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fokus kegiatan adalah Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

5.1.3.3. Urusan Pertanian

a. Program pengembangan agribisnis perkebunan

Fokus pada kegiatan : Pengembangan Tanaman Perkebunan, Penyediaan Perbibitan/Perbenihan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman Perkebunan, dan Penanganan Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Perkebunan.

b. Program pengembangan agribisnis pertanian

Fokus pada kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Pembinaan Perbenihan/Perbibitan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pelayanan Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura.

c. Program pengembangan agribisnis peternakan

Fokus pada kegiatan : Pengembangan Pembibitan dan Produksi Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Penanganan Pasca Panen Produk Peternakan dan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner), dan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Fokus pada kegiatan yaitu Fasilitasi Pembiayaan Petani, Pengembangan Infrastruktur Pertanian, Penyediaan Alat Mesin Pertanian serta Pengawasan Pupuk dan Pestisid.

e. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian

Fokus pada : Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan Informasi dan Teknologi Penyuluhan.

f. Program peningkatan kualitas bahan baku

Fokus pada kegiatan Budidaya, Penanganan Panen Pasca Panen Serta Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perkebunan Tembakau.

5.1.3.4. Urusan Perdagangan

a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

Fokus pada kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Wilayah I, II dan III.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

Fokus pada kegiatan : Peningkatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan, Pengembangan Promosi Perdagangan, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetropolitan

5.1.3.5. Urusan Perindustrian

a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri

Fokus pada kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri Agro, dan Penyediaan data dan informasi Usaha Industri

b. Program Pengembangan Industri Kreatif

Fokus pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri Ilmiatekta (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Kimia, Tekstil dan Aneka)

5.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.4.1. Sekretariat Daerah

a. Program peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental spiritual/Kemasyarakatan

Fokus pada kegiatan : Pelayanan dan Kebijakan Kehidupan Mental Spiritual, Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya, dan Fasilitasi Koordinasi dan Kebijakan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Fokus pada kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Kewilayahan, Fasilitasi, Koordinasi dan Penataan Kebijakan Pemerintahan Desa, Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pemerintahan, dan Fasilitasi, Kerjasama Daerah.

c. Program Peningkatan kualitas layanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan

Fokus pada kegiatan : Evaluasi Kelembagaan Daerah, Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan Tervalidasi, dan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

d. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan

Fokus pada kegiatan : Publikasi dan Penyebarluasan Informasi, Pengkajian dan Analisis Media, dan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Daerah

e. Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum

Fokus pada kegiatan : Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Penyebaran Informasi Hukum Daerah

f. Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah

Fokus pada kegiatan Penanganan Sengketa Hukum.

g. Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Fokus pada kegiatan : Fasilitasi dan kebijakan bidang SDA, Fasilitasi dan kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan, dan Fasilitasi dan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi.

h. Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan

Fokus pada kegiatan : Fasilitasi Pengendalian Pembangunan, Fasilitasi Layanan Pengadaan, dan Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

5.1.4.2. Kepegawaian Daerah

a. Program Pelayanan dan Penataan Aparatur

Fokus pada kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Kenaikan Pangkat Gaji Berkala, Pensiun dan Jabatan Fungsional, dan Pembinaan, Pengelolaan dan Fasilitasi Penataan ASN Dalam Jabatan.

b. Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian

Fokus pada kegiatan : Pembinaan, Pengelolaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur, dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah

Fokus pada kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN, dan Seleksi dan Pengembangan Karier ASN.

5.1.4.3. Sekretariat DPRD

a. Program Legislasi Daerah

Fokus pada kegiatan : Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif dan Non Anggaran, Fasilitasi Rapat - Rapat DPRD, Fasilitasi Kehumasan, Protokol dan Dokumentasi, dan Survey Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

b. Program Peningkatan Pengawasan & Penganggaran Pembangunan Daerah

Fokus pada kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

5.1.4.4. Pengawasan

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Fokus pada kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, Pelaksanaan Penanganan, Pemeriksaan Khusus dan Kasus, Pelaksanaan Kegiatan Reviu dan Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan Consulting, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko, Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang dan Pelaksanaan Kegiatan Mandatory.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Fokus pada kegiatan : Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

5.1.4.5. Keuangan Daerah

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus kegiatan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, penetapan pajak dan retribusi daerah, penerbitan dan penyampaian SPPTPBB, pendataan objek pajak dan retribusi daerah.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus kegiatan adalah pengendalian dan penerbitan dokumen penatausahaan keuangan, dan pemanfaatan TI.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah.

d. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

Fokus kegiatan adalah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

5.1.4.6. Perencanaan Pembangunan

a. Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan IPTEK

Fokus kegiatan adalah penelitian dan pengembangan, riset unggulan daerah, fasilitasi Dewan Riset Daerah dan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan, fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian pengembangan Kabupaten Rembang.

b. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Fokus kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Fokus kegiatan adalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Fokus kegiatan adalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

e. Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus kegiatan adalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

5.1.4.7. Penunjang Pemerintahan Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat**. Adapun Fokus kegiatan adalah pengendalian keamanan dan kenyamanan, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, pembinaan administrasi desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

a. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Fokus kegiatan adalah penyediaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

b. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Fokus kegiatan adalah penyusunan Renja, evaluasi Renja Perangkat Daerah, RKA, LAKIP, Profil Perangkat Daerah dan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah.

c. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Fokus kegiatan adalah Survey Kepuasan Masyarakat sesuai tupoksi OPD.

Adapun target pada tahun 2020 masing-masing program selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PENDIDIKAN				
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APK PAUD 3-6 Tahun	%	89	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A	%	35	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Desa Vokasi	%	4	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar				01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SD/MI/ sederajat	Point	94	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase SD yang terakreditasi A	%	35	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SMP/MTs/ sederajat	Point	76	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase SMP yang terakreditasi A	%	64,29	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi dan berkompotensi	%	65	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
II	URUSAN KESEHATAN				
	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat				02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	99	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99	02 Dinkes

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	96	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	75	02 Dinkes
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,15	02 Dinkes
		Prevalensi stunting	%	32	02 Dinkes
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	94	02 Dinkes
		Cakupan UKBM (posyandu strata mandiri)	%	20	02 Dinkes
		Cakupan desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	25	02 Dinkes
		Cakupan rumah tangga sehat	%	76	02 Dinkes
		Jumlah komunitas masyarakat sehat yang terbentuk	Skor	15	02 Dinkes
	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga				02 Dinkes
		Cakupan desa STBM	Skor	17	02 Dinkes
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)	%	77	02 Dinkes
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat - Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat IKL	%	80	02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan	%	100	02 Dinkes

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		kegiatan kesehatan kerja dan olah raga			
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	%	100	02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional				02 Dinkes
		Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	02 Dinkes
		Persentase RS terakreditasi	%	33,3	02 Dinkes
		Cakupan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	%	100	02 Dinkes
		Cakupan kepesertaan JKN masyarakat	%	100	02 Dinkes
		Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	%	94	02 Dinkes
		Indeks keluarga sehat	%	0,24	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan				02 Dinkes
		Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	%	98	02 Dinkes
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	98	02 Dinkes
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	98	02 Dinkes
	Program Peningkatan Sumber Daya				02 Dinkes

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan				
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	%	50	02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang terintegrasi E-Health Rembang	%	88	02 Dinkes
	Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular				02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC	%	58	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80	02 Dinkes
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100	02 Dinkes
		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	25	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	35	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Usia Produktif	%	50	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat	%	100	02 Dinkes

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		% Desa/ Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	74	02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang				03 Rsud Dr. R.Soetrasno
	Mutu Nasional	Kepatuhan identifikasi pasien	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Emergency respon time	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu tunggu rawat jalan	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Penundaan operasi elektif	%	5	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan jam visite dokter spesialis	%	80	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS	%	80	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan cuci tangan	%	85	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan pencegahan resiko akibat pasien jatuh	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan terhadap clinical pathway	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepuasan pasien dan keluarganya	%	70	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kecepatan respon terhadap komplain	%	75	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
	Mutu Prioritas	Persentase kehadiran dokter spesialis anak pada persalinan beresiko	%	100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Respon time operasi cito	%	100	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengka kepatuhan assesmen medis rawat inap pasien obstetri	%	100	
		Persentase kemampuan menangani bayilahir dengan asfiksia	%	100	
		Ketepatan ientifikasi bayi baru lagir di rs	%	100	
		Kepatuhan penggunaan cefazolin sebagai antibiotika profilaksis pada pasien SC	%	>80	
		Persentase penarapan keselamatan operasi (PKO)	%	100	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Sesuai Standar di Rumah Sakit (80%)	%	85	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan				04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentese jalan dalam kondisi baik (Formulasi : panjang jalan dalam kondisi baik / panjang jalan kabupaten x 100 %)	%	70	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentese jembatan dalam kondisi baik	%	70	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan air/irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik (Formulasi : jumlah bangunan air/irigasi dalam kondisi baik / total bangunan air/ irigasi x 100 %)	%	40	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang				04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rasio Kesesuaian Tata Ruang (Formulasi : Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan/Jumlah Pemohon Yang Sesuai Peruntukannya X 100%)	%	80	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak (Formulasi= Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	100	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Cakupan Akses Air Minum (Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	86,1	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh (Formulasi = Luas Pengurangan Kawasan Kumuh/Luas Kawasan Kumuh x 100%)	%	20,96	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase penurunan rumah tidak layak huni (Formulasi = jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni x 100%)	%	16,7	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung (Formulasi : Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung yang disetujui/ total jumlah permohonan x 100%)	%	100	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (Formulasi = Luas RTH publik yang dipelihara/jumlah luas RTH publik x 100%)	%	2,71	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio Makam (Formulasi = Luas Makam yang tertata / total luas makam x 100%)	%	10	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
V	URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT				
	Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas				06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada) x 100%	%	80	06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Kecamatan yang kondusif(Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%)	%	100	06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat				06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk)	%	89	06 Satuan Polisi Pamong Praja

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tingkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%)	%	100	06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase Lembaga politik dan Ormas yang Paham Politik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	80	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana (Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibanding Total Desa Rawan Bencana) X 100%	%	40	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana				08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani (Jumlah Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani Dibagi Jumlah Korban Terdampak Bencana) X 100%	%	100	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana				08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Dibanding Jumlah Masyarakat Yang Terdampak Bencana) X 100%	%	100	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VI	URUSAN SOSIAL				
	Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kemandirian FM	%	74	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase keberfungsian sosial PMKS	%	75	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
I	URUSAN TENAGA KERJA				
	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	%	'96,00 – 96,5	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan PerUndang-undangan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	100	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
II	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Industri Rumahan Perempuan (Industri Rumahan) Miskin Yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku	%	70	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Usaha			
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase PD yg menyusun PPRG/A	%	60	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Cakupan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio	0,000034	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan	%	74	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
III	URUSAN PANGAN				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/ kapita/hr	2.500	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Ketersediaan Protein Perkapita	Kkal/ kapita/hr	60	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Konsumsi Energi Perkapita	Kkal/ kapita/hr	2.145	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Nilai Konsumsi Protein Perkapita	Kkal/ kapita/hr	57	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
IV	URUSAN PERTANAHAN				
	Program Fasilitas Pertanahan				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi (Formulasi : permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/ jumlah permasalahan pertanahan) X 100%	%	100	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
V	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu (Jumlah Sampel Yang Memenehui Baku Mutu/Jumlah Sampel yang Diambil) X 100 %	%	55	12 Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim) X 100%	%	90	12 Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100%	%	60	12 Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	Dokumen		
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas				12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100%	%	20	12 Dinas Lingkungan Hidup
VI	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KTP	%	98,98	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KK	%	98,98	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Jumlah Bayi yang Terlayani Penerbitan Akta Kelahiran/Jumlah Bayi yang Lahir)	%	97	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	100	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		(Jumlah Warga Masyarakat yang Terlayani Penerbitan Kutipan Akta Kematian/Jumlah Warga Masyarakat yang Meninggal Dunia)			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data				13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Ketersediaan data kependudukan	%	75	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
VII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan				14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	%	9,75	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	75	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa				14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	%	70	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	%	100	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	90	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Lembaga Desa aktif	%	85	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
VIII	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Unmet Need KB	%	8	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Sejahtera				09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKS dan PIK R) yang Aktif	%	92,4	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
IX	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				15 Dinas Perhubungan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Jumlah Prasarana dan Fasilitas Yang Terpasang /Jumlah Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas) X 100%	%	48,2	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Laik Jalan (Jumlah Kendaraan Yang Lolos Uji/Jumlah Kendaraan Yang Diuji) X 100%	%	100	15 Dinas Perhubungan
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan				15 Dinas Perhubungan
		Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan (Jumlah Angkutan Yang Melayani Wilayah Jaringan Jalan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	72,6	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Pelanggaran Angkutan (Jumlah Pelanggaran Angkutan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	0,83	15 Dinas Perhubungan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Terminal dan Perparkiran Yang Terkelola (Jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola /Jumlah Terminal dan Perparkiran Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten) X 100%	%	95,9	15 Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan				15 Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan Yang Terlaksana (Jumlah Pengembangan Teknologi Yang Terlaksana/Yang Direncanakan) X100%	%	39	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara/Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang) X 100%	%	75	15 Dinas Perhubungan
X	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pengembangan E-Government				16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	%	2,75	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik				16 Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	%	100	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XI	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase Koperasi Aktif (Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Seluruh Koperasi) X100%	%	57	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (Jumlah UM t - Jumlah UM t-1/jumlah UM t-1) X 100%	%	1,25	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi				10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
		Persentase Pertumbuhan Investor (Formulasi= {Investor t Dikurangi Investor t-1}/Investor t-1 *100%)	%	5	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan				10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Sesuai SOP dan Penanganan Pengaduan (Jumlah Ijin Tepat Waktu/Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan)X100%	%	100	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga				01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	%	36	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Angka	5	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
XIV	URUSAN STATISTIK				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersusun	%	10,26	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XV	URUSAN PERSANDIAN				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah				16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	%	100	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Program Pengembangan Nilai Budaya				17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Perkembangan Budaya Lokal Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1)/Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1 X100%	%	10	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Perkembangan Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - (Tahun n - 1)/Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - 1) X100%	%	10	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Program Pelayanan Perpustakaan				18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif	%	90	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
XVIII	URUSAN KEARSIPAN				
	Program Pengelolaan Kearsipan				18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Persentase OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	%	90	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	URUSAN PILIHAN				
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan				19 Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Peningkatan Nilai Raman	%	1,5	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	%	10	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam				19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	%	2	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Garam	%	5	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
II	URUSAN PARIWISATA				
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jumlah Wisatawan Tahun n-(Tahun n-1)/Jumlah Wisatawan Tahun n-1) X100%	%	10	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Layanan Pariwisata Yang Diinformasikan	%	50	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Formulasi = jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tahun n/jumlah destinasi wisata tahun n)*100%	%	5	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
III	URUSAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Kenaikan Skor Kelompok Tani	%	52	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Peningkatan Kualitas Tembakau (Formulasi {Jumlah Tembakau Dengan Kualitas Baik/Jumlah %Total Produksi Tembakau}X100%)	%	85	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (jumlah pembiayaan petani yang terfasilitasi/ jumlah petani*100%)	%	97	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase sarpras pertanian dalam kondisi baik (jml sarpras pertanian kondisi baik/ jml sarpras pertanian*100%)	%	80	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Indeks Populasi Ternak (Populasi Tahun t/Populasi Tahun t-1)	Nilai	1,012	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Indeks Produksi Pertanian	Angka	1,025	11 Dinas Pertanian Dan Pangan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Formulasi $\frac{\text{Produktivitas Tahun } t - \text{Produktivitas Tahun } t-1}{\text{Produktivitas } t-1} \times 100\%$)	%	5	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
IV	URUSAN PERDAGANGAN				
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Cakupan kecamatan yang memiliki pasar daerah (formulasi = kecamatan yang memiliki pasar daerah/ jumlah kecamatan * 100%)	%	85,71	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		cakupan pasar yang menerapkan eRetribusi pasar $\frac{\text{jumlah pasar eRetribusi } t - \text{jumlah pasar eRetribusi } t-1}{\text{jumlah pasar eRetribusi } t-1} \times 100\%$)	%	50	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase peningkatan omset usaha perdagangan (formulasi= {Jumlah omset perdagangan t-jumlah omset perdagangan t-1}/ jumlah omset perdagangan t-1 *100%)	%	3	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
V	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri agro yang dikembangkan (formulasi= {Jumlah usaha industri agro n t-jumlah usaha industri agro t-1}/ jumlah usaha industri agro t-1 *100%)	%	1,3	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Industri Kreatif				20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri kreatif yang dikembangkan. (Formulasi= {Jumlah usaha industri kreatif n t-jumlah usaha industri kreatif t-1}/ jumlah usaha industri kreatif t-1 *100%)	%	1,2	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan				23 Sekretariat Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Bidang Pemerintahan Umum yang Ditangani	%	80	23 Sekretariat Daerah
		Persentasi MOU yang ditindaklanjuti (formulasi jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi jumlah MOU)	%	70	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan dibidang Tata Pemerintahan Desa	%	60	23 Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD	Nilai	3	23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Jumlah layanan keagamaan yang dilakukan/jumlah seluruh layanan keagamaan/Kesehatan/Tenaga Kerja /Tansmigrasi/Pembudayaan Pemuda/Olah Raga dan Seni Budaya)	%	60	23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan				23 Sekretariat Daerah
		Persentase OPD Yang telah Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan	%	12,5	23 Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	23 Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang Nilai IKMnya meningkat	%	92	23 Sekretariat Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan (Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum sesuai undang - undang) X 100%	%	75	23 Sekretariat Daerah
	Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan (jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan di bagi jumlah permasalahan hukum yang masuk) X 100%	%	80	23 Sekretariat Daerah
	Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan (jumlah pekerjaan pada APBD yang terealisasi dibagi total pekerjaan dalam APBD x 100%)	%	85	23 Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang Tertip Laporan pelaksanaan APBD (jumlah OPD yang mengirimkan laporan pelaksanaan tepat waktu dibagi jumlah OPD x 100%)	%	85	23 Sekretariat Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pencapaian Level Maturitas UKPBJ	%	85	23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Publik Yang Menerima Informasi	%	90	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Informasi yang Diklarifikasi untuk Peningkatan Citra Positif Pemerintah	%	100	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	23 Sekretariat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah				23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Terealisasi	%	80	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan yang Terealisasi	%	90	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi yang Terealisasi	%	90	23 Sekretariat Daerah
II	KEPEGAWAIAN DAERAH				
	Program Pelayanan dan Penataan Aparatur				42 Badan Kepegawaian Daerah
		Tingkat kepuasan ASN terhadap administrasi kepegawaian (jumlah PNS yang puas terhadap layanan administrasi kepegawaian dibagi	%	95	42 Badan Kepegawaian Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		jumlah PNS yang dilayani kali 100 %)			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah				42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang memiliki Kompetensi (Jumlah ASN yg ditingkatkan kompetensi dibagi total ASN) x 100 %	%	50	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase pengembangan karier ASN yang terfasilitasi	%	10	42 Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian				42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang kinerjanya diatas 80% (nilai seluruh ASN yang diatas 80 % dibanding jumlah ASN)	%	75	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Ketersediaan data informasi kepegawaian (Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang harus disediakan kali 100 %)	%	95	42 Badan Kepegawaian Daerah
III	SEKRETARIAT DPRD				
	Program Legislasi Daerah				24 Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda	%	95	24 Sekretariat DPRD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				24 Sekretariat DPRD
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	90	24 Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan anggaran yang tepat waktu	%	95	24 Sekretariat DPRD
IV	PENGAWASAN				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				39 Inspektorat
		Persentase peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan	%	100	39 Inspektorat
		Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan wilayah I,II,III,IV	%	100	39 Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas				39 Inspektorat
		Persentase aktif yang bersertifikat JFA dan JFPP sesuai standar	%	100	39 Inspektorat
V	KEUANGAN DAERAH				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	100	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan				41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	%	100	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	%	100	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	%	70	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah				40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	90	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase kesesuaian capaian kinerja daerah	%	65	
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi	%	70	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK				40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	20	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	20	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VII	PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN				

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2020	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat				43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Nilai	6	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai	6	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	Nilai	6	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	6	43 14 Kecamatan

5.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2020 adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.2
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

NOMOR	URAIAN	PROYEKSI 2020
1	2	3
1	PENDAPATAN	1,912,305,783,279.64
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	305,414,677,453.41
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	105,140,902,800.00
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	23,462,436,266.40
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,635,072,876.37
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165,176,265,510.64
01.02	DANA PERIMBANGAN	1,125,318,615,921.90
01.02.01	Dana Transfer Umum	866,176,807,687.79
01.02.02	Dana Transfer Khusus	259,141,808,234.11
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	481,572,489,904.34
01.03.01	Pendapatan Hibah	59,935,316,518.17
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113,499,344,896.80
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275,604,774,746.25

NOMOR	URAIAN	PROYEKSI 2020
1	2	3
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32,533,053,743.12
2	BELANJA	1,954,605,233,336.03
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,193,249,349,430.65
02.01.01	Belanja Pegawai	708,276,936,800.18
02.01.02	Belanja Bunga	971.733.613,33
02.01.04	Belanja Hibah	79,411,467,487.68
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	7,409,006,585.94
02.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,862,869,388.65
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	383,317,335,554.87
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00
02.02	BELANJA LANGSUNG	761,355,883,905.38
02.02.01	Belanja Pegawai	165,526,459,903.01
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	307,560,368,688.24
02.02.03	Belanja Modal	288,269,055,314.13
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42,299,450,056.38)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47,700,726,056.38
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47,700,726,056.38
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,401,276,000.00
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	2,901,276,000.00
03.02.05	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-
	PEMBIAYAAN NETTO	42,299,450,056.38

Adapun pagu indikatif masing-masing program/beserta perangkat daerah penanggungjawab sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.3

Pagu Indikatif Prangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
URUSAN KESEKRETARIATAN		
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	56.312.154.500	Seluruh PD
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000.000	Seluruh PD
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	3.000.000.000	Seluruh PD

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PENDIDIKAN		
Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	4.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	18.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
URUSAN KESEHATAN		
Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	3.200.000.000	02 Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000	02 Dinkes
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	720.000.000	02 Dinkes
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	75.362.579.405	02 Dinkes
Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan	25.000.000.000	02 Dinkes
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan	800.000.000	02 Dinkes
Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular	1.900.000.000	02 Dinkes
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang	100.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	25.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	62.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	20.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	12.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	5.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman	10.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT		
Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas	1.500.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.500.000.000	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	2.000.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana	1.750.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana	2.250.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN SOSIAL		
Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan	2.000.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	3.500.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
URUSAN TENAGA KERJA		
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	500.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	600.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.500.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
URUSAN PANGAN		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
URUSAN PERTANAHAN		
Program Fasilitasi Pertanahan	500.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.750.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	750.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas	6.000.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	700.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	350.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	655.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1.400.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa	2.000.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	1.200.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.600.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Sejahtera	400.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14.500.000.000	15 Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.000.000.000	15 Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	1.896.150.000	15 Dinas Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Program Pengembangan E-Government	4.000.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	600.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	800.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM	1.500.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
URUSAN PENANAMAN MODAL		
Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	800.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan	1.500.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga	3.100.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK		
Program Penyelenggaraan Data/Informasi Statistik Daerah	500.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN PERSANDIAN		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	400.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
URUSAN KEBUDAYAAN		

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
Program Pengembangan Nilai Budaya	2.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
URUSAN PERPUSTAKAAN		
Program Pelayanan Perpustakaan	500.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN		
Program Pengelolaan Kearsipan	500.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	1.500.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	15.000.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	2.600.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.500.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.500.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN		
Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	3.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	21.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	2.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	2.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	1.500.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
URUSAN PERDAGANGAN		
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	10.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan	3.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
URUSAN PERINDUSTRIAN		
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri	1.150.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Program Pengembangan Industri Kreatif	350.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
SEKRETARIAT DAERAH		
Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan	3.500.000.000	23 Sekretariat Daerah

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan	23.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan	1.110.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum	1.300.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah	700.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan	1.500.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan	4.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	2.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
KEPEGAWAIAN DAERAH		
Program Pelayanan dan Penataan Aparatur	2.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	6.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian	1.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
SEKRETARIAT DPRD		
Program Legislasi Daerah	34.000.000.000	24 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	11.000.000.000	24 Sekretariat DPRD
PENGAWASAN		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.000.000.000	39 Inspektorat
Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.000.000.000	39 Inspektorat
KEUANGAN DAERAH		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.700.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	1.500.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.500.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.200.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	3.700.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.750.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.750.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.250.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK	1.500.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

URUSAN DAN PROGRAM	Pagu Indikatif 2020	OPD PENANGGUNG JAWAB
PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN		
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	14.000.000.000	43 14 Kecamatan
Jumlah	761.355.883.905	

Program prioritas pembangunan di Kabupaten Rembang tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2020

No	Program kerja (Program Prioritas)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Tahun	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
1	1 . Program Reformasi Birokrasi.	Peningkatan pelayanan birokrasi, melalui Teknologi Informasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan integrasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu (SiPandu) 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 3. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik perkuatan kapabilitas APIP 4. Layanan pengadaan barang dan jasa secara online (LPSE) 5. Pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja 	Bappeda, BPPKAD Inspektorat Bagian Adpem BKD,Orpeg
		Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik (e-government)	Memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan layanan tata kelola sistem pemerintahan berbasis IT	Dinkominfo, Orpeg
		Pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan maksud pendekatan layanan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk penyerapan aspirasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem kunjungan langsung kepada masyarakat secara road show (dinamika pembangunan, kunjungan langsung sesuai teknis) 2. Komunikasi dan serapan aspirasi langsung dengan menggunakan media elektronik, media sosial dan jalinan masyarakat (kerjasama dengan Radio dengan siaran "Halo Bupati", dengan akun medsos) 	Semua OPD Humas, Dinkominfo
		Pelayanan Perijinan Terpadu SatuPintu (PTSP) sesuai dengan aturan yang ada	Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DPMPTSP Naker

No	Program kerja (Program Prioritas)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Tahun	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
			Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Bagian Tapem Kecamatan
2	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan bagi masyarakat penganggur serta menciptakan kesempatan kerja	Pelatihan dengan metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda, fasilitasi tenaga kerja ke perusahaan perusahaan	DPMPTSP NAKER
3	Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Penguatan lembaga satgas kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TKPK Kabupaten dan kecamatan, satgas kemiskinan desa/kelurahan 2. Koordinasi, sinergitas penanggulangan kemiskinan sampai tingkat desa 3. Validasi data kemiskinan 	Bappeda, Dinsos, Kecamatan, Desa, kelurahan
		Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	untuk peningkatan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Dinpermasdes, BPPKAD
		Bantuan Sosial stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	DPKP, BPPKAD
		Bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis Individu diberikan kepada lansia terlantar dan disabilitas berat dengan layanan jaminan hidup dan kesehatan. Melalui kegiatan "kamalia merakah" dan jaminan kesehatan 2. Berbasis keluarga diberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha 3. Kemampuan kesejahteraan keluarga dengan pengembangan industri rumahan berbahan baku lokal (akses pelatihan, bantuan peralatan, kemudahan akses permodalan, pendampingan) 	<p>Bappeda, Dinkes, DinsosPPKB, CSR, Baznas, personal responsibility</p> <p>DPMPTSPNaker, Dinsospkb, DinindakopUMK, Dintanpan, Dinlutkan, Dinpermasdes, Dinkes, Dinbudpar, Dindikpora</p>
4	Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pertanian, industri dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, 	Dintanpan, Dinlutkan, DinindagkopUMK

No	Program kerja (Program Prioritas)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Tahun	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	daerah	pariwisata didukung dengan akses permodalan dan jejaring pasar	<p>perikanan, dan kelauatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar dan manajemen usaha 4. Pengembangan destinasi wisata serta sarpras wisata unggulan daerah 5. Riset-litbang tentang desain pengelolaan industri masyarakat bersama produk unggulan daerah (PUD) seperti garam, pengolahan ikan, dan komoditas pertaian 6. Riset-litbang tentang diversifikasi produk tanaman pangan dan hortikultura 	M, Dinbudpar, Bappeda
5	Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar kawasan dengan pengembangan angkutan perbatasan dan mendukung reaktifasi kereta api. Pada tahap ini akan disusun review terhadap tataran transportasi lokal menyesuaikan dengan program reaktifasi kereta api. 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten sesuai dengan standar jalan lokal 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata 4. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pengembangan sistem pemantau lalu lintas otomatis (automated traffic control system) 	DPUTaru, Dinhub
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pemukiman 2. Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan 3. Pengembangan rumah deret maupun rumah susun sebagai salah satu kelengkapan 	

No	Program kerja (Program Prioritas)	Definisi Operasional	Indikasi Rencana Tindak Tahun	
			Kegiatan Utama Yang Akan Dilaksanakan (Bukan Kegiatan Nomenklatur)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
			kawasan pertumbuhan ekonomi	
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas air baku	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air serta pembangunan/rehab jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey potensi sumber air baku 2. Pembangunan dan rehab embung 3. Perbaikan jaringan irigasi 4. Pembebasan lahan potensial untuk pembangunan embung /waduk di Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu 5. Riset-litbang tentang sanitasi lingkungan dan kualitas potensi air baku 	DPUTaru, Bappeda
7	Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas	Pemberian Stimulan pada lembaga pendidikan dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Operasional lembaga PAUD dan PNF 2. Bantuan kesejahteraan pada pendidik PAUD dan pengelola PKBM 3. Bantuan kesejahteraan Guru Wiyata bakti 4. Bantuan kesejahteraan guru madin 	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan 2. Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan 3. Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan 	Bagian Kesra
		Darmasiswa	Pemberian beasiswa pada siswa berprestasi bagi keluarga miskin dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi	Dindikpora
		Layanan pendidikan yang dikembangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sekolah ramah anak 2. Pendidikan berbasis keluarga melibatkan orangtua dalam proses pembelajaran untuk tingkat SMP 	Dindikpora
8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Ramah Anak 2. Puskesmas Ramah lansia 3. Posyandu Remaja 4. Pendaftaran Online RSUD R. Soetrasno 5. Pasien rawat inap pulang diantar sampai rumah dengan gratis 	Dinkes

Adapun pagu indikatif masing-masing program prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5
Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF 2020
1	PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	558,311,729,405.37
2	PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah)	203,044,154,500.00
3	PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal)	89,320,474,073.62

Kerangka pendanaan Belanja Langsung dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dalam dua Prioritas yaitu Prioritas 1 dan Prioritas 2. Usulan Kegiatan dalam Prioritas 2 akan menjadi daftar tunggu (*waiting list*) dengan asumsi ada kelebihan penerimaan pendapatan. Adapun pagu indikatif tiap Perangkat Daerah berdasarkan prioritas ditunjukkan dalam Tabel 5.6. berikut.

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Kabupaten Rembang Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD P1	APBD P2	RKPD
1	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	88.288.851.500	199.450.114.622	287.738.966.122
2	02 Dinas Kesehatan	109.782.579.405	84.952.029.595	194.734.609.000
3	03 Rsd Dr. R.Soetrasno	126.800.000.000	58.337.689.000	185.137.689.000
4	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	84.800.000.000	92.400.000.000	177.200.000.000
5	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	28.800.000.000	15.125.133.000	43.925.133.000
6	06 Satuan Polisi Pamong Praja	5.300.000.000	5.775.078.000	11.075.078.000
7	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.336.000.000	0	2.336.000.000
8	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.800.000.000	2.451.000.000	10.251.000.000
9	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	15.400.000.000	-60.340.000	15.339.660.000
10	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	7.100.000.000	3.955.000.000	11.055.000.000
11	11 Dinas Pertanian Dan Pangan	34.300.000.000	109.794.160.000	144.094.160.000
12	12 Dinas Lingkungan Hidup	10.300.000.000	7.565.220.000	17.865.220.000
13	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.505.000.000	2.741.028.000	6.246.028.000

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD P1	APBD P2	RKPD
14	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.400.000.000	1.292.224.000	7.692.224.000
15	15 Dinas Perhubungan	20.196.150.000	5.730.770.000	25.926.920.000
16	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.300.000.000	108.700.000	7.408.700.000
17	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7.800.000.000	4.908.500.000	12.708.500.000
18	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.800.000.000	13.159.400.000	15.959.400.000
19	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan	20.900.000.000	11.504.000.000	32.404.000.000
20	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	18.600.000.000	20.752.410.000	39.352.410.000
23	23 Sekretariat Daerah	38.329.000.000	16.352.000.000	54.681.000.000
24	24 Sekretariat DPRD	45.000.000.000	0	45.000.000.000
25	25 Kecamatan Rembang	8.732.221.120	1.547.336.880	10.279.558.000
26	26 Kecamatan Kaliori	1.000.481.000	0	1.000.481.000
27	27 Kecamatan Sulang	1.215.228.000	0	1.215.228.000
28	28 Kecamatan Sumber	995.698.000	0	995.698.000
29	29 Kecamatan Bulu	1.092.468.000	0	1.092.468.000
30	30 Kecamatan Lasem	1.301.362.880	0	1.301.362.880
31	31 Kecamatan Pancur	1.032.503.000	0	1.032.503.000
32	32 Kecamatan Sluke	966.654.000	0	966.654.000
33	33 Kecamatan Pamotan	1.509.500.000	0	1.509.500.000
34	34 Kecamatan Gunem	1.580.611.000	389.455.000	1.970.066.000
35	35 Kecamatan Sale	1.171.915.000	0	1.171.915.000
36	36 Kecamatan Kragan	1.079.047.000	0	1.079.047.000
37	37 Kecamatan Sedan	1.580.611.000	1.867.114.000	3.447.725.000
38	38 Kecamatan Sarang	1.210.003.000	0	1.210.003.000
39	39 Inspektorat	8.800.000.000	3.311.722.000	12.111.722.000
40	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.750.000.000	1.145.500.000	12.895.500.000
41	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.700.000.000	12.764.560.000	26.464.560.000
42	42 Badan Kepegawaian Daerah	10.800.000.000	4.931.220.000	15.731.220.000
	TOTAL	761.355.883.905	682.251.024.097	1.443.606.908.002

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2018, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Rembang pada Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rembang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja
			2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60 – 70
2	Persentase angka kemiskinan	%	12,18 – 13,18
3	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,5-6,0
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,9
5	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	5-7
6	Persentase pertumbuhan nilai realisasi hasil obyek wisata	%	5-10
7	Indeks infrastruktur	Poin	69,26
8	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Poin	70,96
9	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	50-60
10	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,79
11	Skor PPH	Poin	86,0-87,0

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Rembang sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1)	Persentase Angka Kemiskinan	%	12,18 – 13,18	IKU Kab.	Kabupaten
2)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,7-2,6	Indikator Sasaran Kab.	DPMPTSP NAKER
3)	Persentase Penanganan PMKS	%	27	Indikator Sasaran	Dinsos PP KB
4)	Persentase Keluarga Miskin yang mempunyai usaha	%	65	Indikator Sasaran	Dinsos PP KB, Dintanpan, Dinlutkan, DPMPTSP Naker & Dinindagkop UKM
5)	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	IKU Kab.	Kabupaten
6)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	24-25	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan, Dinlutkan
7)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,63	Indikator Sasaran Kab.	Dinindagkop UKM
8)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,45	Indikator Sasaran Kab.	Dinindagkop UKM
9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,9	IKU Kab	Kabupaten
10)	Indeks Pencemaran Lingkungan	Angka	43,26	Indikator Sasaran Kab.	DLH
11)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74,63	Indikator Sasaran Kab.	DLH
12)	Indeks Infrastruktur	Angka	69,26	IKU Kab.	Kabupaten
13)	Persentase Aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah	%	70	Indikator Sasaran Kab.	DPU TARU

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
14)	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	35	Indikator Sasaran Kab.	DPU TARU
15)	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Layanan Dasar	%	90	Indikator Sasaran Kab.	DPKP
16)	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70,96	IKU Kab.	Kabupaten
17)	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,4	Indikator Sasaran Kab.	Dindikpora
18)	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	7,7	Indikator Sasaran Kab.	Dindikpora
19)	Usia Harapan Hidup	Angka	73-74	Indikator Sasaran Kab.	Dinkes/RSU dr. R. Sutrasno
20)	IPG	Angka	87,3	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB
21)	Nilai Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Angka	725-760	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB KB
22)	Persentase Penanganan Gangguan Stabilitas dan Ketertiban Sosial	%	50-60	IKU Kab.	Kabupaten
23)	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	74	Indikator Sasaran Kab.	Kesbangpol
24)	Persentase Penurunan Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%	15	Indikator Sasaran Kab.	Satpol PP
25)	Persentase Pertumbuhan Penduduk	%	0,79	IKU Kab.	Kabupaten
26)	TFR	Angka	1,97-2,00	Indikator Sasaran Kab.	Dinsos PP KB
27)	Skor PPH	Skor	86,0-87,0	IKU Kab.	Kabupaten
28)	Skor PPH Ketersediaan	Skor	88,93	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan
29)	Skor PPH Konsumsi	Skor	86,8	Indikator Sasaran Kab.	Dintanpan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
				b.	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
B.1.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
1)	Angka Partisipasi Sekolah pada Seluruh Kelompok Usia Sekolah	%	95,32	Indikator PD	Dindikpora
2)	Level Standar Nasional Pendidikan	Skor	71,60	Indikator PD	Dindikpora
2	URUSAN KESEHATAN				
1)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	Indikator PD	Dinkes
2)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	110	Indikator PD	Dinkes
3)	Angka Kematian Balita (AKABA)	Kasus	125	Indikator PD	Dinkes
4)	Persentase Tingkat kemandirian BLUD RS	%	75	Indikator PD	RSUD dr.R.Soetrasno
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1)	Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan	%	4	Indikator PD	DPU TARU
2)	Persentase pertumbuhan jembatan dalam kondisi baik	%	4	Indikator PD	DPU TARU
3)	Persentase Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	10	Indikator PD	DPU TARU
4)	Persentase Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang	%	15	Indikator PD	DPU TARU
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1)	Persentase Perkembangan Akses Sanitasi Layak	%	0,5	Indikator PD	DPKP
2)	Persentase Perkembangan Akses Air Minum Layak	%	0,5	Indikator PD	DPKP
3)	Persentase Perkembangan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	%	15	Indikator PD	DPKP
4)	Persentase Perkembangan Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	15	Indikator PD	DPKP
5	URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1)	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif	%	80	Indikator PD	Kesbangpol
2)	Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat	%	100	Indikator PD	Satpol PP
3)	Persentase Penanganan pelanggaran Perda	%	80	Indikator PD	Satpol PP
4)	Indeks Penanggulangan Bencana	Angka	72	Indikator PD	BPBD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
6	URUSAN SOSIAL				
1)	Persentase PMKS tertangani	%	5	Indikator PD	Dinsos PP KB
B.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN TENAGA KERJA				
1)	Persentase Pertumbuhan Partisipasi Angkatan Kerja	%	10-15	Indikator Renstra	DPMPTSP Naker
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1)	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	%	75	Indikator PD	Dinsos PP KB
2)	Persentase Industri Rumah Tangga Perempuan yang Mandiri	%	5	Indikator PD	Dinsos PP KB
3)	Persentase Desa Ramah Anak	%	70	Indikator PD	Dinsos PP KB
3	URUSAN PANGAN				
1)	Pertumbuhan Skor PPH	%	0,5	Indikator PD	Dintanpan
4	URUSAN PERTANAHAN				
1)	Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	Indikator PD	DPKP
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,2	Indikator PD	DLH
2)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	93	Indikator PD	DLH
3)	Luas Tutupan Lahan	Ha	36.728.337	Indikator PD	DLH
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	95	Indikator PD	Dindukcapil
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1)	Persentase Desa dengan Kinerja Baik	%	70	Indikator PD	Dinpermades
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1)	CPR	Angka	82	Indikator PD	Dinsos PPKB
9	URUSAN PERHUBUNGAN				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
1)	Indeks Peningkatan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	%	57	Indikator PD	Dinhub
2)	Indeks Perkembangan Fasilitas dan Prasarana Layanan Jaringan Distribusi Orang/Barang	Angka	74,1	Indikator PD	Dinhub
3)	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka	65,23	Indikator PD	Dinhub
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1)	Indeks SPBE	Angka	2,76	Indikator PD	Dinkominfo
2)	Skor KIP	Skor	70	Indikator PD	Dinkominfo
11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1)	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	20-25	Indikator PD	Dinindagkop UKM
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1)	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang terserap pada Penanaman Modal	%	5-15	Indikator PD	DPMPTSPNaker
2)	Persentase Penanaman Modal yang Taat Aturan	%	100	Indikator PD	DPMPTSPNaker
13	URUSAN KEBUDAYAAN				
1)	Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata	%	40-50	Indikator PD	Dinbudpar
14	URUSAN PERPUSTAKAAN				
1)	Persentase Cakupan Layanan Perpustakaan	%	70	Indikator PD	Dinarpus
15	URUSAN KEARSIPAN				
1)	Persentase Pengelolaan Kearsipan Daerah sesuai NSPK	%	72	Indikator PD	Dinarpus
16	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1)	Persentase Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan	%	21	Indikator PD	Dindikpora
2)	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	%	50	Indikator PD	Dindikpora
17	URUSAN STATISTIK				
1)	Persentase Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tanggap dan Transparan	%	100	Indikator PD	Dinkominfo
18	URUSAN PERSANDIAN				
1)	Indeks KAMI	Angka	2,75	Indikator PD	Dinkominfo
B.3	PELAYANAN URUSAN PILIHAN				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKAN				
1)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	Indikator PD	Dinlutkan
2)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan	%	1	Indikator PD	Dinlutkan
3)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5	Indikator PD	Dinlutkan
2	URUSAN PARIWISATA				
1)	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang menumbuhkan Perekonomian Lokal	%	20 -25	Indikator PD	Dinbudpar
3	URUSAN PERTANIAN				
1)	Pertumbuhankelaskelompoktani	%	5	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
2)	Persentase peningkatan produksi tembakau kualitas baik	%	5	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
3)	Indeks pertanaman	Angka	1,4	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
4)	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1,2	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
5)	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	%	2,10	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
6)	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	5	Indikator Sasaran PD	Dintanpan
4	URUSAN PERDAGANGAN				
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	13-15	Indikator PD	Dinindagkop UKM
2)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	20-25	Indikator PD	Dinindagkop UKM
5	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	20-22	Indikator PD	Dinindagkop UKM
2)	Persentase Peningkatan Klaster Usaha Industri Kreatif	%	20	Indikator PD	Dinindagkop UKM
B.4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1)	Indeks Kualitas Perencanaan	Angka	7	Indikator PD	Bappeda
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Indikator PD	
1)	Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan	%	20	Indikator PD	Bappeda
3	KEUANGAN DAERAH				
1)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Indikator PD	BPPKAD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
2)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,97	Indikator PD	BPPKAD
3)	Persentase Peningkatan PAD	%	3.84	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
4)	Persentase Petepatan Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	%	100	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
5)	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100	Indikator Sasaran PD	BPPKAD
4	KEPEGAWAIAN DAERAH				
1)	Nilai Kualitas ASN	Angka	80	Indikator PD	BKD
5	PENGAWASAN				
1)	Nilai Maturitas SPIP	Angka	3	Indikator PD	Inspektorat
6	SEKRETARIAT DPRD				
1)	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Angka	90	Indikator PD	Setwan
2)	Persentase Peningkatan Fasilitas Fungsi Legislasi	%	90	Indikator PD	Setwan
3)	Persentase Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan Anggaran	%	90	Indikator PD	Setwan
7	SEKRETARIAT DAERAH				
1)	Nilai SAKIP OPD	Angka	60-70	Indikator PD	Bag. Organisasi, Setda
2)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan OPD	Angka	80	Indikator PD	Bag. Organisasi, Setda
C	ASPEK DAYA SAING				
1)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60-70	IKU Kab.	Kabupaten
2)	Nilai SAKIP	Angka	60-70	Indikator Sasaran Kab	Bagian Organisasi Setda
3)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Angka	50-60	Indikator Sasaran Kab	Inspektorat
4)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,5-82,25	Indikator Sasaran Kab	K Bagian Organisasi Setda
5)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	5-7	IKU Kab.	Kabupaten
6)	Realisasi Investasi Baru PMA dan PMDN	Rp	9 triliun	Indikator Sasaran Kab	DPMP TSP Naker

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Jenis Indikator	Penanggungjawab
			2020		
7)	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	%	12,5	Indikator Sasaran Kab	Bag. Adm. Perekonomian Setda & Dinindagkop UKM
8)	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	%	5-10	IKU Kab.	Kabupaten
9)	Nilai Realisasi Hasil Obyek Wisata	Rp	7,041 Milyar	Indikator Sasaran Kab	Dinbudpar
10)	Rasio Pemanfaatan Tata Ruang	Angka	80	Indikator Sasaran Kab	DPU Taru
11)	Indeks Akses Transportasi	Angka	66,30	Indikator Sasaran Kab	Dinhub
12)	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	95	Indikator Sasaran Kab	Dindukcapil

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rembang, dan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut disusunlah sasaran, indikator dan target pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan maka disusunlah strategi dan kebijakan yang jitu. Selanjutnya dari kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program prioritas beserta kegiatan-kegiatan prioritas yang dalam implementasinya tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Rembang. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi maka disusunlah Program pembangunan daerah beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas dan kegiatan prioritas Tahun 2020.

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatn tinggi bagi masyarakat Kabupaten Rembang.
3. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Rembang secara menyeluruh.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ